



IJSED

Indonesian Journal
of Sociology, Education,
and Development



Volume 1
Issue No. 1 (Januari-Juni)
Tahun Terbit 2019



Dewan Redaksi

Editor-In-Chief

Anggaunitakiranantika, S.Sos., M.Sosio.
(Universitas Negeri Malang)

Associate Editors

Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si.

(Universitas Pendidikan Indonesia)

Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si.

(Universitas Negeri Manado)

Prof. Dr. Warsono

(Universitas Negeri Surabaya)

Dr. Thriwaty Aرسال, M.Si.

(Universitas Negeri Semarang)

Rakhmat Hidayat, Ph.D.

(Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Nursalam, M.Si.

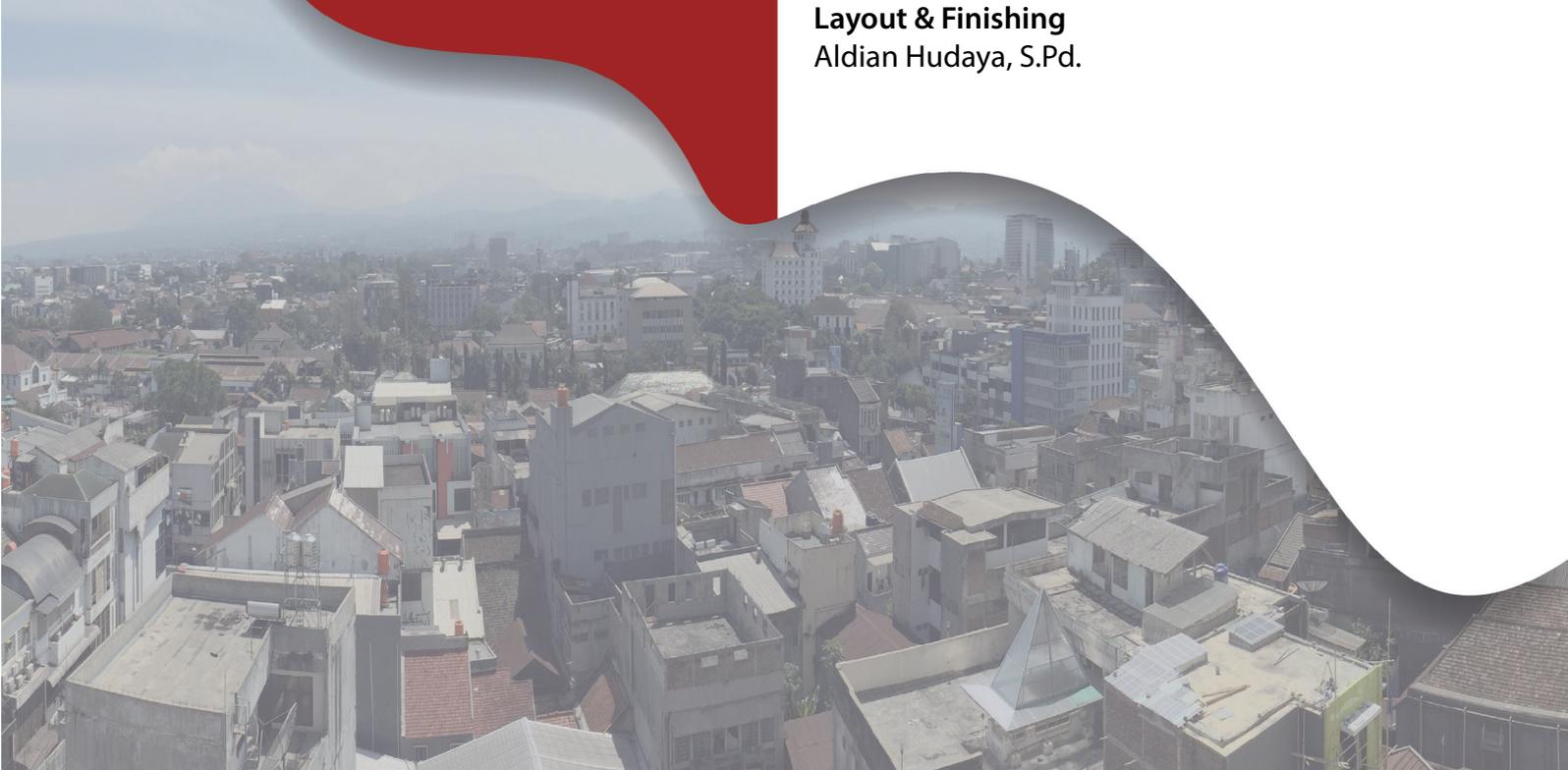
(Universitas Muhammadiyah Makassar)

Dr.scient.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si.

(Universitas Negeri Semarang)

Layout & Finishing

Aldian Hudaya, S.Pd.





ISSN 2685-483X

Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019



Daftar Isi

Hal.

Perlawanan Gerakan Guru Pasca Orde Baru di Indonesia: Studi Pada Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)	1-16
Afdhal, Rakhmat Hidayat	
Analisa penyebab hilangnya tradisi Rarangkén (Studi Fenomenologi pada Masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya)	17-26
Ira Siti Rohimah, Achmad Hufad, Wilodati	
Sesajen sebagai Nilai hidup bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung	27-35
Ujang Kusnadi Adam, Andreian Yusup, Salma Fauziyyah Fadhlullah, Siti Nurbayani	
Pemanfaatan Sungai Langkap sebagai Tempat Pembuangan Limbah Rumah Tangga di Kabupaten Purbalingga	36-46
Gita Saputri, Antari Ayuning Arsi	
Pembentukan Perilaku Kewirausahaan Tunanetra melalui <i>Come_Unity</i> Sahabat Mata di Kota Semarang	47-59
Asma Luthfi, Toyibah	
Peran Paguyuban Duta Wisata "Sekargading" dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Batang	60-70
Deby Prasetio Agung, Atika Wijaya	
Nilai Budaya dan Perubahan Karakteristik Sosial dalam Serikat Mahmejaan Masyarakat Taratara	71-81
Elpianus Paat, Grace J. Sopotan, Theodorus Pangalila, Ferdinand Kerebungu	



ISSN 2685-483X

Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019



Table of Contents

pp.

Resistance of the Teacher Movement after the Soeharto's Era in Indonesia: Study of the Indonesian Teachers Union Federation (FSGI)	1-16
Afdhal, Rakhmat Hidayat	
The analysis of the loss of Rarangkén tradition (a phenomenology study of the society of Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya)	17-26
Ira Siti Rohimah, Achmad Hufad, Wilodati	
The functionalism of Sesajen as a social life philosophy in Kampung Cipicung Girang	27-35
Ujang Kusnadi Adam, Andreian Yusup, Salma Fauziyyah Fadhlullah, Siti Nurbayani	
The Utilization of Langkap River as Household Waste Disposal in Kabupaten Purbalingga	36-46
Gita Saputri, Antari Ayuning Arsi	
Entrepreneurship of Blind People through the <i>Come_Unity</i> Sahabat Mata Community in Semarang	47-59
Asma Luthfi, Toyibah	
The Role of "Sekargading" Tourism Ambassador Association in Tourism Development of Kabupaten Batang	60-70
Deby Prasetio Agung, Atika Wijaya	
Cultural Values and The Change of Social Characteristics in the Serikat Mahmejaan of the Taratara Community	71-81
Elpianus Paat, Grace J. Soputan, Theodorus Pangalila, Ferdinand Kerebungu	



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Halaman 1-16



Perlawanan Gerakan Guru Pasca Orde Baru di Indonesia: Studi Pada Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Afdhal

Program Magister Sosiologi Universitas Indonesia

Rakhmat Hidayat

Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

Kata Kunci	Abstrak
Gerakan Sosial	<p>Penelitian ini berangkat dari fenomena menjamurnya gerakan guru pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Guru yang tergabung dalam serikat guru memperjuangkan kualitas pendidikan dan keadilan sosial dalam pendidikan. Salah satu serikat guru yang fokus terhadap misi tersebut adalah Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Tujuan dari penelitian ini ialah menjabarkan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh FSGI dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan mengombinasikan beberapa metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam, dan survey. Sementara itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh FSGI didorong dua hal, yaitu perubahan struktur peluang politik (political opportunity structure) secara eksternal dan proses reproduksi sumber daya gerakan (resource mobilization) secara internal. Perubahan struktur politik di Indonesia terlihat sejak munculnya kebebasan berorganisasi yang tertuang dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Adapun peran FSGI adalah mereproduksi sumber daya gerakan dengan sumber daya material dan jaringan yang kuat terhadap organisasi lainnya. Kedua hal inilah yang menggiring FSGI dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia.</p>
Gerakan Guru	
Kualitas Pendidikan	
Keadilan Sosial	
Diterima	9 Mei 2019
Review	23 Juni 2019
Revisi	25 Juni 2019
Penerimaan	25 Juni 2019
Copyedit	25-28 Juni 2019
Publikasi	30 Juni 2019



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Pages 1-16



Resistance of the Teacher Movement after the Soeharto's Era in Indonesia: Study of the Indonesian Teachers Union Federation (FSGI)

Afdhal

Program Magister Sosiologi Universitas Indonesia

Rakhmat Hidayat

Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

Keywords	Abstract
Social Movement Teacher Movement Quality of Education Social Justice	This research departs from the phenomenon of the teacher movements that is growing after the Orde Baru regime fall. Teachers who are members of teacher unions fight for the quality of education and social justice in education. One of the teacher unions that focused on the mission was the Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). The purpose of this study is to describe how the struggle carried out by FSGI in realizing quality and equitable education. This study uses a qualitative research approach by combining several methods of data collection, observation, in-depth interviews, and surveys. Meanwhile, the results of this study indicate that the movement carried out by FSGI was driven by two things, the political opportunity structure and the process of reproducing the movement of resources (resource mobilization). The changes of political structure in Indonesia have been seen since the emergence of freedom of organization as stated in UU No. 14 of 2005 concerning teachers and lecturers. The role of FSGI is to reproduce movement resources with material resources and a strong network of other organizations. These two things led FSGI to realize a quality and fair education in Indonesia.
Submission	9 Mei 2019
Review	23 Juni 2019
Revision	25 Juni 2019
Acceptance	25 Juni 2019
Copyediting	25-28 Juni 2019
Publication	30 Juni 2019

Acknowledgement

The authors state their deepest gratitude toward Mr. Ricardi S. Adnan for his constructive criticism as well as feedbacks that support this writing. In addition, the authors convey their gratitude to FSGI, Mr. Heru Purnomo, Mr. Satriwan Salim, Mr. Eka Ilham and Mr. Fahriza Tanjung for their readiness to express their view in studying the FSGI movement. In conclusion, the authors convey their greatitute to Mr. Haji Ubay as the newsperson focusing on education issues for his constructive feedbacks to this writing.

Ucapan Terima Kasih/Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap bapak Ricardi S Adnan yang telah banyak memkritisi penulisan dan sekaligus memberikan masukan-masukan yang membangun tulisan ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada FSGI, Pak Heru Purnomo, Pak Satriwan Salim, Pak Eka Ilham, dan Pak Fahriza Tanjung yang telah bersedia untuk dimintai dimintai keterangan dalam mengkaji gerakan FSGI tersebut. Selain itu terima kasih juga kepada Pak Haji Ubay sebagai wartawan yang fokus pada isu-isu pendidikan yang telah memberikan banyak masukan juga terhadap tulisan ini.

Pendahuluan

Terdapat beberapa pola dalam kajian gerakan guru, yang menyebabkan gerakan guru muncul dan berkembang. *Pertama*, militerisme dan Represivitas Pemerintah. Militerisme merupakan upaya pemerintah dalam menggunakan kekuatan militer dalam mencapai tujuan untuk menjamin keamanan dan pembangunan nasional. Bacevich & Andrew (2005) menyebutkan bahwa militerisme bukan hanya sekedar kehadiran lembaga perang, tetapi juga seperangkat nilai yang berakar pada kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat sipil.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa militerisasi dan represivitas pemerintah menjadi penyebab gerakan serikat guru muncul. Synott, (2001; 2002; 2002; 2007) membahas tentang bagaimana serikat guru yang terus menentang pemerintah dalam perjuangan mewujudkan demokratisasi pendidikan di Korea Selatan yang memiliki visi Pendidikan Sejati (*Truth Education*) di sekolah-sekolah Korea. Pendidikan Sejati maksudnya adalah sistem pendidikan yang bebas, terlepas dari tekanan pemerintah, dan melindungi hak-hak masyarakat pendidikan.

Di Meksiko, Lemus (2015) menjelaskan bahwa gerakan guru muncul terjadi karena tiga hal utama, yakni (1) liberalisasi pendidikan dengan mengubah konstitusi yang mengarah pada ekonomi pasar dan mempercepat privatisasi pendidikan, (2) otoritarianisme dan militerisasi yang dilakukan oleh pemerintah ketika adanya aksi protes terhadap kebijakan liberalisasi pendidikan, (3) tindakan lintas batas, munculnya solidaritas dari koalisi Trinasional yang berupaya menentang liberalisasi pendidikan.

Di Amerika Latin (Brazil, Bolivia, Chili, Venezuela, dan Guatemala), guru-guru yang tergabung dalam organisasi profesi melakukan gerakan sosial dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Guru ikut bergabung dan menyebarkan sistem-meningkatkan (*system-enhancing*) dalam konteks gerakan sosial masyarakat yang arahnya pada demokratisasi pendidikan dan hak adat (Finger & Gindin, 2015).

Kedua, kesenjangan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Kasus gerakan guru yang terjadi di Uganda ialah guru melakukan gerakan protes terhadap pemerintah lantaran guru yang dibayar secara tidak adil. Gaji yang diberikan kepada guru belum cukup untuk kesejahteraan guru (Namara & Kasaija, 2016). Tiga hal yang menjadi isu kolektif yang terjadi di Uganda adalah permasalahan gaji, perumahan, dan sistem keadilan sosial. Hal ini senada juga yang disampaikan Kaur (2012) bahwa ketidakadilan dalam dunia pendidikan dengan sendirinya akan menghadirkan gerakan guru untuk menuntut tercapainya suatu keadilan sosial.

Studi yang dilakukan oleh Lund (2001) di Kanada menunjukkan aktivisme guru terjadi tidak hanya karena isu keadilan sosial semata, tetapi isu ras, kelas, jenis kelamin, dan

orientasi seksual juga meningkatkan gerakan guru. Rottman (2013:81) menegaskan bahwa ketidakadilan sosial yang terjadi di dunia pendidikan dan terhadap guru sendiri akan meningkatkan representasi guru dan keterlibatan anggota serikat guru dalam melawan kapitalis, kebijakan neoliberal, demokratisasi prosedural, dan mewujudkan keadilan sosial. Senada pula dengan Picower (2012) yang menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam dunia pendidikan akan mengeksplorasi peran aktivisme guru. Permasalahan keadilan sosial menjadi basis sebuah gerakan seperti gerakan buruh yang terjadi di Afrika Selatan misalnya, yang dituntutnya adalah keadilan sosial (Matthews, 2015). Atau gerakan buruh yang terjadi di Brazil dan Filipina, keadilan sosial sebagai faktor dalam munculnya fenomena gerakan sosial (Scipes, 2014).

Begitu pula dengan gerakan guru, yang salah satu faktor dasar dari gerakannya adalah keadilan sosial. Namun ini juga tidak terlepas dari sejumlah kritik, ketika guru kesejahteraan guru telah hampir tercapai, profesionalitas guru masih belum terjamin. Artinya bahwa antara kesejahteraan dan profesionalitas harus seimbang. Guru tidak hanya cukup untuk menuntut kesejahteraan terhadap pemerintah, tetapi dilain pihak profesionalitasnya masih diragukan (Namara & Kasaija, 2016). Hal ini senada dengan Rizali, Sidi & Dharma (2009) bahwa dalam pendidikan, mutu guru sebagai kunci dalam pendidikan, ketimbang kurikulumnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mutu guru ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun organisasi guru.

Konsep Gerakan Sosial: Gerakan Sumber Daya dan Struktur Peluang Politik

Asumsi utama dari teori Gerakan Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*) adalah masalah dan ketegangan sosial sebagai suatu yang melekat dalam masyarakat. Oleh karena itu, gerakan sosial tergantung pada kekuatan dan kemampuan dalam memobilisasi sumber daya yang ada untuk merespons masalah sosial (Porta & Diani, 2006). Jenkins (1983) menyebutkan bahwa teori ini merupakan model pembentukan gerakan sosial yang banyak faktor lebih maju, menekankan sumber daya, peluang politik, di samping hipotesis ketidakpuasan terhadap teori tindakan kolektif. Dengan kata lain, teori ini hadir sebagai kritikan terhadap teori perilaku kolektif yang memosisikan gerakan sosial sebagai tindakan yang irasional. Sebaliknya, menurut teori gerakan sumber daya ini gerakan sosial justru sebagai tindakan yang rasional.

McCharty dan Zald (1977) mengatakan bahwa teori gerakan sumber daya ini memosisikan organisasi- organisasi gerakan memberikan struktur mobilisasi yang sangat krusial bagi aksi kolektif dalam bentuk apa pun. Lebih lanjut, menurutnya ketidakpuasan bukan berarti selalu mendorong terjadinya aksi kolektif, tetapi aksi kolektif ini sebagai cara dan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, teori ini dipengaruhi oleh pendekatan Olsonian yang menyatakan bahwa dalam sudut pandang rasional hanya ada sedikit alasan bagi individu untuk terlibat dalam aksi kolektif (Jenkins, 1983). Semakin besar kemungkinan perilaku untuk membuahkan hasil yang spesifik, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk melakukan perilaku atau aksi sosial tersebut. Tidak mengherankan jika teori ini menggunakan analisis untung-rugi (Klandermans, 2005).

Lebih lanjut lagi, Klandermans (2005) mengatakan bahwa organisasi sebagai roda penggerak dalam aksi sosial mempunyai fungsi yang strategis. Fungsi tersebut antara lain sebagai konstruksi dan rekonstruksi keyakinan kolektif, mentransformasikan ketidakpuasan ke dalam aksi kolektif, dan mempertahankan komitmen terhadap gerakan. Gerakan sosial muncul sebagai akibat bersatunya para aktor gerakan dalam cara yang rasional, mengikuti segala kepentingan mereka, dan adanya peran sentral organisasi serta para pemimpin yang "profesional" untuk memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Dengan kata lain, kekuatan gerakan ini terletak pada seberapa besarnya sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya material maupun sumber daya non-material. Sumber daya material mencakup usaha, uang, keuntungan konkret, dan jasa. Selain itu, sumber daya non-material mencakup otoritas, pertalian moral, kepercayaan dan persahabatan (Porta & Diani, 2006), termasuk juga partisipan dana, publikasi media, serta dukungan opini publik dan elite (Halcli, 2000).

Selanjutnya, teori struktur peluang politik hampir mirip dengan teori gerakan sumber daya, yakni sama-sama mengedepankan aspek rasionalitasnya. Namun, perbedaannya adalah teori ini tidak lagi terfokus pada kehidupan internal organisasi gerakan, tetapi memberikan perhatian yang lebih sistematis terhadap lingkungan politik dan institusi tempat gerakan tersebut berlangsung (Porta & Diani, 2006). Fokus utama dari teori ini adalah relasi antara pelaku institusi politik dan para aktor gerakan sosial. Maju dan mundurnya suatu gerakan sosial terletak pada peluang dan hambatan dalam sistem politik tertentu (Porta & Diani, 2006). Dimensi yang penting dalam teori ini adalah keterbukaan atau tertutupnya negara terhadap masukan dari aktor yang tidak mapan (*non-established actor*) dan kuat atau lemahnya kapasitas aktor politik atau negara dalam mengimplementasikan secara efektif kebijakan yang diputuskan (Kitschelt, 1986).

Senada dengan Tarrow (1998) yang mengatakan bahwa dimensi penting dalam peluang politik adalah (1) tingkat keterbukaan atau tertutupnya sistem politik yang terinstitusionalisasi; (2) stabilitas dan instabilitas elite politik yang luas, yang secara tipikal menyiapkan sebuah pemerintahan; (3) ada atau tidaknya pengelompokan elite; dan (4) kapasitas negara yang cenderung untuk menindas. Dengan kata lain, keberhasilan dari gerakan sosial ditentukan oleh struktur peluang dan hambatan dalam sistem politik yang lebih luas.

Secara sederhana, teori ini memandang lingkungan eksternal sangat mempengaruhi gerakan sosial. Ketika negara memberikan konfigurasi politik yang terbuka, maka elemen-elemen gerakan sosial akan memperoleh keleluasaan dalam mengembangkan dirinya. Sebaliknya ketika negara tertutup dan represif terhadap gerakan, maka gerakan sosial akan berjalan lambat. Namun tidak tertutup kemungkinan kondisi seperti ini akan melahirkan gerakan-gerakan tersembunyi, kekerasan yang brutal, pemberontakan, dan radikalisme. Kondisi seperti ini serupa dengan teori yang disampaikan oleh Peter Eisinger pada tahun 1973 yang melihat konteks kerusuhan sosial di kota-kota Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Di sana, ketika kota dengan sistem politiknya yang terbuka, kerusuhan cenderung lebih sedikit dengan struktur politiknya yang tertutup (Meyer, 2004).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode dalam penelitian. Studi ini berupaya mendeskripsikan tentang fenomena menjamurnya aktivisme guru pasca jatuhnya Orde Baru di Indonesia dengan kasus organisasi guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Studi ini juga akan menggali lebih dalam perkembangan dalam gerakan guru. Penelitian ini bersifat induktif, karena penelitian ini berupaya mengabstraksikan dan menemukan pola-pola umum dari data-data khusus. Studi ini termasuk dalam *case study research* karena terfokus pada pengumpulan data dengan hanya menggunakan satu atau dua unit analisis pada kasus-kasus tertentu. Secara khusus studi ini melihat kasus menjamurnya gerakan guru di Indonesia dengan studi kasus pada organisasi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Unit analisis studi ini terfokus pada gerakan guru yang diaktualkan oleh organisasi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Alasan utama peneliti dalam memilih organisasi ini adalah pertama, FSGI merupakan salah satu organisasi guru independen yang sangat aktif dalam melakukan gerakan sosial pada dunia pendidikan. Kedua, jaringan guru dan anggota dari FSGI ini telah tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Ketiga, argumentasi-argumentasi dari FSGI menjadi arus utama media massa terkait isu-isu pendidikan di Indonesia.

Pada studi ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, dan observasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan cara memperoleh data melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan. Peneliti dalam mewawancarai menggunakan instrumen atau pedoman penelitian. Tujuan menggunakan pedoman tersebut supaya data yang didapatkan tidak melenceng ke mana-mana, sehingga dapat menghemat waktu. Selain wawancara mendalam, observasi pun menjadi teknik yang akan peneliti lakukan dalam studi ini. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung bagaimana fenomena atau kasus yang diteliti. Observasi ini juga akan membantu peneliti

dalam mendeskripsikan lingkungan sosial dan lingkungan alam para informan.

Dalam mengolah data, Creswell (2002) menyebutkan ada beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh peneliti. Pertama, transkrip hasil wawancara. Pada transkrip ini yang hal yang penting dilakukan adalah menuliskan informasi secara yang didapatkan secara lisan menjadi tulisan menggunakan catatan lapangan (*field notes*) sebagai pelengkap dari data hasil transkrip. Kedua, membaca data dari hasil yang ditranskripsi secara keseluruhan dan memilah-milah data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ketiga, tahap yang akan peneliti lakukan adalah pengkodean (*coding*) dan pengkategorisasian terhadap data-data yang dinilai sesuai dengan penelitian. Setelah peneliti selesai melakukan pengkodean, maka terakhir yang akan peneliti lakukan adalah menganalisisnya dan kembali pada pertanyaan penelitian dan argumentasi penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

Sekilas tentang Organisasi Guru dan Sejarah Gerakan Guru di Indonesia

Sejarah gerakan guru di Indonesia mempunyai akar yang panjang. Gerakan ini tercatat dari sebelum kolonial Belanda masuk hingga hari ini. Sebelum kolonial Belanda menjajah Indonesia, koloni Portugis dan Inggris telah lebih dulu menjajah Indonesia. Penjajahan ini diiringi oleh penyebaran agama Kristen oleh misionaris- misionaris Portugis. Supriadi (2003) mengatakan bahwa orang-orang Portugis pertama kali mendirikan sekolah di Ambon pada tahun 1536. Pada era ini organisasi guru dan gerakan guru telah terbentuk. Arah gerakan guru adalah mengemban misi penyebaran agama Katolik Ordo Jesuit dan Dominika. Oleh karena itu, masa ini gerakan guru disebut sebagai gerakan Ordo Jesuit dan Dominika. Pada masa ini pula pendidikan agama Katolik sangat kuat sebagai basis pendidikan. Setelah Portugis berhasil dikalahkan oleh Inggris, pendidikan guru dan gerakan guru menjadi tidak terorganisir kembali. Pada masa kolonial Inggris, Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jendral Hindia Belanda yang memfokuskan penelitian tentang Jawa.

Gerakan guru yang lebih progresif muncul sejak pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini terjadi karena ditopang oleh pembentukan organisasi-organisasi guru yang memperjuangkan kesejahteraan untuk guru, terutama guru pribumi. Gaji guru pada masa itu dapat dikatakan besar, namun tetap saja adanya perbedaan yang mencolok antara gaji guru pribumi dengan gaji guru Eropa. Hal inilah yang mendorong Bumiputera untuk mendirikan organisasi guru yang bertujuan untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak guru. Dwidjosewojo adalah salah satu aktor penggerak yang mendirikan Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada akhir tahun 1911 (Sutamto, 1992).

Dalam perjalanannya, pada tahun 1919 PGHB pecah dengan bermunculan organisasi-organisasi guru berdasarkan latar belakang pendidikan, pangkat dan status yang berbeda. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi sosial politik yang semakin mempersulit guru untuk bersatu. Tidak berhenti sampai di sini, PGHB pada tahun 1930-an kemudian menggabungkan dirinya dengan Persatuan *Vakbonden* Pegawai Negeri (PVPN) sebagai usaha untuk terus memperjuangkan nasib para guru yang masih menjadi anggotanya. PVPN merupakan organisasi pegawai negeri yang terlepas dari pengaruh politik praktis dan partai-partai politik. Ia pun tidak mempunyai tujuan politik. Dengan bergabungnya PGHB dengan PVPN menjadikan organisasi ini lebih progresif. Seiring dengan diberlakukan peraturan baru tentang serikat pekerja pegawai negeri yang menyebabkan PGHB mengubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1933.

Setelah masa pendudukan Belanda di Indonesia, sejarah gerakan guru memasuki babak baru yakni masa pemerintah Jepang. Pada masa itu, pendidikan formal berkembang pesat. Pemerintah Jepang pun menerapkan kebijakan pendidikan dengan pendidikan untuk kebutuhan perang. Dibentuk pula sekolah guru sebagai persiapan guru untuk mengajar. Bagi Jepang sendiri, makna guru sangat penting dalam penjajahannya. Mereka

memosisikan guru sebagai orang yang sangat dihormati. Sang guru mendapat kehormatan dengan julukan Sensei. Maka tidak heran jika kedudukan guru masa Jepang lebih terpondasi secara jabatan ketimbang moral (Tilaar, 1998).

Lantas, bagaimana dengan organisasi guru pada masa Jepang jika guru telah mendapatkan kesejahteraan dan kehormatan secara moral? Apakah yang mereka perjuangkan? Memang pada kenyataannya pada pemerintahan Jepang gerakan guru dapat dikatakan kurang progresif. Ada beberapa alasan, pertama, pemerintah Jepang melarang segala bentuk pergerakan politik di Indonesia. Jika ada, pergerakan tersebut harus ditujukan pada usaha kemenangan perang Jepang. Kedua, alasan kesejahteraan sebagai basis perjuangan guru sejak masa kolonial Belanda telah tercapai pada masa Jepang. Seperti peneliti katakan sebelumnya bahwa kesejahteraan guru, baik secara ekonomi dan moral telah tercapai pada masa Jepang. Dua hal inilah yang menyebabkan gerakan guru dikatakan kurang progresif pada masa pendudukan Jepang.

Setelah masa penjajahan Jepang usai, lahirlah kemerdekaan yang menjadi modal utama dalam gerak guru untuk pendidikan Indonesia. Para guru menyadari bahwa semangat kemerdekaan ini menjadi dasar dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia dan menciptakan organisasi guru yang benar-benar bertujuan untuk kemaslahatan pendidikan. Tepatnya 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan, dengan semangat dan cita-cita yang sama dari para guru, maka diadakan kongres guru di Surakarta pada tanggal 24-25 November 1945. Kongres yang dipimpin oleh para tokoh pendidik, seperti Amin Singgih, Rh. Koesnan, dan kawan-kawan melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pada masa itu semua organisasi guru bersatu untuk melebur dalam wadah PGRI. Mereka sepakat untuk menciptakan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan memperkuat berdirinya Republik Indonesia (Supriadi, 2003).

Pada awal berdirinya PGRI, tiga hal yang menjadi semangat perjuangannya adalah mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, dan membela hak-hak guru. Akan tetapi, arah lanjutan perjuangan PGRI sedikit menyimpang ketika memasuki era pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini guru dijadikan sebagai komoditas politik kekuasaan. Pada masa ini dikatakan bahwa semua organisasi profesi bersandar pada kekuasaan supaya eksistensinya diakui dan mendapatkan legitimasi. Namun kenyataannya adalah oknum ini hanya mendapatkan legitimasi semu, artinya organisasi pengurus bukan berasal dari internal mereka sendiri. Misalnya PGRI ini diketuai bukan berasal dari kalangan guru, tetapi kalangan elit politik atau instansi pemerintah.

Pasca orde baru, ruang politik terbuka lebar bagi gerakan-gerakan alternatif di Indonesia, termasuk gerakan guru. Pada kalangan guru, loyalitas tunggal terhadap PGRI tidak terjadi lagi. Organisasi-organisasi guru bermunculan, seperti Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) yang berlangsung sejak tahun 1998. Di lain pihak, PGRI sendiri pun memperbaiki dan mereposisi dirinya kembali sebagai organisasi yang kritis terhadap pemerintah, tetapi tetap menyatakan sebagai partner kerja pemerintah. Pada prosesnya ini pula, pasca orde baru dengan munculnya UU Guru dan Dosen yang menyebabkan gerakan guru semakin masif dan terspesialisasi masing-masing. Hingga saat ini, telah tercatat lebih dari 100 organisasi guru yang berkembang setelah reformasi (Farisi, 2013). Tidak terkecuali, organisasi FSGI pun hadir karena konteks sosial politik yang sama.

Eksistensi FSGI sejak Berdiri hingga Sekarang

FSGI merupakan organisasi guru level nasional yang didirikan pada tanggal 23 Januari 2011. Pendirian organisasi ini bermula dari pertemuan organisasi-organisasi guru daerah di Hotel Bumi Wiyata Depok. Organisasi guru yang hadir dalam pertemuan ini adalah Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Serikat Guru Indonesia Medan (SeGI Medan), Serikat Guru Tangerang (SGT), Serikat Guru Kota Tangerang (SIGAT), Serikat Guru Serang (Sigat), Serikat Guru Serang (SGS), Serikat Guru Lebak (Segel), Forum Diskusi Guru Pandeglang (FDGP), Serikat Jawa Barat, Serikat Guru Madura, Serikat Guru Bima,

Serikat Guru Sulawesi Selatan dan Aliansi Perjuangan Guru Purwakarta (APG). Dari banyaknya organisasi guru daerah yang hadir, kemudian mereka sepakat untuk membuat sebuah organisasi guru yang anggotanya adalah organisasi-organisasi guru tingkat daerah. Kemudian diumumkan melalui konferensi pers di kantor ICW Kalibata mengenai berdirinya organisasi guru yang diberi nama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Organisasi-organisasi guru daerah yang hadir dalam rapat pembentukan FSGI karena mempunyai ide dan visi yang sama.

Mereka mempunyai visi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Bagi mereka, makna pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan ini. Kualitas pendidikan dengan ditopang oleh profesionalisme guru, kualitas sarana dan prasarana, kualitas pelayanan pendidikan, dan kualitas penganggaran. Begitu pula dengan keadilan dalam pendidikan, tidak ada diskriminasi dalam pendidikan, pembangunan pendidikan yang merata, adil dalam masalah kesejahteraan guru, dan adil terhadap siswa. Ketika kualitas dan keadilan dalam pendidikan itu tercapai, maka apa yang dicita-citakan dalam oleh pendidikan Indonesia akan terwujud.

Penggunaan kata Federasi dalam FSGI dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa organisasi ini tergabung dari beberapa organisasi lokal yang mempunyai otonomi sendiri. Keanggotaan Federasi ini bersifat serikat, artinya bukan secara individu atau perorangan, tetapi anggotanya berasal dari serikat-serikat guru yang ada di berbagai daerah. Individu yang ingin bergabung dengan FSGI, harus bergabung atau membuat organisasi serikat guru tingkat lokal yang berbadan hukum terlebih dahulu.

Organisasi guru lokal yang bergabung dengan FSGI memiliki hak otonom dalam menjalankan organisasi tersebut. Mereka tidak diatur oleh FSGI pusat dalam pelaksanaan baik sistem organisasi maupun program kerja atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hubungan dengan FSGI pusat hanya dalam bentuk diskusi yang dilakukan melalui *group chatting* media sosial dan pertemuan nasional yang diadakan satu tahun atau dua tahun sekali.

Organisasi guru daerah yang terdaftar sebagai anggota FSGI disebut 'SEGI' dengan Presidium sebagai pemimpinya. Terdapat keberagaman fokus yang terbentuk di dalam setiap segi yang tersebar di daerah-daerah ini. Sebagai contoh ialah SEGI Medan yang keberadaannya lebih fokus dalam hal melayani keluhan-keluhan guru setempat dan memberikan advokasi hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama guru. Hal ini berkaitan dengan latar belakang organisasi yang mendirikan Segi Medan. Menurut penuturan FT bahwa Segi Medan diinisiasikan tahun 2008 oleh LSM SAHDAR (Sentra Advokasi Hak Pendidikan Rakyat). Karena LSM ini aktivitasnya mengarah pada pendidikan dan advokasi terhadap siswa dan guru yang tidak mendapatkan keadilan dalam pendidikan, maka muncul inisiatif untuk mendirikan organisasi guru yang khusus bergerak atas nama guru. Dari latar inilah muncul SEGI Medan dan kemudian bergabung dengan FSGI di tahun pertama, bahkan terlibat dalam membentuk organisasi FSGI seperti yang dibicarakan sebelumnya. Lain pula yang menjadi fokus dari SEGI Bima, yang lebih kerap memfokuskan gerakannya pada upaya pemerataan pendidikan di wilayah timur, kualitas pendidikan dan kesejahteraan bagi guru di Kabupaten Bima. Salah satu upaya mereka dalam pemerataan pendidikan adalah mengadvokasi dan menekan pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana SD di Sarampi, Bima. Dikatakan SD ini seperti kadang hewan, karena fasilitas belajarnya jauh dari layak.

Dari kenyataan tersebut, dapat dilihat bahwa adanya otonomi setiap anggota organisasi FSGI. Pada satu sisi, sistem ini memberikan kebebasan terhadap organisasi-organisasi keanggotaan FSGI yang berdampak baik terhadap perkembangan organisasi. Di samping itu dengan sistem federasi ini juga tidak memberikan strata antar anggota yang memungkinkan munculnya proses egaliter dalam tubuh organisasi. Namun, sisi lain justru sistem ini memberikan dampak sebaliknya. Dengan adanya kebebasan dari organisasi pusat, maka organisasi daerah kurang berkembang karena tidak adanya supervisi dari organisasi pusat.

Perubahan Sosial Politik: dari UU Guru & Dosen hingga Gerakan Guru

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa perubahan struktur politik di Indonesia dari struktur politik yang represif – yang terjadi masa Orde Baru – menuju struktur politik yang terbuka – masa Reformasi – memberikan peluang gerakan sosial yang lebih progresif terhadap organisasi-organisasi sosial, termasuk organisasi guru. Gerakan Reformasi menjadikan struktur politik Indonesia menjadi lebih “demokrasi” ketimbang masa Orde Baru. Gerakan Reformasi ini kemudian diiringi dengan perubahan bentuk perundang-undangan menjadi lebih terbuka terhadap gerakan sosial, terutama terhadap gerakan guru. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan bentuk keterbukaan peluang politik di Indonesia. UU ini pula yang menjadi landasan bagi organisasi-organisasi guru yang lahir pasca Orde Baru. Alasan ini pula yang mendorong lahirnya organisasi FSGI.

Keterkaitan perubahan sosial politik di Indonesia dari sistem politik yang tertutup menjadi sistem politik yang terbuka sehingga memunculkan banyak organisasi progresif ini dapat dilihat dengan *political opportunity structure (POS)* atau struktur peluang politik (Eisinger, 1971). Dalam teori ini, gerakan sosial terjadi ketika adanya peluang dalam struktur politik. Lebih lanjut disebutkan Eisinger (1971) bahwa ada empat hal yang mendasari POS ini yaitu 1) *The nature of the chief executive*, 2) *The mode of aldermanic election*, 3) *The distribution of social skill and status*, dan 4) *The degree of social disintegration*. Poin satu (1) dan dua (2) pada mekanisme tersebut berkaitan dengan struktur, sedangkan poin (3) dan poin (4) berkaitan dengan agen. Keempat poin ini pada dasarnya membicarakan bagaimana keterkaitan antara struktur dan agen. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan di suatu negara diposisikan sebagai struktur dan organisasi gerakan sosial dapat dikatakan sebagai agen. Dengan kata lain, dalam tulisan ini pemerintah dikatakan sebagai struktur, sedangkan FSGI sebagai agen gerakan sosial.

Dalam banyak kasus isu tentang pendidikan, FSGI sebagai organisasi guru lebih banyak melakukan protes terhadap pemerintah. Mereka selalu memberikan kritik sekaligus menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dikritiknya. Dalam teori POS, kritik maupun protes yang diberikan oleh FSGI terhadap pemerintah merupakan fungsi dari peluang politik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Eisinger (1971) bahwa protes merupakan tahapan yang paling rendah sebelum terjadinya gerakan sosial. Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa ada dua mode fungsi peluang politik, yaitu mode linier dan mode kurvalinier. Dalam mode linier, protes ini dikatakan sebagai bentuk dari respons kefrustrasian (*frustrated response*). Artinya bahwa ketika peluang politik rendah, maka protes akan tinggi, dan sebaliknya ketika peluang politik tinggi maka protes akan menurun. Selain sisi lain, dalam mode kurvalinier, ketika peluang politik tersebut tinggi maka protes juga akan tinggi, sedangkan ketika peluang politik rendah maka protes juga akan rendah. Berdasarkan analisis Eisinger (1971) ini, kita dapat melihat bahwa mode struktur peluang politik di Indonesia adalah mode kurvalinier. Hal ini lantaran gerakan guru semakin progresif ketika adanya struktur politik di Indonesia memasuki era reformasi yang memberikan ruang untuk protes, sedangkan gerakan guru mundur ketika ruang protes tertutup pada pemerintahan Orde Baru.

Lebih lanjut Eisinger (1971) menyatakan bahwa ada empat variabel yang memungkinkan gerakan sosial tersebut muncul. *Pertama*, gerakan sosial muncul ketika akses terhadap lembaga-lembaga politik memiliki hubungan yang terbuka atau tertutup. Artinya bahwa pola hubungan yang terbuka akan membuka kesempatan bagi munculnya gerakan sosial, sedangkan pola hubungan yang tertutup akan menciptakan hambatan bagi gerakan sosial. *Kedua*, gerakan sosial bisa saja muncul ketika struktur politik sedang transisi. Artinya bahwa gerakan sosial akan muncul ketika keadaan struktur politik sedang tidak stabil, sedangkan struktur politik baru belum terbentuk. Keadaan ini akan memberikan peluang untuk terjadinya gerakan sosial. *Ketiga*, adanya konflik besar antar elit politik dan kesempatan ini digunakan oleh agen gerakan sosial sebagai peluang gerakan sosial.

Pola hubungan yang terbuka antara FSGI dengan pemerintah yang membuat gerakan FSGI semakin lancar. Pemerintah membuka pintu kritikan terhadapnya dengan sistem politik

yang demokratis, dan peluang ini digunakan sebaik-baiknya oleh FSGI. Salah satu contoh adanya keterbukaan pemerintah terhadap kritikan FSGI sebagaimana disampaikan oleh SS terkait permasalahan peningkatan kompetensi guru. FSGI mengkritik tentang pola pelatihan yang diberikan oleh pemerintah untuk peningkatan kompetensi guru. Menurut FSGI pola tersebut tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru. Untuk itu FSGI memberikan kritik sekaligus solusi yaitu dengan mengadakan program pelatihan guru dengan skema pelatihan 4B1E atau skema pelatihan berkualitas, bermanfaat, berkelanjutan, berbobot, dan evaluatif.

Pola hubungan yang terbuka antara FSGI dan pemerintah dikatakan McAdam & Snow (1997) sebagai hubungan yang konstituen, atau melayani satu sama lain. Pemerintah Indonesia dengan landasan konstitusi yang demokratis melayani FSGI, sedangkan FSGI melayani pemerintah dengan bentuk kritik dan saran sebagai upaya menciptakan demokratisasi yang utuh. Di sini, dengan adanya pola hubungan yang terbuka antara agen dengan struktur politik, maka kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan tindakan represif akan semakin berkurang.

Bentuk Gerakan FSGI: dari Advokasi hingga Mobilisasi Massa

Ada banyak bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh FSGI. Namun dalam studi ini akan dikelompokkan dalam empat bentuk gerakan sosial. Keempat bentuk tersebut antara lain memperjuangkan keadilan bagi guru melalui jalur hukum, membentuk opini publik dengan menggunakan media massa sebagai ujung tombak gerakan, pelatihan-pelatihan guru sebagai peningkatan profesionalisme, dan melakukan diskusi rutin untuk memobilisasi massa.

Para guru sering mencap FSGI seperti LSM karena perjuangannya lebih banyak mengadvokasi dan mewujudkan keadilan melalui jalur hukum. Hal ini juga tidak ditepis oleh salah seorang wartawan pendidikan, UB, yang mengatakan bahwa FSGI merupakan organisasi yang sangat kritis terhadap isu pendidikan, serta memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Ia sering meliput berita tentang FSGI yang melakukan advokasi.

Perjuangan tentang kesejahteraan guru juga tidak hanya terpusat di FSGI, tetapi juga merebak ke SEGI daerah-daerah. Misalnya SEGI Bima yang mengadvokasi kesejahteraan guru Honorer Daerah (HonDa). Menurut SEGI Bima, guru honorer daerah berdasarkan surat keputusan bupati Bima yang menyatakan gaji guru honor daerah adalah 300 ribu rupiah. Surat keputusan tersebut berlaku dari tahun 2005 hingga sekarang. Artinya, dari tahun 2005 sampai tahun 2019 belum ada perubahan terkait gaji guru honor daerah. Akan tetapi, kebutuhan hidup semakin meningkat, ditambah dengan naiknya inflasi secara nasional menyebabkan gaji guru honor tersebut jauh dari kata sejahtera.

Hampir senada juga dengan perjuangan SEGI Bima, SEGI Medan melakukan advokasi kepada pemerintah melalui lembaga bantuan hukum Medan. Tidak sampai di sini, SEGI Medan kemudian membuat kajian tentang besaran ideal gaji guru honorer. Berlandaskan format peraturan tenaga kerja, SEGI Medan menemui fakta di lapangan bahwa gaji guru honorer dibayar 10 ribu per jam. Jika si guru ini jadwal mengajarnya hanya 24 jam, maka total gajinya hanya berkisar 240 ribu sebulan. Dari temuan ini, SEGI Medan melakukan kajian untuk menuntut pemerintah terkait kesejahteraan guru. Merurutnya, gaji guru dapat dikatakan layak ketika guru mendapatkan gaji minimal dua kali lipat dari UMR. Rasionalnya adalah UMR diperuntukkan bagi buruh yang tamatan SMA ke bawah, sedangkan guru kualifikasinya sudah Sarjana. Kemudian beban kerja guru jauh lebih besar dibanding buruh.

Selain memperjuangkan kesejahteraan guru melalui jalur hukum, FSGI juga melakukan advokasi terhadap guru-guru yang tersangkut masalah hukum. Dalam advokasi masalah hukum ini FSGI sering menggandeng LBH Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Salah satu contoh kasus yang diselesaikan dan dimenangkan oleh FSGI adalah kasus pencopotan salah seorang kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan yang tidak berlandaskan

hukum apapun. Permasalahan ini kemudian diselesaikan melalui jalur hukum yang akhirnya dimenangkan oleh FSGI. Dalam proses advokasinya, FSGI menggunakan meja hijau dan meja coklat. Meja hijau melalui jalur hukum, sedangkan meja coklat melalui konferensi pers yang bertujuan untuk menguatkan argumen FSGI secara politis.

Media massa dalam gerakan sosial mempunyai peran penting dalam gerakan sosial yang salah satunya adalah sebagai alat propaganda. Media massa dikatakan sangat efektif dalam propaganda ide maupun gerakan. Lebih jauh lagi, media massa memiliki kekuatan dan memberikan pengaruh persuasif yang masif kepada publik. Hal ini senada dengan Curran & Gurevitch (2005) yang menyatakan bahwa media massa terbukti berpengaruh sebagai *brainwash* selama perang dunia berlangsung dan menjadi mesin efektif bagi penyebaran ideologi fasisme di Eropa selama masa perang. Di Indonesia sendiri, pada masa Soeharto media massa digunakan sebagai alat propaganda pemerintah. Ia dikendalikan oleh pemerintah untuk pencitraan pembangunan pemerintah yang gemilang. Faktanya, media massa masa itu tidak bersifat independen, netral dan objektif terhadap suatu berita (Winarni, 2014).

FSGI sebagai organisasi guru sangat menyadari betul akan fungsinya media massa. Bagi mereka, pemberitaan pers sangat efektif dalam menyampaikan ide dan gagasan. Bahkan FSGI menyadari bahwa tanpa media massa mereka tidak akan besar. Dengan tegas mereka menyatakan bahwa mereka sangat tergantung dengan media massa. Apa pun isu tentang pendidikan, mereka akan selalu menghubungi atau dihubungi oleh media massa. Mereka begitu dekat dengan media massa, dan media massa merupakan alat untuk menyosialisasikan hasil diskusi dan rapat internal FSGI. Lebih lanjut, HP mengatakan bahwa:

“...Jadi selama ini kami melakukan gerakan bersama dengan jaringan dan bersama dengan kekuatan media untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah ini dalam pelayanan pendidikan, dalam menciptakan demokrasi pendidikan, dalam menciptakan anggaran pendidikan, harus berkualitas...”

Menggandeng media massa dalam gerakan tidak hanya dilakukan oleh FSGI pusat saja, tetapi SEGI yang ada di daerah-daerah juga menggunakan media massa sebagai ujung tombak gerakan. Misalnya sebut saja SEGI Bima, yang menggunakan media massa sebagai ujung tombak gerakan. SEGI Bima sejak awal bergabungnya dengan FSGI menggunakan media massa untuk mengumumkan ke publik bahwa SEGI Bima bergabung dengan FSGI. EI mengatakan bahwa corak gerakan SEGI Bima dengan FSGI sama-sama menggunakan media massa untuk menyuarakan gerakan sosial yang mereka lakukan. Bagi mereka, media massa menopang segala bentuk gerakannya, dan merekam semua ide beserta gagasannya untuk disampaikan ke publik.

Selain advokasi dan menggunakan media massa, FSGI juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme guru sehingga kualitas pendidikan Indonesia akan meningkat. Di lain pihak, pemerintah telah berupaya meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% di tahun 2016 atau sekitar 444 triliun dari total APBN. Dengan anggaran yang sebesar ini, diharapkan kualitas pendidikan semakin baik. Namun faktanya anggaran yang besar tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan guru PNS. Maka tidak mengherankan jika rata-rata penghasilan guru PNS menjadi lebih meningkat. Namun hal ini menimbulkan masalah baru ketika kesejahteraan yang meningkat tidak diiringi oleh meningkatnya kualitas kompetensi guru akan menjadi masalah. Pada kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia jauh dari kata “memadai”. Hal ini lantaran hasil UKG guru dengan rata-rata nasional pada tahun 2015 berkisar 40-43, sedangkan pada tahun 2016 berkisar 63-70. Padahal angka ini masih di bawah standar yakni 75. Berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) dari United Nations Development Programme (UNDP) 2016, Indonesia hanya meraih angka 0,689 dan berada di peringkat ke-113 dari 188 negara.

Permasalahan kompetensi dan profesionalitas guru ini pun menjadi fokus gerakan dari FSGI. FSGI sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi anggotanya, tidak untuk guru pada umumnya. Hal ini karena FSGI telah dicap sebagai organisasi yang kerap menentang pemerintah. Pelatihan-pelatihan ini kerap mendapatkan

antipati dari dinas pendidikan dan mereka merasa berat dengan gerakan yang dilakukan oleh FSGI. Selain itu, metode pelatihan yang dilaksanakan oleh FSGI cukup berbeda dengan metode yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah memberikan pelatihan secara umum terhadap guru, maka FSGI mempunyai metode 4B1E (berkualitas, bermanfaat, berkelanjutan, berbobot, dan evaluatif). Pelatihan yang berkualitas maksudnya adalah isi dari pelatihan tersebut memberikan makna terhadap para guru. Saat datang ke pelatihan, guru mendapatkan apa yang mereka inginkan dan meningkatkan bagian kompetensi yang dirasa kurang. Metode pelatihan yang diberikan oleh FSGI selanjutnya adalah pelatihan yang berkelanjutan, maksudnya adalah pelatihan yang diberikan tidak hanya berhenti 3 hari atau seminggu, tetapi pelatihan ini dilakukan berkelanjutan dan ber-periodik. Ukuran bobot latihan tersebut bukan pada lamanya pelatihan, tetapi seberapa bermaknanya pelatihan tersebut terhadap guru. Ketika guru datang ke pelatihan, guru menyadari bahwa pelatihan tersebut merupakan yang dibutuhkannya.

Ada beberapa bentuk pelatihan yang telah dilaksanakan oleh FSGI. *Pertama*, pelatihan tentang pengelolaan keberagaman di sekolah. Bentuk pelatihan ini diarahkan kepada kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru. Untuk mengadakan pelatihan ini, FSGI bekerja sama dengan SETARA INSTITUTE dan Komnas HAM demi memberikan kebermanfaatan dan kebermaknaan pelatihan tersebut terhadap guru. *Kedua*, ada juga pelatihan tentang transparansi keuangan di sekolah dan transparansi dana pendidikan. Pelatihan ini difokuskan pada bagaimana pendidikan anti korupsi bisa berjalan baik di lingkungan sekolah. Korupsi telah menjadi musuh berbahaya bagi bangsa, bahkan kementerian pendidikan merupakan kementerian yang cukup banyak melakukan korupsi (Kompas.com, 2019). Oleh sebab itu, untuk mengadakan pelatihan ini FSGI bekerja sama dengan ICW untuk melakukan pelatihan tentang transparansi keuangan dan dana pendidikan di sekolah. *Ketiga*, pelatihan tentang pencegahan radikalisme di sekolah. Kegiatan pelatihan ini lebih difokuskan ke daerah-daerah yang menjadi satuan deradikalisasi. Ada beberapa daerah yang menjadi satuan deradikalisasi seperti DKI Jakarta, Kalimantan, dan NTB. Wilayah ini merupakan wilayah yang menjadi jejak-jejak teroris, sehingga deradikalisasi melalui pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Pelatihan ini dilakukan oleh FSGI dengan bekerja sama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Subjek yang dituju dalam pelatihan ini adalah kepala sekolah, karena dalam banyak temuan guru banyak yang terlibat untuk mendukung radikalisme. Keterlibatan tersebut biasanya melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Menurut HP, tidak hanya guru dan siswa yang mereka berikan pelatihan, tetapi kepala sekolah yang mempunyai fungsi meminimalisir deradikalisasi di sekolah.

Selain pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi sosial guru, juga ada pelatihan tentang kompetensi pedagogis guru. Pelatihan ini berbentuk pelatihan manajemen kelas. Pelatihan ini berbentuk cara-cara melakukan manajemen kelas yang ideal bagi seorang guru. Ketika kelasnya termanajemen dengan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Dengan lancarnya proses pembelajaran di kelas, maka transfer ilmu akan lebih mudah. Ilmu yang diberikan kepada siswa akan diserap dengan maksimal oleh siswa, dan tujuan pendidikan nasional akan mudah terwujud.

Ada beberapa strategi FSGI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota. *Pertama*, keanggotaan FSGI yang bersifat organisasi, yaitu serikat guru daerah yang telah terdaftar secara hukum. Sistem keanggotaan yang seperti ini akan meningkatkan kuantitas keanggotaan FSGI. Strategi yang kedua, dengan melakukan diskusi rutin pada setiap SEGI. Setiap SEGI di daerah selalu melakukan kajian rutin yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang isu-isu pendidikan yang sedang berkembang. Diskusi rutin ini digunakan sebagai ajang tukar pikiran antar anggota. Diskusi rutin ini juga berlaku bagi FSGI secara nasional. Ketika ada isu pendidikan, FSGI langsung mengadakan musyawarah nasional melalui media sosial, seperti grup *Whats App* dan *google drive*. Hal ini sebagaimana dikatakan HP bahwa:

“Penggunaan grup WA itu, google drive, untuk jarak jauh kami dalam membuat rilis, memudahkan kami dalam efisiensi waktu tidak memungkinkan kami harus bertemu untuk memutuskan sesuatu. Dunia maya ini sudah membantu untuk akses ini membuat kami melakukan gerakan semakin cepat.”

FSGI Sebagai Gerakan Sumber Daya

Dalam kerangka teoritis, gerakan sosial yang dilakukan oleh FSGI dapat dikatakan sebagai gerakan sumber daya (*resource mobilization*). Asumsi dari perspektif ini adalah ketidakpuasan bukanlah hal satu-satunya yang menyebabkan gerakan muncul, tetapi kemampuan agen gerakan sosial dalam memobilisasi sumber daya yang ada untuk merespons masalah sosial. Hal ini senada dengan McCharty & Zald (1977) yang mengatakan bahwa organisasi gerakan sosial memberikan struktur mobilisasi yang sangat krusial bagi aksi kolektif dalam bentuk apa pun. Artinya, bukan ketidakpuasan yang menjadi faktor utama gerakan sosial muncul, tetapi pengorganisasian untuk menciptakan sumber daya dan struktur mobilisasi sebagai bentuk aksi kolektif. Dengan kata lain, aksi kolektif ini sebagai cara atau sarana mencapai tujuan. Ketika asumsi dari teori gerakan sumber daya ini dikaitkan dengan FSGI, maka kita dapat melihat bahwa FSGI sebagai organisasi profesi yang digunakan sebagai sarana dalam pencapaian tujuan.

Dengan adanya kesamaan idealisme ini, maka para anggota FSGI menggunakan organisasi sebagai konstruksi dan rekonstruksi keyakinan-keyakinan kolektif, mentransformasikan ketidakpuasan dan isu-isu tentang pendidikan dalam bentuk aksi kolektif, dan mempertahankan komitmen terhadap gerakan. Menurut Klandermans (2005), gerakan sosial dalam sudut pandang gerakan sumber daya akan muncul sebagai konsekuensi dari bersatunya para aktor dalam cara yang rasional, mengikuti segala kepentingan mereka, dan adanya peran sentral organisasi untuk memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Lebih lanjut menurut Klandermans (2005), sumber daya dalam teori gerakan sumber daya ini terbagi menjadi dua yaitu sumber daya material dan non-material. *Pertama*, sebagai sumber daya material erat kaitannya dengan uang dan pendanaan dalam sebuah organisasi gerakan. Bagi FSGI sendiri, mereka mendapat sumber dana melalui beberapa cara, yaitu iuran anggota, proposal dari pemerintah, hibah dari institusi lain, dan lain-lain. Menurut penuturan SS bahwa FSGI juga memungut uang kas dari para anggota, donasi yang tidak berikat, serta mengajukan proposal kepada Kementerian untuk kegiatan pelatihan guru. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa segala bentuk dana yang diberikan kepada FSGI oleh institusi lain yang syaratnya hanya satu, yaitu hibah tersebut tidak berikat. Artinya, ke depannya FSGI tidak ada intervensi dari lembaga atau institusi lain. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh EI, bahwa SEGI Bima tidak mau diintervensi oleh lembaga pemerintah atau institusi lain. Berdasarkan hal ini, dapat kita simpulkan bahwa SEGI Bima tidak mau menerima bantuan dari institusi mana pun jika bantuan tersebut mengikat dan mengintervensi organisasi. Kemandirian organisasi dan loyalitas para anggota yang membuat gerakan ini semakin masif. Selain itu, SEGI Bima jika ingin bekerja sama dengan institusi lain, mereka ingin kerja sama dengan bantuan bukan berupa uang, misalnya buku dan sebagainya. Seperti yang dikatakan EI sebelumnya bahwa mereka bekerja sama dengan salah satu penerbit untuk pelatihan-pelatihan guru, dan yang didapatkan oleh gurunya berupa buku. Karena menurutnya, buku jauh lebih besar manfaatnya ketimbang memberikan uang.

Kedua, sebagai sumber daya non-material yang berkaitan dengan jaringan sosial atau modal sosial (*social capital*). Bekert (2009) menjelaskan bahwa ada tiga komponen yang saling berinterelasi untuk menciptakan perubahan dalam sebuah arena (*fields*) dalam kerangka konsep modal sosial. Ketiga komponen tersebut adalah institusi, jaringan sosial dan *cognitive frame*. Dalam kerangka ini, institusi diartikan sebagai aturan, norma, dan nilai yang mengikat setiap aktor dalam arena. Lain pula dengan jaringan sosial yang diartikan sebagai pasar tempat terjadi transaksi antar aktor. Di pasar inilah terdapat sumber daya, kekuasaan, pengaruh, dan bukan dominasi dari satu aktor. Kemudian *cognitive frame* diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh aktor dalam melakukan suatu yang ingin mereka capai dalam arena tersebut. *Cognitive frame* ini dapat berupa orientasi pada nilai yang ingin diperjuangkan, bisa itu berupa nilai ekonomi, nilai budaya, dan sebagainya.

Konsep Beckert ini sejalan dengan apa yang terjadi dengan jaringan sosial dalam FSGI. Pertama, komponen *institutions*. Di atas telah dijelaskan bahwa *institutions* berkaitan dengan aturan yang mengikat setiap aktor di dalamnya. Pada organisasi FSGI, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan yuridis berdirinya organisasi ini. Artinya bahwa antara FSGI, pemerintah, dan jaringan non-pemerintah akan terikat oleh aturan ini. Pemerintah tidak akan

mencekal organisasi dan akan bertindak sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan HP, bahwa pemerintah berperan sebagai partner strategis dari FSGI.

Komponen selanjutnya adalah jaringan sosial, yang di dalamnya terdapat sumber daya, kekuasaan, pengaruh, bahkan dominasi dari suatu aktor. Pada FSGI ini, sebaran jaringannya mencakup pada NGO, pemerintah, dan masyarakat sipil penggiat pendidikan humanis. Ada banyak NGO yang bekerja sama dengan FSGI, antara lain ICW, SETARA Institute, LBH Jakarta, media-media massa dan lain-lain. Sebaran jaringan ke pemerintah mencakup Komnas HAM, Dinas Pendidikan, dan kementerian pendidikan. Kemudian dari masyarakat sipil dan penggiat pendidikan, sebut saja Lodewijk F. Paat, Jimmy Paat, Bambang Wisudo dari Sekolah Tanpa Batas, dan Arif Faisal dari Lembaga Bantuan Hukum Sahdar Medan. Jaringan-jaringan yang dimiliki oleh FSGI mempunyai kontribusi yang berbeda-beda pula. Media massa berkontribusi lebih banyak pada pemberitaan ide-ide dan gagasan yang dimiliki oleh FSGI. Selain itu ICW dan Setara Institute berkontribusi lebih banyak pada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh FSGI. FSGI bekerja sama dengan LSM tersebut guna meningkatkan kompetensi sosial yang dimiliki guru. Di lain pihak, LBH berkontribusi dalam proses advokasi-advokasi guru dalam perjuangan dari sudut pandang hukum. Lain pula jaringannya dengan lembaga pemerintah.

Selain komponen institusi dan jaringan sosial, komponen *cognitive frame* juga mempunyai peran bagi FSGI. Menurut peneliti, bagi FSGI komponen inilah yang mempunyai peran besar dalam menciptakan jaringan sosial. Seperti yang dikatakan Beckert (2009), *cognitive frame* berkaitan dengan orientasi nilai yang diperjuangkan. Pada FSGI, orientasi nilai yang mereka perjuangkan mengarah pada orientasi sosial-budaya. Artinya, mereka memperjuangkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Simpulan

FSGI menjadi salah satu organisasi guru yang memperjuangkan dua isu utama dalam pendidikan Indonesia, yaitu memperjuangkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Struktur peluang politik yang terbuka di sini adalah kebebasan melakukan organisasi dan gerakan sosial yang telah terjamin oleh undang-undang dan konstitusi. Peluang ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor penggerak FSGI dengan sangat baik dalam mempertegas kekuatan hukum organisasi. Selain itu, para aktor gerakan tersebut merasa aman secara psikologis dalam melakukan gerakan karena telah memiliki payung hukum yang kuat. Sebaran jaringan yang luas mendukung FSGI dalam menjalankan setiap bentuk gerakan, mulai dari advokasi hukum hingga menyampaikan suara melalui media massa yang berskala nasional.

Daftar Pustaka

- Bacevich, & Andrew, J. (2005). *The New American Militarism*. USA: Oxford University Press.
- Beckert, J. (2009). How Do Fields Change? The interrelation of institutions, networks, and cognition in the dynamics of market. *Organization Studies*, 605-627.
- Coomer, M., Jackson, R., & Dagli, C. (2018). Engaging Teachers As Social Justice Actors. *Equity Dispatch*, 1-6.
- Creswell, J. (2002). *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed method approach; Second edition*. London: Sage Publication.
- Curran, J., & Gurevitch, M. (2005). *Mass Media and Society*. London: Sage Pub.
- Eisinger, P. (1971). Protest Behavior and the Integration Political System. *The Journal of Politics*, 980-1007.
- Farisi, M. (2013). Dinamika Organisasi Profesional Kependidikan Di Indonesia. *journal unnes*, 36-45.

- Finger, L., & Gindin, J. (2015). From proposal to policy: Social movements and teachers' unions in Latin America. *Springer*, 365-378.
- Halcli, A. (2000). Social Movements. Dalam G. Browning, *Understanding Contemporary Society: Theories of The Present* (hal. 50-72). New Delhi: Sage Publication.
- Henawanto, A. (2014). Persepsi Guru terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1-6.
- Hidayat, R. (2011). Dinamika Sosial Gerakan Guru di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, 355-362.
- Hsiao, H.-H. (2008). *Asian New Democracies: The Philippines, South Korea and Taiwan Compared*. Taipei, Taiwan: Taiwan Foundation for Democracy.
- Jenkins, J. (1983). Resource Mobilization Theory and The Study of Social Movements. *Annual Review of Sociology*, 527-553.
- Kaur, B. (2012). Equity and social justice in teaching and teacher education. *Teaching and Teacher Education*, 485-492.
- Kitschelt, H. (1986). Political opportunity structures and political protest: anti-nuclear movements in four democracies. *British Journal of Political Science*, 57-85.
- Klandermans, B. (1997). *The Social Psychology of Protest*. Oxford: Blackwell Publishers.
- _____. (2005). *Protest dalam Kajian Psikologi Sosial*. (H. Soetjpto, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Klandermans, P, & Stekelenburg, J. (2009). *Social movement theory: Past, present and prospect*. Amsterdam:
- Lemus, M. (2015 Vol. 42, No. 3/4 (142)). The Mexican Teachers' Movement: Thirty Years of Struggle for Union Democracy and the Defense of Public Education. *Social Justice*, 104-117.
- Lund, D. (2001). *Social Justice Pedagogy And Teacher-Student Activism: A Collaborative Study Of School- Based Projects*. Columbia: A Thesis The University Of British Columbia.
- Malaka, T. (2000). *Aksi Massa*. Jakarta: Teplok Press.
- Maran, R. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Matthews, S. (2015). Privilege, Solidarity and Social Justice Struggles in South Africa. *Progressive Journals*, 1-19.
- McAdam, D., & Snow, D. (1997). *Social Movements*. New Jersey: Roxbury Pub.
- McCarthy, J., & Zald, M. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *The American Journal of Sociology*, 1212-1241.
- Meyer, D. (2004). Protest and Political Opportunities. *Annual Review Sociology*, 125-145.
- Namara, R., & Kasaija, J. (2016). Teachers' Protest Movements and Prospects for Teachers Improved Welfare in Uganda. *Journal of Education and Training Studies*, 149-159.
- Picower, B. (2012). Teacher Activism: Enacting a Vision for Social Justice. *Equity & Excellence In Education*, 561-574.
- Porta, D., & Diani, M. (2006). *Social movements : an introduction*. Australia: Blackwell Publishing Ltd.
- Rizali, A., Sidi, I., & Dharma, S. (2009). *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional*. Jakarta: Grasindo.
- Rottmann, C. (2013). Social Justice Teacher Activism A Key to Union Vitality. *FALL Journals*, 73-81.

- Salim, S. (2013). *Guru Menggugat!*. Jakarta: Indie Publishing
- Scipes, K. (2014). Social Movement Unionism or Social Justice Unionism? Disentangling Theoretical Confusion within the Global Labor Movement. *Class, Race and Corporate Power*, Article 9.
- Supriadi, D. (2003). *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya Sejak Jaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Depdikbud.
- Sutamto, D. (1992). *Dwidjosewojo 1867-1943 Tokoh Pergerakan Nasional Pendiri Bumiputera 1912*. Jakarta: Bumiputera.
- Synott, J. (2001). Development, Education and the Teachers Union Movement in South Korea, 1989-1999. *Australian Journal of Politics and History*, 130-148.
- _____. (2002). *Teacher Unions, Social Movements and the Politics of Education in Asia: South Korea, Taiwan and the Philippines*. Ashgate, England: Routledge.
- _____. (2002). The Teachers' Movement Struggle for a Peace Model of Reunification Education in South Korea. *Social Alternatives*, 42-48.
- _____. (2007). The Korean Teachers and Educational Workers Union: Collective Rights as the Agency of Social Change. *International Electronic Journal for Leadership in Learning*, 13-24.
- Tarrow, S. (1998). *Power in movement: social movements and contentious politics-- 3rd ed.* New Delhi: Chicago University Press.
- Tilaar, H. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Grasindo.
- Toloudis, N. (2008). Instituteur Identities: Explaining the Nineteenth Century French Teachers' Movement. *Social Movement Studies*, 61-76.
- Wilson, C., & Johnson, L. (2015). Black Educational Activism for Community Empowerment: International Leadership Perspectives. *International Journal of Multicultural Education*, 102-120.
- Winarni, L. (2014). Media Massa dan Isu Radikalisme Islam. *Jurnal Komunikasi Massa*, 159-166.



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Halaman 17-26



Analisa penyebab hilangnya tradisi Rarangkén (Studi Fenomenologi pada Masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya)

Ira Siti Rohimah
Universitas Pendidikan Indonesia

Achmad Hufad
Universitas Pendidikan Indonesia

Wilodati
Universitas Pendidikan Indonesia

Kata Kunci	Abstrak
Tradisi Rarangkén Tradisi Rarangken Kearifan Lokal Modal Sosial	Artikel ini menjelaskan tentang hilangnya tradisi Rarangkén, faktor penyebab beserta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Tradisi Rarangkén yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti orientasi bersama, kekompakan, solidaritas, dan gotong royong telah menghilang keberadaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur. Menggunakan teori Ferdinand Tonnies mengenai Tipologi masyarakat dan perspektif perubahan sosial budaya (sosiokultural) Pitirim A. Sorokin, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan: 1) proses dan penyebab hilangnya tradisi Rarangkén, 2) nilai kearifan lokal tradisi Rarangkén, 3) Bentuk modal sosial tradisi Rarangkén, 4) dampak hilangnya tradisi Rarangkén bagi kehidupan masyarakat Kampung Cikantrieun.
Diterima	7 Mei 2019
Review	20 Mei 2019
Revisi	30 Mei 2019
Penerimaan	10 Juni 2019
Copyedit	25-28 Juni 2019
Publikasi	30 Juni 2019



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Pages 17-26



The analysis of the loss of Rarangkén tradition (a phenomenology study of the society of Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya)

Ira Siti Rohimah
Universitas Pendidikan Indonesia

Achmad Hufad
Universitas Pendidikan Indonesia

Wilodati
Universitas Pendidikan Indonesia

Keywords	Abstract
Rarangkén Tradition	This article to explain the loss of Rarangkén tradition the cause of and the consequences for community Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Rarangkén tradition containing the transcendent value, like a shared orientation, compactness, solidarity, and mutual cooperation of its existence has disappeared. This research used qualitative approach and phenomenology method, data collection through observation, in depth interviews, documentation study, and literature review. Using theory Ferdinand Tonnies community typology and perspective of social culture change Pitirim A. Sorokin. This study produced several conclusions: 1) processes and the loss Rarangkén tradition, the local wisdom Rarangkén tradition, a form of social capital Rarangkén tradition, the impact of the loss of their Rarangkén tradition for the community Cikantrieun.
Rarangkén Tradition	
Local Wisdom	
Social Capital	
Submission	7 Mei 2019
Review	20 Mei 2019
Revision	30 Mei 2019
Acceptance	10 Juni 2019
Copyediting	25-28 Juni 2019
Publication	30 Juni 2019

Pendahuluan

Tradisi yang kuat ialah tradisi yang mengakar di masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman banyak tradisi yang mulai ditinggalkan oleh pengikutnya atau oleh masyarakat. Salah satu tradisi yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat yaitu tradisi *Rarangkén* yang terdapat di kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Tradisi *Rarangkén* ini merupakan tradisi perkawinan melalui pewarisan leluhur secara turun temurun. Kampung Cikantrieun ini masih tergolong ke dalam wilayah pedesaan dan masyarakatnya pun masih tergolong masyarakat tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas sosial masyarakatnya masih menggunakan cara-cara yang sederhana.

W.S Renda menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi pergaulan bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan menjadi biadab. Hal yang paling pokok dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tertulis karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah (Johanes, 1994).

Mengingat kedudukan tradisi sangat penting dalam suatu masyarakat karena mampu memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat supranatural atau keagamaan (Hakim, 2003). Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan, kebudayaan dapat dilihat dari tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat. Tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia perlahan-lahan mulai ditinggalkan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mulai luntur. Banyaknya tradisi yang dilupakan bisa menyebabkan lunturnya budaya nasional Indonesia. nilai-nilai tradisi yang kini telah luntur di Indonesia seperti tradisi cium tangan orang tua, tradisi sopan santun, nilai tradisi berbagi, dan banyak lagi tradisi yang berkaitan dengan perayaan pernikahan yang sudah menghilang dari masyarakat. Banyak para remaja sekarang ini yang tidak suka dengan kebudayaannya sendiri, mereka lebih senang meniru kebudayaan lain, tentunya hal inilah yang menyebabkan menghilangnya suatu kebudayaan tertentu ialah karena ketidakmampuan remaja sebagai generasi penerus dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan Indonesia (Dwiecha, 2011).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan luntur atau punahnya suatu tradisi tertentu salah satunya ialah faktor perkembangan jaman yang menganggap bahwa tradisi tertentu sudah tidak relevan serta faktor agama yang memberikan pemahaman bahwa tradisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Seperti halnya tradisi Palang Pintu sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan masyarakat Betawi yang mengalami pergeseran dan perubahan (Al-Farisi, 2012). Suatu tradisi bisa punah dari kehidupan masyarakat dapat disebabkan oleh pengaruh budaya-budaya dari luar sehingga tidak tertarik lagi dengan tradisi dan kebudayaannya sendiri.

Selain itu, kemungkinan ada faktor lain yang bisa *menyebabkan luntur* atau punahnya suatu tradisi masyarakat, dalam hal ini tradisi *Rarangkén* di kalangan Masyarakat Kampung Cikantrieun, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan menggali informasi tentang faktor penyebab yang melatar belakangi lunturnya tradisi tersebut serta bagaimana kedudukan tradisi *Rarangkén* bagi masyarakat apakah memang masyarakat sudah menganggap tradisi tersebut tidak penting lagi sehingga dilupakan dan ditinggalkan dengan masih menyimpan sejumlah makna atau nilai yang terkandung di dalamnya. Apakah memang masyarakat tidak membutuhkan nilai tersebut dan dianggap tidak relevan sehingga mengalami pergeseran nilai bahkan mulai menghilang.

Mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini mampu membuat masyarakat saling memiliki rasa kekeluargaan, saling gotong royong, dan melahirkan modal-modal sosial yang menjadikan masyarakat *memiliki* solidaritas yang kuat. Apabila tradisi ini dianggap sudah tidak relevan oleh masyarakat yang menjadi kekhawatiran peneliti adalah masyarakat menanggapi perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan dan perkembangan zaman dengan cara melepaskan nilai-nilai tradisi yang ada sementara dalam menerima hal-hal baru masyarakat sendiri masih belum siap. Ketidaksiapan ini menimbulkan dampak bagi kondisi sosial masyarakat. Jika nilai suatu tradisi menghantarkan ke keadaan solidaritas yang kuat, mengapa harus dilepaskan. Cara masyarakat menanggapi perubahan sosial itu tentunya berbeda-

beda. Di sinilah peneliti mencoba menggali hal apa saja yang menyebabkan masyarakat meninggalkan tradisi ini serta memungkinkan atau tidaknya jika tradisi ini hidup kembali di tengah-tengah masyarakat.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomenologi. Partisipan penelitian ini adalah dua orang aparatur desa beserta ketua RT, dua orang sesepuh atau tokoh penggerak tradisi, dua orang masyarakat yang pernah menjalankan tradisi *Rarangkén* dan dua orang masyarakat yang tidak sempat menjalankan tradisi *Rarangkén*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Teknik dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi dari berbagai literatur, untuk menggali informasi seputar hilangnya tradisi *Rarangkén* pada Masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut.

Temuan dan Pembahasan

Tradisi *Rarangkén* Masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan sebagai hasil karya perilaku atau perbuatan manusia yang dilakukan *sejak* dulu dan masih berkembang pada masyarakat saat ini. Tradisi-tradisi yang diteruskan dan dilestarikan akan menjadi suatu kebudayaan. Tradisi dapat dipahami sebagai pengatur hubungan masyarakat, dan membuat masyarakat berpandangan bahwa lingkungan hidupnya bermakna. Tradisi ini penting dalam sebuah masyarakat untuk menguat identitas kolektif dan meningkatkan loyalitas masyarakat.

Tradisi *Rarangkén* sebagai salah satu tradisi yang khas dan menjadi ikon masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Tradisi *Rarangkén* merupakan tradisi pernikahan yang mencirikan masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat, solidaritas dan menjunjung tinggi nilai gotong royong sebagai tujuan dari diadakannya tradisi *Rarangkén*. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangkaian acara hajatan dari awal hingga selesai acara digelar. Tradisi *Rarangkén* melibatkan beberapa warga masyarakat untuk membantu acara hajatan dimulai dan diakhiri dengan acara syukuran dan selamatan. Apabila dilihat dari nama tradisi ini yaitu *Rarangkén* (dalam bahasa Sunda) yang artinya menyusun. Tradisi ini dilakukan dengan cara menyusun/menata (menghias) sejumlah tumbuhan maupun benda/barang di rumah yang melakukan hajatan oleh warga sekitar kampung. Tradisi *Rarangkén* tidak hanya ada di Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut, tradisi ini dijalankan pula oleh sebagian warga Tasikmalaya tepatnya di daerah Cipatujah yang dinamakan dengan tradisi *Rarangkén Paré* (padi) (Gumilar dkk., 2016). Akan tetapi, pelaksanaan tradisi ini cukup berbeda jika di Kampung Cikantrieun dilakukan pada saat setelah acara pernikahan tidak hanya *Paré* (padi) yang disusun berbagai jenis tumbuhan termasuk benda-benda seperti peralatan rumah tangga bahkan makanan yang dijadikan jamuan atau hiasan di rumah warga yang melakukan hajatan.

Dalam menggelar acara pernikahan biasanya orang sunda melakukan sejumlah tradisi-tradisi tertentu disesuaikan dengan adat Sunda yang dilakukan baik sebelum, pada saat dan sesudah acara pernikahan di gelar. Tradisi *Rarangkén* sebagai tradisi lokal yang dimiliki masyarakat Kampung Cikantrieun termasuk dalam tradisi yang dilaksanakan dari awal hingga selesai atau beberapa hari setelah hari pernikahan sebagai bentuk puncaknya melalui kegiatan syukuran dan slametan pasca pengantin telah melaksanakan akad (Kusmayadi, 2018).

Prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat dalam tradisi *Rarangkén* ini yaitu prinsip "*sakanyeuiri sakapeurih*" saling *babantos tapi lain ukur dina mamanis tapi dina papait oge*" yang berarti memiliki prinsip saling meraba derita, saling membantu bukan dalam hal yang bahagia saja tapi dalam hal berduka juga. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menciptakan ikatan

sosial yang kuat dan menjalin kekompakan dalam rangka membantu sesama manusia. Suatu tradisi yang dijalankan suatu masyarakat tidak mata-mata ada dan hadir di tengah masyarakat apabila tidak ada tujuan dan fungsi dari tradisi itu sendiri (Sztompka, 2007).

Tradisi *Rarangkén* hadir pada masyarakat sebagai bentuk pewarisan dari para leluhur masyarakat Kampung Cikantrieun. *Penggerak* awal tradisi ini pun tidak diketahui namanya hanya saja diwariskan secara turun-temurun hingga sampai kepada Bapak Amin (72 tahun) sebagai sesepuh dan tokoh *penggerak* tradisi *Rarangkén*. Sebagaimana disampaikan oleh Sztompka (2007) tradisi hadir dalam suatu masyarakat melalui dua cara:

1. Pertama, kemunculan secara spontan dan mempengaruhi masyarakat banyak. Kemudian para individu menanamkan warisan historis dan kekaguman kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Dari kagum tersebut berubah menjadi sebuah perilaku dalam berbagai bentuk seperti, ritual, upacara adat dan sebagainya.
2. Kedua, tradisi ada dalam masyarakat melalui mekanisme yang bersifat memaksa (adanya paksaan), sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa.

Kedua poin di atas merupakan cara-cara hadirnya suatu tradisi dalam masyarakat. Begitu pun yang terjadi dalam *tradisi Rarangkén*, karena pencetus/*penggerak* pertama tidak diketahui maka kedua cara tersebutlah yang menjadikan tradisi *Rarangkén* ada dalam masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut.

Nilai Kearifan Lokal Tradisi *Rarangkén*

Tradisi *Rarangkén* bukanlah sekedar acara syukuran dan selamatan saja melainkan tradisi yang khas yang sarat dengan nilai-nilai filosofis kehidupan dan simbolis memiliki nilai dan makna tertentu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Seperti halnya benda atau tumbuhan yang dijadikan hiasan di rumah warga yang melakukan hajatan dijadikan simbol yang bermakna bahwa dalam menjalankan kehidupan kita harus memfungsikan tumbuhan dan perabotan tersebut melalui pengetahuan yang dimiliki juga dijadikan simbol bahwa mempelai wanita harus memiliki keterampilan menjadi ibu rumah tangga dan memfungsikan perabot rumah tangga tersebut serta simbol dari tumbuhan yang berarti bahwa seorang perempuan yang telah sah menjadi istri harus belajar agar memiliki kemampuan dalam kegiatan pertanian seperti dalam sistem persawahan mulai dari *tandur*, *ngarambet*, dan memanen padi. Selain itu tradisi ini memiliki nilai yang mengajarkan bahwa pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad akan menjalankan kehidupan baru agar senantiasa memelihara hubungan rumah tangga dan saling menjaga dengan prinsip "*silih asah silih asih silih asuh*" sehingga menjadi keluarga yang diharapkan yaitu *sakinah mawadah dan Warahmah*.

Nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *Rarangkén* dipercaya oleh masyarakat dapat mewujudkan semua dambaan keluarga yang bahagia dan mampu menjalani segala hiruk-pikuk kehidupan selama berumah tangga. Nilai-nilai dalam tradisi tersebut dianggap baik dan positif sehingga dijadikan pedoman dan dipraktikkan dalam kehidupan. Sebagaimana makna dari kearifan lokal itu sendiri diartikan sebagai suatu pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat yang berfungsi dan bermakna dalam masyarakat tidak hanya pelestarian sumber daya alam tetapi juga pelestarian sumber daya manusia, pemertahanan tradisi, adat dan budaya, serta memiliki manfaat untuk kehidupan masyarakat (Permana, Nasution & Gunawijaya, 2011).

Nilai kearifan lokal yang dipandang sebagai suatu kebenaran yang sudah mentradisi atau ajek dalam suatu masyarakat lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, *dikembangkan*, serta dilestarikan. Ditinjau dari dimensi nilai kearifan lokal tradisi *Rarangkén* ini termasuk ke dalam dimensi solidaritas kelompok lokal yakni lebih menitikberatkan pada kesadaran masyarakat sebagai makhluk sosial dalam melakukan suatu pekerjaannya perlu untuk membantu secara suka rela melalui gotong royong. Dimensi solidaritas kelompok menurut Mitchell (2003) adalah Dimensi solidaritas kelompok lokal sebagai bagian dari dimensi nilai kearifan lokal dimaknai bahwa Manusia adalah makhluk

sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong-royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

Nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *Rarangkén* ini lebih mengembangkan aspek kehidupan sosial budaya ketimbang ekologi. Dimana dengan tradisi ini mampu menjaga kehidupan yang harmonis bercirikan masyarakat yang memiliki solidaritas yang kuat dan nilai gotong royong yang tinggi dalam rangka syukuran dan selamatan *acara* pernikahan. Nilai kearifan lokal yang dipandang sebagai suatu kebenaran yang sudah mentradisi atau ajek dalam suatu masyarakat lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan.

Modal Sosial Tradisi *Rarangkén*

Solidaritas dan gotong royong yang tercipta dengan adanya tradisi *Rarangkén* sebagai sisi manfaat dari tradisi *Rarangkén*. Manfaat tersebut berimplikasi pada tradisi lain bahkan pada program-program pembangunan dan pemberdayaan. Dimana masyarakat merasakan mengerjakan suatu hal dengan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, kekompakan sehingga ikatan sosial yang terjalin antar warga masyarakat sangat kuat. Hal ini dapat dikatakan sebagai modal sosial yang dimiliki masyarakat Kampung Cikantrieun. Modal sosial merupakan suatu hubungan-hubungan yang tercipta dalam masyarakat beserta serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang di wujudkan dalam perilaku yang mendorong kemampuan untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam rangka merekatkan hubungan sosial masyarakat (Cahyono, 2014). Bentuk modal sosial yang terkandung dalam tradisi *Rarangkén* yaitu sebagai perekat sosial dalam masyarakat disebut dengan istilah *social bounding* (perekat sosial) ialah tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. *Social bounding* umumnya dalam bentuk nilai, kultur, persepsi, dan tradisi atau adat-istiadat (Woolcock, 2001).

Kondisi yang seperti ini sesungguhnya adalah “modal” bagi masyarakat desa dalam melakukan pembangunan desa atau menyelesaikan masalah yang dialami oleh mereka. Melalui tradisi *Rarangkén* bisa terbangun sebuah mekanisme bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami secara bersama-sama sehingga segala sesuatunya bisa lebih ringan dan mudah untuk diselesaikan.

Proses dan Penyebab Hilangnya Tradisi *Rarangkén*

Tradisi *Rarangkén* sebagai tradisi lokal masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya semenjak tahun 2013. Hal tersebut dibenarkan oleh sesepuh atau tokoh penggerak tradisi yaitu Bapak Amin (78 Tahun) dan Bapak Ade (48 Tahun). Pada awalnya masyarakat masih giat melaksanakan tradisi ini di setiap warga yang melakukan hajatan pernikahan dan dilakukan secara sukarela. Sejak mulai berdirinya beberapa sekolah Islam dan terdapatnya pesantren yang cukup terkenal dengan letaknya yang dekat dengan Kampung Cikantrieun. Kemudian banyak pemuda pemudi yang mondok di pesantren tersebut. Selain itu, masyarakat Desa Wangunjaya mayoritas *adalah* petani dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik mereka untuk di tanami atau dijadikan ladang, sawah dan kebun.

Namun dalam perkembangannya, kondisi itu mengalami perubahan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya ialah banyaknya masyarakat yang *melakukan* urbanisasi. Mereka memilih menjadi pedagang atau buruh di kota. Selain urban, jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi pun bertambah. Sehingga sesepuh/tokoh adat merasa kesulitan untuk mengumpulkan warga dalam melaksanakan tradisi *Rarangkén*. Seiring berjalannya waktu dan jaman, tradisi *Rarangkén* sekarang jarang sekali dijumpai di masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya bahkan bukan hanya tradisi *Rarangkén* saja, banyak tradisi-tradisi lain yang turut menghilang keberadaannya. Sehingga belakangan ini Desa Wangunjaya termasuk salah satu desa di Kecamatan Banjarwangi yang tidak memiliki adat atau tradisi yang khas dan unik lagi (wawancara dengan Sekretaris Desa Wangunjaya).

Masyarakat Kampung Cikantrieun sekarang tidak lagi guyub rukun *seperti* dulu lagi. Mereka yang dulunya kompak, guyub rukun, menjunjung kebersamaan sekarang menjadi masyarakat yang individualis, mereka memikirkan kepentingan masing-masing, semua diukur dengan uang mereka lebih materialis. Rasa solidaritas mereka sekarang seakan sirna. Tokoh masyarakat/sesepuh baik kepala desa, dan ketua RT merasa sulit menggerakkan kembali warganya untuk kerja bakti dalam pelaksanaan program desa. Tidak ada lagi rasa kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program yang digalakkan tersebut.

Fakta lain yang mempengaruhi hilangnya tradisi *Rarangkén* ialah karena terbukanya mindset masyarakat terhadap hal-hal baru. Pemuda yang memilih bekerja di kota sekembalinya ke kampung mereka seolah melupakan dan mengabaikan tradisi yang ada di masyarakat. Pola pikir dan kebiasaan sudah terpengaruhi oleh budaya di kota begitu pun sifat individualis yang mereka miliki. Ketika mereka sedang berada di kampung pun mereka mau diajak kerja sama dengan syarat ada upahnya. Keterikatan dan keeratan antar warga menjadi hilang, dan lambat laun berdampak terhadap tradisi-tradisi salah satu yang disoroti ialah tradisi pernikahan *Rarangkén* yang sebelumnya telah mentradisi dan melegenda di Kampung Cikantrieun.

Perubahan sosial dan budaya pada masyarakat Cikantrieun saat ini menurut sosiologi bisa dikatakan sebagai perubahan melingkar, yang berarti bahwa perubahan tidak selalu tentang pergerakan ke arah kemajuan, kemunduran, penambahan, dan pengurangan saja, lenyapnya suatu hal dalam kehidupan termasuk juga perubahan. Sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada kemudian suatu saat bisa muncul lagi dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak dari adanya perubahan sosial. Hilangnya tradisi *Rarangkén* pada masyarakat Kampung Cikantrieun adalah suatu fenomena perubahan sosiokultural yang dipelopori oleh Pitirim A. Sorokin yakni, Peradaban mempunyai logika perkembangannya sendiri. Setiap peradaban melalui urutan perkembangannya sendiri dan tidak satu pun yang dapat dianggap terbaik atau paling sempurna. Setiap peradaban muncul mengembangkan bentuk morfologi dan nilai-nilainya sendiri yang memperkaya perbendaharaan prestasi kultural manusia dan kemudian lenyap tanpa dilanjutkan oleh peradaban lain dalam bentuknya yang unik dan mendasar (Sorokin, 1966). Sorokin sebagai pengagas teori perubahan sosiokultural lebih menekankan pada kultur atau kebudayaan dalam *suatu* masyarakat dari awal mula kultur muncul sampai terbentuk kultur yang baru yang berbeda bentuk dan nilainya kemudian mengalami perubahan secara melingkar. Sosiokultural menurut Sorokin merupakan lingkaran variasi antara ketiga super sistem ialah sistem ideasional, sistem inderawi, dan sistem campuran. Setiap sistem atau super sistem (kultur) selalu mengalami pertumbuhan dan kemunduran tergantung bagaimana kekuatan integrasi antar sistem atau di dalam sistem itu sendiri (Lauer, 1993). Adapun ketiga super sistem perubahan sosiokultural Sorokin yang terus berputar tanpa akhir di antaranya sebagai berikut (Lauer, 1993):

1. sistem ideasional, yaitu sistem kultural yang menekankan pada aspek spiritual dan non material serta bergantung pada alam *transenden*.
2. sistem inderawi, yaitu sistem kultural yang menekankan pada aspek material dan kesenangan lahiriah. cara berpikir dengan segala sesuatunya diukur oleh materi.
3. sistem campuran, yaitu sistem yang menyeimbangkan antara kedua sistem ideasional dengan sistem inderawi.

Teori Sorokin penekanannya pada pemahaman antar hubungan fenomena sosial yang mengalami perubahan. Sebagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat Kampung Cikantrieun dimana masyarakat yang awal mulanya menjalankan tradisi *Rarangkén* dan memegang teguh nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kekompakan, saling bekerja sama dengan tanggung jawab secara sukarela atas dasar kepentingan bersama. Sekarang ini masyarakat lebih berpikir ke arah yang berorientasi ekonomi, individualis dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal ini menandakan perubahan sosiokultural pada masyarakat Kampung Cikantrieun dari yang tadinya sistem ideasional berubah menjadi sistem inderawi. Sistem inderawi dapat dibuktikan dengan kondisi masyarakat setelah menghilangnya keberadaan tradisi *Rarangkén*, masyarakat yang mulanya menjaga kebersamaan dan gotong

royong, saat ini dalam menjalankan pekerjaan termasuk acara hajatan mereka lebih mengukur segala sesuatunya dengan materi, mereka bersedia membantu pekerjaan asal ada upah atau sifatnya dibayar. Artinya, orientasi masyarakat telah bergeser dari yang tadinya orientasi bersama menjadi orientasi ekonomi. Jiwa-jiwa kultural ideasional telah hilang dalam benak masyarakat dan menuju kepada jiwa kultural inderawi. Ketika salah satu super sistem hilang eksistensinya dalam masyarakat maka akan muncul kultural baru atau nilai baru. Demikianlah teori melingkar mengenai perubahan sosiokultural.

Selain itu, Pitirim A. Sorokin juga mengemukakan faktor-faktor yang *menyebabkan* perubahan sosiokultural terjadi dalam masyarakat, yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor perubahan abadi. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya tradisi *Rarangkén*:

1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari masyarakat sendiri dalam hal ini masyarakat Kampung Cikantrieun sebagai pelaku tradisi *Rarangkén*. berikut ini faktor penyebab hilangnya tradisi *Rarangkén* yang berkaitan dengan faktor internal:
 - a. Kesadaran masyarakat, dalam hal pelaksanaan tradisi *Rarangkén* masyarakat merupakan subjek atau pelaku dari tradisi tersebut, tanpa adanya masyarakat maka tradisi ini tidak hidup. faktor kesadaran masyarakat akan orientasi kebersamaan dan prinsip yang selama ini dipegang teguh (*sakanyeuri sakapeurih*) telah hilang dalam diri masyarakat. Masyarakat mengabaikan tradisi *Rarangkén*, sehingga lebih mementingkan kepentingan diri sendiri seolah-olah masyarakat tidak peduli tentang tradisi yang bisa menguatkan ikatan sosial yang ada.
 - b. Pola pikir dan *mindset* masyarakat sudah mengarah ke arah keterbukaan oleh sebab perkembangan pendidikan dan tingginya tingkat urban sehingga sikap, cara, atau tingkah laku sedikit banyaknya terpengaruh oleh budaya kota sehingga mulai abai dan menginginkan hal yang instan serta mengukur segala sesuatunya dengan materi, bukan atas dasar tanggung jawab secara suka rela atau sekedar bantu-membantu.
2. Faktor eksternal, ialah faktor yang berasal dari luar. Dalam hal ini yang menjadi faktor eksternal ialah karena perubahan sosial dan ekonomi akibat dari adanya pembangunan di bidang pendidikan sehingga berpengaruh kepada pekerjaan masyarakat. Masyarakat yang melakukan urban memiliki wawasan dan pengetahuan serta terpengaruh oleh budaya kota yang lambat laun akan menyebar ke desa sehingga dengan penyebaran ini menjadikan masyarakat lebih tertarik kepada budaya luar yang dianggap cukup mengikuti perkembangan zaman. Masuknya budaya luar melalui berbagai cara yang di dukung oleh keterbukaan dan kemajuan masyarakat dalam menggunakan teknologi khususnya gadget atau *smartphone*. Selanjutnya, adanya perkembangan pendidikan Islam di sekitar kampung ini lambat laun berkembang pula ajaran Islam sehingga anggapan dan pandangan masyarakat berubah terhadap tradisi yang ada. Dari sinilah mereka mulai mengikuti perkembangan dengan meninggalkan nilai-nilai tradisional dan sifat-sifat kedesaan yang menyebabkan melemahnya identitas masyarakat Kampung Cikantrieun.
3. Faktor perubahan abadi, ialah faktor yang menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan adalah hal biasa, wajar, dan normal. Tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Perubahan yang terjadi bukan untuk dipersoalkan tetapi kita bisa menggali dan mengkaji alasan sesuatu itu berubah dan pendorong perubahan ke arah tersebut. Dapat kita ketahui bahwa menghilangnya tradisi *Rarangkén* sebagai dampak dari perubahan sosial ekonomi. Perubahan tersebut adalah pasti terjadi dan akan abadi. Hal ini di dukung oleh Sorokin dalam tulisannya yang menyatakan kalimat berikut (Lauer, 1993):

“Setiap sistem sosiokultural tertentu jelas akan mengalami perubahan berkat aktivitasnya sendiri. Setiap sistem yang hidup dan aktif, selalu berubah. Perubahan adalah abadi. Faktor eksternal memang mempengaruhi, tetapi faktor internal menyediakan dorongan utama perubahan, dan setiap perubahan ter-

tentu mungkin dimulai melalui perantara komponen: makna, wahana, agen pelaksana”.

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen penting dalam suatu perubahan tradisi ditentukan oleh komponen makna yakni sejauh mana masyarakat memaknai tradisi tersebut sehingga nantinya berimplikasi pada kesadaran menjaga tradisi *Rarangkén*, makna wahana atau wilayah seberapa luas wilayah yang masih bisa mempertahankan suatu kultur atau tradisi tertentu hal ini berkaitan dengan ruang lingkup pengikut tradisi *Rarangkén*, dan pelaksana hal ini juga berkaitan dengan masyarakat sebagai pelaku/pelaksana serta tokoh masyarakat atau sesepuh yang turut menggerakkan tradisi *Rarangkén*.

Dampak Hilangnya Tradisi *Rarangkén*

Hilangnya tradisi *Rarangkén* menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat Kampung Cikantrieun. Berikut mengenai dampak akibat tradisi *Rarangkén* menghilang:

- a. Hubungan antar warga masyarakat menjadi tidak kuat, karena tradisi *Rarangkén* sebagai perekat sosial dan penguat ikatan sosial pada masyarakat
- b. Lemahnya identitas masyarakat, telah kita ketahui bahwa tradisi *Rarangkén* menjadi ikon masyarakat sebagai suatu tradisi lokal yang khas di miliki masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya. Dengan hilangnya tradisi ini bahkan tradisi lainnya maka identitas melemah dan masyarakat menjadi tidak memiliki ikonik atau ciri khas.
- c. Kekompakan, kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong yang hilang dan melekat ke dalam tradisi ini menimbulkan kemalasan sosial bagi masyarakat dalam menjalankan suatu program yang di adakan baik oleh tokoh masyarakat maupun aparat desa.
- d. Beban masyarakat menjadi terasa berat oleh karena dulunya jika ada suatu pekerjaan tertentu dikerjakan secara bersama-sama saling membantu secara suka rela, kini harus dikerjakan masing-masing.

Tanggapan masyarakat baik yang pernah menjalankan tradisi *Rarangkén* maupun masyarakat yang tidak menjalankan lebih menitikberatkan pada manfaat dan nilai yang terkandung di dalamnya yang penting bagi kekuatan solidaritas bagi masyarakat. Akan tetapi, permasalahannya justru dari faktor kesadaran dan kepedulian masyarakat sendiri. Masyarakat hanya beranggapan bahwa tradisi ini perlu dan penting sebagai ciri khas dan identitas yang dimiliki, namun hanya cukup sampai di situ saja tidak ada tinjauan ulang terhadap tradisi *Rarangkén* jika memang tradisi lain dianggap berbenturan dengan ajaran Islam, tradisi ini pun dinilai sama oleh masyarakat. Seharusnya masyarakat tetap merespons dan mengikuti perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan sifat-sifat tradisional yang mampu mendorong terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Simpulan

Tradisi *Rarangkén* merupakan tradisi pernikahan yang khas dan unik hanya ada di Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya. Tradisi ini sebagai ikon yang dimiliki masyarakat sebagai suatu ciri khas yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur masyarakat Kampung Cikantrieun, dimana masyarakat memiliki ikatan sosial yang kuat, menjunjung tinggi solidaritas dan gotong royong sebagai nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam tradisi *Rarangkén*. Namun, seiring perkembangan zaman tradisi ini mulai hilang dan ditinggalkan oleh masyarakatnya sejak tahun 2013. Faktor penyebab perubahan tersebut adalah faktor internal meliputi kesadaran dan pola pikir masyarakat yang berkembang, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, hadirnya budaya dan nilai baru dalam masyarakat, serta faktor perubahan abadi. Dampak hilangnya tradisi ini ialah ikatan sosial menjadi tidak kuat, lemahnya identitas masyarakat, kemalasan sosial, beban masyarakat menjadi berat karena orientasinya bukan lagi orientasi bersama melainkan orientasi ekonomi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Hakim, Moh Nur (2003). *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Johanes, Mardimin. (1994). *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kansisus.
- Lauer, H. Robert. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mitchel, Bruce et.al. (2003). *Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sorokin, A. Pitirim. (1966). *Social and Cultural Dynamics*. New York: E.P. Dutton and Co.
- Sztompka, Piotr. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Media Group.

Jurnal:

- Al-Farisi, Utsman. (2012). *Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan)*. (Skripsi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Malang.
- Cahyono Budhi. (2014). Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosbo. *Jurnal Ekobis*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Vol. 15 (1).
- Gumilar T, Samson, dan Kusnandar. (2016). Rekonstruksi Tradisi *Rarangkén Paré*: Upaya Awal Konservasi Budaya Pangan di Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Conservation*. Vol. 05 (1). Halaman 13-18. ISSN: 2252-9195).
- Permana Raden C. E. Nasution Isman, dan Gunawijaya J. (2011). Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*. Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Depok: Universitas Indonesia. Vol. 15 (1).
- Woolcock, M. (2001). The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes. *ISUMA Canadian Journal Of Policy Reseach*. Vol 2.
- Dwiecha. (2011). *Lunturnya Kebudayaan Bangsa Indonesia*. [Online]. Tersedia di: <http://dwiecha.blogspot.co.id/lunturnya-kebudayaan-bangsa-indonesia/m=1>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2017.



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Halaman 27-35



Sesajen sebagai Nilai hidup bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung

Ujang Kusnadi Adam

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Andreian Yusup

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Salma Fauziyyah Fadlullah

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Siti Nurbayani

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Kata Kunci	Abstrak
Sesajen	Budaya sesajen menjadi salah satu contoh akulturasi budaya Hindu-Islam. Kebudayaan ini menjadi identitas masyarakat lokal. Kebudayaan sesajen menjadi identitas dan akulturasi serta menjaga kearifan lokal seluruh sistem kehidupan. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan budaya islam modern yang mengang teguh al-qur'an dan Hadist. Masyarakat awam tidak mengetahui makna serta nilai yang terkandung dalam budaya sesajen. Tujuan penelitian ini ialah 1) menganalisis kebudayaan sesajen, 2) mendeskripsikan kebudayaan sesajen sebagai identitas, 3) menganalisis sesajen sebagai akulturasi budaya, 4) menemukan model pelestarian sebagai kearifan lokal. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif, intrumen penelitian ini menggunakan observasi partisipasif, catatan lapangan dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan dengan catatan lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, remaja, serta tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan 1) budaya sesajen mulai luntur seiring berkembangnya zaman,serta tidak diminati oleh kalangan muda., 2) Penampilan sesajen pun sangat sederhana dengan balutan kopi,rujak,rokok,bara api 3) model pelestarian dengan cara menurunkan ilmunya ke generasi selanjutnya. Kebudayaan sesajen menjadi dwi fungsi makna dalam hidup bermasyarakat, menjadi sebuah identitas budaya serta kearifan lokal masyarakat yang hanya dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat baik kalangan masyarakat tertentu dan keluarga tokoh adat.
Kebudayaan	
Masyarakat	
Cipicung Girang	
Diterima	7 Mei 2019
Review	17 Mei 2019
Revisi	29 Mei 2019
Penerimaan	8 Juni 2019
Copyedit	25-28 Juni 2019
Publikasi	30 Juni 2019



ISSN 2685-483X

Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019

Pages 27-35



The functionalism of Sesajen as a social life philosophy in Kampung Cipicung Girang

Ujang Kusnadi Adam

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Andreian Yusup

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Salma Fauziyyah Fadlullah

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Siti Nurbayani

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Keywords	Abstract
Sesajen Culture Society Cipicung Girang	Sesajen is acculturation of Hindu and Islam culture. Sesajen becomes the identity of local communities, protecting local wisdom of all systems of life. However, this culture contrasts with modern Islam culture which reflects the Holy Al-Qur'an and Al-Hadith; the commonfolks are unaware of the meaning and values in Sesajen. This research aims to: 1) analyze Sesajen culture, 2) describe Sesajen as an identity, 3) analyze Sesajen as an acculturation, 4) discover a preservation model as a local wisdom. Using descriptive method of the qualitative approach, data is gathered through instruments of participatory observation, field notes and in-depth interview. Conducted a number with elders, youth and figures of religion. This research finds that 1) Sesajen starts to fade as age advances, no longer being of the youths' interest, 2) Sesajen is shown very simple by coffee wrappings, rujak, tobacco, flame, etc., 3) the preservation model involves passing down Sesajen to the next generation. In conclusion, Sesajen performs dual-function roles: giving meaning in social life, and becoming an identity of culture as well as local wisdom of the community; this can only be achieved through active participation of all elements as well as their respective families.
Submission	7 Mei 2019
Review	17 Mei 2019
Revision	29 Mei 2019
Acceptance	8 Juni 2019
Copyediting	25-28 Juni 2019
Publication	30 Juni 2019

Ucapan Terima Kasih/Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam program PKM tahun pendanaan 2019 atas dukungan finansial yang diberikan untuk melakukan penelitian ini.

Acknowledgement

The authors state that this research is possible through the Year 2019 PKM grant by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education.

Pendahuluan

Salah satu unsur spiritual yang melekat di tanah Jawa adalah sesaji yang digunakan untuk persembahan kepada Zat Ilahi dan juga makhluk-makhluk halus lainnya. Akan tetapi ritual ini dipandang sangat aneh ketika dihadapkan dengan modernisasi dan globalisasi. Banyaknya kebudayaan yang ada di pulau Jawa tidak terlepas dari unsur-unsur spiritual, salah satu dari unsur spiritual yang kental yaitu kepercayaan-kepercayaan akan mitos di dalamnya. (Haniyaturrufah. 2013). Namun, mereka yang masih percaya dengan hal itu dalam pelaksanaan ritual budaya sesajen berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dengan Tuhan. Aktivitas ini merupakan suatu upaya untuk mencapai keselamatan dalam hidup. Serta menjadi suatu ritual adat istiadat masyarakat. Melekatnya nilai adat dan budaya ini, secara tidak langsung menjadi sebuah identitas tersendiri. 'Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan. Soal personal dan sosial, soal apa yang dimiliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakannya dengan orang lain'. Identitas ini juga sangat melekat dan di jadikan suatu ciri khas oleh masyarakat tradisional. Dimana konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Menurut Barker (dalam Reqno, 2013):

Suatu tradisi memiliki nilai waris yang sangat tinggi untuk di masa depan, keharmonisan antar makhluk menjadi sangat damai dan dapat terpelihara. Sampai sekarang, banyak penulis membahas nilai warisan budaya, termasuk definisi dan teori, serta, metode untuk mengevaluasi nilai warisan budaya dalam praktek [sic].

Munculnya kebudayaan ini tidak terlepas dari unsur budaya Hindu yang melekat di masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Jawa dan Bali, dan menjadi akulturasi dan bercampurnya budaya dengan budaya yang baru masuk ke Indonesia, seperti sesajen akulturasi dari budaya Hindu-Islam. Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri berbagai macam suku dan memiliki berbagai macam tradisi yang masih dipertahankan dan dilestarikan. Salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di Kampung Cipicung Girang Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung yaitu pembuatan sesajen. Harapan generasi muda dapat meneruskan warisan budaya ini sehingga nilai dan kearifan lokal budaya yang berada di kampung Cipicung dapat terjaga dengan baik, ekosistem yang berada di dalamnya dapat terjaga dan juga dapat terus saling menghargai dengan makhluk hidup serta menghargai kepada pada pendahulu atau leluhur di Cipicung Girang. Pada dasarnya terdapat suatu simbol atau *siloka* di dalam sesajen yang harus kita pelajari. Siloka, merupakan penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda (aforisme). (Dewi, 2013).

Keberadaan kebudayaan ini diawali dengan tersebarnya agama Hindu yang di sebar oleh kerajaan yang berada di Indonesia, kerajaan Mataram, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran. Dengan berakhirnya zaman tersebut kebudayaan Hindu dan Budha melekat di masyarakat khususnya dengan wilayah kekuasaan kerajaan. Kebudayaan itu mulai luntur dan bercampur dengan kebudayaan yang baru masuk yaitu Islam yang masuk melalui seluruh aspek kehidupan dengan damai, sehingga menyebar luas di seluruh Indonesia. Kebudayaan ini berakulturasi menjadi kebudayaan baru dimana ajaran Islam diwarnai oleh zaman sebelumnya yaitu Hindu

dan Budha. Di dalam Islam pun terdapat aliran yang menggunakan mistis sebagai media penyebaran agama dan dinamakan dengan tasawuf, yaitu cara menyebarkan Islam dengan masuk pada kebudayaannya.

Kebudayaan ini dapat di lestarikan dengan seluruh aspek yang ikut serta dalam melestarikan budaya ini dan dapat menjadi identitas masyarakat serta kearifan lokal. Sebagai warisan budaya yang turun temurun di lakukan oleh masyarakat serta nilai-nilai kehidupan dan ekosistem di masyarakat. Budaya sesajen ini merupakan salah satu bentuk hubungan manusia dengan alam gaib, masyarakat Cipicung Girang meyakini bahwa dengan sesajen dapat terus saling menghargai antara yang hidup dengan leluhur. Fokus dari artikel ini ialah 1) menganalisis kebudayaan sesajen, 2) mendeskripsikan kebudayaan sesajen sebagai identitas, 3) menganalisis sesajen sebagai akulturasi budaya, 4) Filosofi sesajen serta implementasi di kehidupan.

Urgensi dari penelitian ini ialah pelestarian kebudayaan lokal Indonesia, dengan terus menerus menurunkan budaya ini kepada generasi muda dan di amalkan sehingga kearifan lokal tersebut tetap terjaga, dengan akulturasi ini saling menghormati dengan sesama makhluk. Seiring berkembangnya zaman kebudayaan ini berubah fungsi menjadi pada rasional, memiliki perbedaan pada makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang pernah dilakukan dalam menilai sesajen, Dalam kajiannya berjudul "Makna Simbolik Sesajen Dalam Kesenian Tradisional Kuda Lumping Sanggar Karya Budaya Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak", dalam segala kegiatan yang dilakukan masyarakat tradisional selalu mempertimbangkan segala halnya, mulai dari sesajen ialah bentuk penghormatan pada pendahulu dan karuhun. Di dalam mengandung nilai-nilai dan simbol-simbol yang terkandung di dalamnya baik yang tersirat maupun secara lisan disampaikan oleh para tokoh adat di dalam masyarakat tersebut yang menjadi pemimpin budaya bagi kehidupan masyarakat (Ria, 2018). Hal ini menunjukkan adanya hubungan ritual sesajen dengan upacara keagamaan serta akulturasi dengan kebudayaan lokal yang menjadi pemikiran zaman dahulu.

Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan memberikan landasan ilmiah terhadap arti penting penelitian yang di lakukan. Di antara penelitian terdahulu ada beberapa kajian yang merekomendasikan suatu upaya berkelanjutan untuk mengembangkan nilai, makna, dan kearifan lokal yang terkandung dalam sesajen, mulai dari awal proses sampai bagian-bagian dari setiap barang sesajen. Oleh karena itu berpijak pada penelitian-penelitian terdahulu, peneliti berupaya mengisi kekosongan celah yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, selain memahami makna nilai sesajen juga dengan mencari relevansi atau keselarasan dengan sejarah dan agama Islam berbasis kearifan lokal.

Akulturasi Sesajen serta Kearifan lokal sesajen

Para leluhur menciptakan ritual sesajen merupakan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di setiap masa, simbol yang terkandung di dalam sesajen merupakan pelajaran yang harus di pelihara di setiap generasi. Sesajen mengandung makna berkelanjutan demi menjaga nilai dan norma di masyarakat, yang di harapkan oleh para leluhur dengan sesajen ini setiap manusia lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang maha Esa, serta tanpa henti berdoa. Identitas ini sangat melekat dan dijadikan suatu ciri khas oleh masyarakat tradisional. Dalam konsep self sosial menurut Baron dan Byrne (2005) "suatu identitas kolektif yang meliputi hubungan interpersonal dan aspek-aspek identitas yang datang dari keanggotaan pada kelompok- kelompok yang lebih besar dan lebih tidak personal yang berdasarkan pada ras, etnis, dan budaya". Sesajen ini juga merupakan akulturasi budaya dari beberapa budaya lainnya, di kampung Cipicung Girang ini akulturasi budaya dari budaya lokal dan budaya Islam.

The Social Science Research Council yang terdiri dari Robert Redfield, Ralph Linton, dan Melville J. Herskovits mendefinisikan akulturasi sebagai fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung, perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok. Akulturasi tercipta oleh beberapa unsur yang berbeda dan bercampur padu menjadi kebudayaan baru. Seperti

sesajen, merupakan akulturasi dari unsur budaya, agama. Budaya menjadi identitas disebabkan aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan yang dijadikan ritual sakral oleh masyarakat. Sesajen merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sesajen juga merupakan wacana simbol yang digunakan sebagai sarana untuk negosiasi spiritual kepada hal-hal gaib. Hal ini dilakukan agar makhluk-makhluk halus di atas kekuatan manusia tidak mengganggu. Dengan kata lain sesajen menjadi media untuk berdoa agar ritualnya menjadi sakral dan bermakna. Aroma yang dikeluarkan oleh wangi kemenyan menjadi ciri khas sesajen, kaca menjadi cerminan hidup diri individu, serta keberagaman alat-alat yang berbeda bersatu menjadi sesajen menjelma di masyarakat yang mempunyai keberagaman dan perbedaan yang semuanya itu dapat di satukan melalui kebudayaan seperti sesajen. Dengan praktik ritual yang ditampilkan, masyarakat mencoba menertibkan gangguan-gangguan dari dunia luar (Alkaf, 2013). Dari kegiatan tersebut yang terus diturunkan kepada generasinya dan menjadi identitas budaya masyarakat tempat tersebut. Budaya lokal pun menjadi identitas diri ketika hasil karyanya dilihat oleh masyarakat luar, menjadi ciri khas lokal yang dihasilkan. Budaya diwariskan melalui proses sosialisasi dalam kelompok-kelompok tertentu, yang membutuhkan komunikasi simbol-simbol kunci, gagasan, pengetahuan, dan nilai-nilai antara individu dari satu generasi ke generasi berikutnya (Ronald, 2009). Proses sosialisasi ini di mulai di keluarga seperti orang tua kepada keturunannya, setiap yang dikerjakan orang tua akan di lihat dan di lakukan oleh keturunannya dengan menuntun mereka kepada budaya yang ada di masyarakatnya. Nilai dan norma di sosialisasikan dengan bentuk perintah dan larangan.

Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini di gunakan untuk mengungkap dan menguraikan fenomena yang terjadi di masyarakat Kampung Cipicung Girang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang masih menggunakan sesajen dalam setiap kegiatan besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan dan informasi. Observasi dilakukan dengan catatan lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, remaja, serta tokoh agama. Pendekatan kualitatif ini sesuai dengan instrumen yang akan di cari dan data yang banyak serta akurat. Pemeriksaan terhadap keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting, yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data dalam Penelitian ini digunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik, (Sugiyono, 2011).

Temuan Penelitian

Sesajen bukan lagi untuk menyembah roh nenek moyang tetapi berakulturasi dengan budaya yang masuk ke wilayahnya yaitu budaya agama Islam, kebudayaan di lestarikan agar menjaga kearifan lokal yang ada di kampung Cipicung Girang dan dapat menjaga ekosistem di dalamnya. Adanya alih fungsi sesajen, mulai dari tata cara pelaksanaan dan kegunaan, seluruh rangkaian ritual ini di baluri ayat-ayat suci alquran dan doa bukan oleh semacam dukun. Harum wangi dari bakaran kemenyan untuk mengharumkan suasana di rumah, sereh melambangkan untuk mengubah dan menyucikan seta membersihkan. Kaca melambangkan kepribadian itu mencerminkan diri sendiri, kata di sini untuk setiap manusia dapat menyadari akan setiap tingkah lakunya. Kopi dan rujak melambangkan setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dan memiliki karakteristik bermacam-macam, bersatu padu menjadi satu di dalam sebuah sesajen dan melambangkan kebinekaan ialah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Makna sesajen sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat dengan hasil yang di jelaskan filosofi sesajen sangat berkaitan dengan prinsip kebinekaan serta berhubungan dengan ibadah dengan sesama manusia yang sangat bermanfaat untuk seluruh elemen di

masyarakat. Di dalam masyarakat, terdapat berbagai jenis sesajen yang di khususkan untuk mungghahan atau hari pertama bulan Ramadhan, sesajen untuk acara Rajab dan mauludan yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, sesajen yang di khususkan untuk acara hajatan khitanan dan pernikahan yang sesajennya sangat komplit dengan komposisi yang banyak dan padat. Secara garis besar nilai dan maknanya sama dengan halnya yakni untuk permasyarakatan. Selain itu budaya yang ada di masyarakat ini banyak termasuk hal yang terkecil, seperti untuk pengobatan, biasanya dikhususkan untuk penyakit yang berhubungan dengan magis dan penyakit berat lainnya, ini hanya untuk sementara dan diambil sebagai langkah awal sebelum di bawa ke medis. Selain itu, penggunaan sesajen juga pada keinginan dilancarkan ujian, perjalanan, bahkan sampai pada keinginan memudahkan kesuksesan, jodoh dan lainnya. Pada salah satu cerita jaman dahulu budaya tersebut di gunakan untuk bermunasabah diri akan keagungan yang maha mencipta yakni Allah Swt., di dalam ritual sesajen di dalamnya terdapat beras buah-buahan dan seperangkat sesajen ini di maksudkan untuk bersyukur pada yang maha kuasa atas kelimpahan dan bermunasabah diri.

Dengan demikian, budaya sesajen ini memiliki fungsi budaya pada masyarakat Cipicung Girang, Kota Bandung. Pertama, budaya yang berlaku di masyarakat serta penghubung interaksi masyarakat untuk berkomunikasi dengan karuhun atau leluhur kampung Cipicung Girang. Kedua, sebagai filosofi bermasyarakat dengan komposisi yang berbeda beda mencerminkan kehidupan masyarakat yang saling bahu membahu menjadi satu kesatuan dalam bingkai budaya. Kebudayaan ini tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia dengan damai tanpa kekerasan dan dapat berbaur dengan kebudayaan asli Indonesia. Seperti berdagang dan persebaran dengan aliran tasawuf.

Pelaksanaan dari ritual ini ialah pada saat hari tertentu seperti pada malam Selasa, malam Jumat, mungghahan, rajaban, syakban, mauludan. Seluruh bahan yang di persiapkan di bawa pada tengah makanan untuk mungghahan, di damping oleh makanan ringan seperti roti, makanan kering dan lain-lain. Kemudian pada saat pelaksanaannya bara api disiapkan rokok masukkan pada para seakan-akan ada yang sedang perokok, dan kemenyan yang sudah di beri doa di taburkan di bara api supaya menghasilkan asap wangi dari kemenyan. Penutupan di lakukan setelah rokok sudah habis menjadi abu, dan kemenyan serta asapnya sudah tidak menyala. Untuk kopi dan rujak roti pisang bisa di minum oleh keluarga sesuai selera. Setiap itu untuk tempat dari rantang atau pisin di simpan di belakang sumah bersama bara api.

Pelaksanaan ritual memiliki beberapa prosedur dan tahapan, yakni:

1. Persiapan

- Menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam sesajen seperti kopi pahit, kopi gula, kopi susu, air putih panas, rujak roti pisang, sareh, gula merah, beras, telur kampung, kaca, sisir dan rujak, bunga, bara api, dan kemenyan yang sudah di beri doa oleh sesepuh.
- Seluruh bahan-bahan di tata di tempat yang selayaknya. Seduh semua kopi dan air minum serta rujak di simpan di nampan. Bahan untuk sisir, beras, telur kampung, kaca, sisir, sareh, bunga dll., di simpan di wadah seperti rantang, pisin, dan lain-lain.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dari ritual ini ialah pada saat hari tertentu seperti pada malam Selasa, malam Jumat, mungghahan, rajaban, syakban, mauludan. Pada kesempatan kali ini peneliti meneliti pada saat mungghahan yang di laksanakan pada Hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Pukul 02.00 – 03.00 WIB. Seruh bahan yang di persiapkan di bawa pada tengah makanan untuk mungghahan, di damping oleh makanan ringan seperti roti, makanan kering dan lain-lain. Kemudian pada saat pelaksanaannya bara api disiapkan rokok masukkan pada para seakan-akan ada yang sedang perokok, dan kemenyan yang sudah di beri doa di taburkan di bara api supaya menghasilkan asap wangi dari kemenyan.

3. Penutupan

Penutupan dilakukan setelah rokok sudah habis menjadi abu, dan kemenyan serta asapnya sudah tidak menyala. Untuk kopi dan rujak roti pisang bisa di minum oleh keluarga sesuai selera. Setiap itu untuk tempat dari rantang atau pisin di simpan di belakang sumah bersama bara api.

Kearifan lokal dari sesajen ialah, saling menghargai sesama makhluk, baik makhluk hidup dan gaib. Masyarakat lebih terbiasa tidak menebang pohon sembarangan dengan artian jika di tebang akan mengakibatkan mala petaka, boleh di tebang dengan syarat dan ketentuan yang jelas seperti, pohon sudah mati, dan pohon yang di pergunakan untuk di jadikan rumah dan kayu bakar untuk selamatan, tapi harus dengan sesajen terlebih dahulu agar seluruh ekosistem tidak terganggu. Fungsi dari sesajen ini mulai luntur dari aslinya, sesajen ini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengenai aspek kehidupan bermasyarakat. seluruh rangkaian ritual ini dibaluri ayat-ayat suci alquran dan doa bukan oleh semacam dukun. Harum wangi dari bakaran kemenyan untuk mengharumkan suasana di rumah, sereh melambangkan untuk mengubah dan menyucikan seta membersihkan. Kaca melambangkan kepribadian itu mencerminkan diri sendiri, kata di sini untuk setiap manusia dapat menyadari akan setiap tingkah lakunya. Kopi dan rujak melambangkan setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dan memiliki karakteristik bermacam-macam, bersatu padu menjadi satu di dalam sebuah sesajen dan melambangkan kebinekaan ialah walaupun berbeda-beda tatapi tetap satu jua. Pewarisan nilai budaya yang ada di masyarakat Cipicung Girang dilakukan oleh sesepuh dan ilmu serta lainnya di berikan kepada penerus dengan melalui acara serta ritual tertentu. Orang yang menjadi penerus harus paham mengani budaya yang ada di masyarakat, kuat lahir dan batin dan iman serta Islamnya kuat sehingga tidak kewalahan dalam mengampu ilmu yang diberikan sesepuh. Penerusan ini biasanya melalui dengan ritual puasa, mandi kembang dan lainnya.

Pembahasan

Kebudayaan yang berbeda bercampur menjadi satu dan mengikis makna dan nilai budaya lokal serta dengan berkembangnya zaman tradisi ini mulai meluntur di masyarakat hanya orang-orang tertentu yang melakukannya, berdasarkan data yang masing-masing menggunakan hanya seperempat masyarakat yang menggunakannya, sisanya ialah masyarakat pendatang yang membawa Islam yang lebih ke modern. Dari akulturasi ini menciptakan kearifan lokal yang sangat membantu dalam keseimbangan ekosistem di masyarakat, kearifan di lestarian di jaga agar seluruh tatanan kehidupan ekosistem kehidupan dengan teori Menurut Barker (dalam Reqno, 2013) 'identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan. Soal personal dan sosial, soal apa yang dimiliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakannya dengan orang lain'. Identitas ini juga sangat melekat dan di jadikan suatu ciri khas oleh masyarakat tradisional. Dimana konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Lunturnya nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi ini sesuai yang di kumukakan oleh Steni. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadikan apa yang dinamakan adat tergerus dan tergantikan oleh nilai-nilai baru (Steni 2009: 29). Budaya juga di definisikan budaya biasanya didefinisikan sebagai fenomena 'kolektif' yang kira-kira 'dibagikan' di antara anggota budaya (misalnya Hofstede, 1980, 2001; Leung dan van de Vijver, 2008; Rohner, 1984). Dapat dikatakan budaya itu menyeluruh pada sistem di dalamnya dan juga budaya dipelajari dan tidak ditransmisikan secara genetik (meskipun telah ada upaya untuk mengintegrasikan evolusi genetika dan budaya; Gintis, 2007). Budaya juga di wariskan kepada generasi selanjutnya dan di pertahankan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Rohner. Budaya diwariskan melalui proses sosialisasi dalam kelompok-kelompok tertentu, yang membutuhkan komunikasi simbol-simbol kunci, gagasan, pengetahuan, dan nilai-nilai antara individu dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Ronald Fischer; 2009)

Definisi budaya adalah sebuah langkah dalam proses penelitian yang dilakukan. Penggunaan budaya sebagai sistem makna bersama dalam masyarakat yang bersifat mengikat. Ada kemungkinan bahwa peneliti mungkin ingin menggunakan definisi budaya yang berbeda (misalnya definisi budaya yang lebih lama sebagai sistem adaptif, untuk tinjauan lihat Kuper,

1999; Rohner, 1984). Budaya ini menjadi identitas masyarakat lokal termasuk di Cipicung Girang dan budaya ini berawal dari sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian kebiasaan itu menjadi sebuah nilai serta norma budaya dan memperoleh nilai kearifan lokal budaya setempat. Budaya adalah istilah yang samar-samar dan menangkap semua yang telah digunakan dalam banyak cara untuk banyak tujuan sehingga hanya sedikit yang bisa diperoleh, dan mungkin banyak yang hilang, dari mencoba memaksakan definisi saya sendiri, terutama jenis sempit dan pemahaman teknis penting untuk mengoperasionalkan konsep. (Richard Ned Lebow; 2009).

Kebudayaan ini menjadi identitas budaya masyarakat di kampung Cipicung Girang, menjadi sarana ukhuwah dengan kampung yang lain seperti bengkok, babakan dan lain-lain yang kampungnya sama mempunyai kebudayaan tersebut. Kebudayaan ini pun hanya dapat di lestari oleh keturunan dan berkeinginan masyarakat di turunkan kepada generasi muda. Sesajen pun memiliki tipe dalam pelaksanaannya:

1. Tipe Sederhana, di gunakan dalam acara sederhana, biasanya di gunakan untuk acara biasa secara rutin seperti untuk ke "goah" di setiap malam Selasa dan malam Jumat serta acara mungghan dan lainnya.
2. Tipe Komplit, di gunakan dalam acara yang besar seperti hajatan, syukuran. Kegiatan ini biasanya di gunakan untuk acara besar seperti hajatan kampung, hajatan khitanan dan hajatan pernikahan yang menggunakan adat-istiadat masyarakat setempat yang sesuai dengan budaya.

Simpulan

Maka dari itu, sesajen merupakan identitas budaya, akulturasi dan kearifan lokal masyarakat tradisional di Indonesia, dengan menunjukkan daerah yang masih kental akan budaya sesajen ialah, Jawa, Bali dan Bawa barat. Hasil penelitian menunjukkan 1) budaya sesajen mulai luntur seiring berkembangnya zaman, serta tidak diminati oleh kalangan muda., 2) Penampilan sesajen pun sangat sederhana dengan balutan kopi, rujak, rokok, bara api dan lainnya 3) model pelestarian dengan cara menurunkan ilmunya ke generasi selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Alison J. Gerlach. (2012). "A critical reflection on the concept of cultural safety". *Canadian Journal of Occupational Therapy* Vol 79, 151-158. doi: 10.2182/cjot.2012.79.3.4
- Alkaf, Mukhlas. 2013. *Berbagai Ragam Sajen Pada Pementasan Tari Rakyat dalam Ritual Selamatan*. Gelar: Jurnal Seni Budaya. Volume 11 (No 2): 211-223. Journal (online). dalam <http://jurnal.isiska.ac.id/index.php/gelar/article/view/1469/0> (diakses 25 Maret 2017)
- Baron, A. Robert & Bryne Donn. (2005). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Fauza, Nanda. 2010. *Istilah-Istilah Sesaji Upacara Tradisional Jaman Pusaka di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri (Suatu Kajian Etnolinguistik)*. Skripsi Sarjana. Surakarta: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra.
- Gintis, H. (2007) 'A Framework for the Unification of the Behavioural Sciences', *Behavioural and Brain Sciences* 30: 1-61.
- Hanyaturroufah. (2013). "Ritual Sesaji Sebagai Bentuk Persembahan Untuk Kanjeng Ratu Kidul Di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen". Vol. 03 / No. 05 / November 2013. HAL 20-13.
- Idham Rizkiawan, Meda Wahini. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Makna Sesajen Pada Upacara Bersih Desa". e-journal Boga, Volume 5, No. 2, Edisi Yudisium Periode Mei 2017, Hal 11 - 17.

- Ika Surya, Widya, dkk. "Arti Material Sesajen Perkawinan Adat Jawa Di Desa Mataram Baru Lampung Timur". FKIP Unila
- Khomsahrial Romli (2015). "Akulturasi Dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnik". *Ijtimaiyya*, Vol. 8, No. 1.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuper, A. (1999) *Culture – The Anthropologists' Account*. London: Harvard University Press.
- Leung, K. and Bond, M.H. (1989) 'On the Empirical Identification of Dimensions for Cross-cultural Comparisons', *Journal of Cross Cultural Psychology* 20: 133–51.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), 2001. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Mulyana, Deddy. 2004. *Komunikasi Efektif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Ni made kartika, Rahayu Dewi. (2013). "Kajian Ragam Dan Makna Sesajen Pada Upacara Perang Tipat Bantal Di Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali". *Ejournaln boga*. Volume 2, nomor 1, tahun 2013, edisi yudisium periode Februari 2013, hal 118 – 126.
- Reqno, Kadek, A.P. (2013) Hubungan Antara Identitas Sosial dan Konformitas dengan Perilaku Agresif pada Suporter Sepakbola Persisam Putra Samarinda. [Jurnal] 1(3) 241254.
- Ria Putri Susanti.(2018). "Makna Simbolik Sesajen Dalam Kesenian Tradisional Kuda Lumping Sanggar Karya Budaya Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak". *JOM FISIP* Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018.
- Richard N. L.(2009). "Culture and International Relations: The Culture of International Relations". *Millennium: Journal of International Studies* Vol.38 No.1, pp. 153–159. ISSN 0305-8298; DOI: [10.1177/0305829809336258](https://doi.org/10.1177/0305829809336258) <http://mil.sagepub.com>
- Richard Ned Lebow, 'The Long Peace, the End of the Cold War, and the Failure of Realism', *International Organization* 48 (Spring 1994): 249–77.
- Ronald Fischer. 2009. "Where Is Culture in Cross Cultural Research? An Outline of a Multilevel Research Process for Measuring Culture as a Shared Meaning System". *International Journal of Cross Cultural Management* Vol 9(1): 25 –49. <http://www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav> DOI: 10.1177/1470595808101154
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Halaman 36-46



Pemanfaatan Sungai Langkap sebagai Tempat Pembuangan Limbah Rumah Tangga di Kabupaten Purbalingga

Gita Saputri
Universitas Negeri Semarang

Antari Ayuning Arsi
Universitas Negeri Semarang

Kata Kunci	Abstrak
Limbah Rumah Tangga	Tulisan ini membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sungai dan faktor yang melatarbelakangi masyarakat membuang limbah rumah tangga ke sungai. Lokasi penelitian ini di permukiman masyarakat di pinggiran Sungai Langkap Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Hasil dalam tulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Selain sebagai sumber air, masyarakat mempersepsikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Masyarakat juga menganggap bahwa membuat septic tank sebagai penyimpan limbah, 2) Faktor yang melatarbelakangi perilaku masyarakat membuang limbah rumah tangga ke sungai adalah faktor internal yang meliputi kebiasaan turun-temurun masyarakat dan kesadaran lingkungan yang rendah, dan faktor eksternal, yaitu tidak tersedianya TPS di desa dan tidak ada sanksi yang tegas.
Pemanfaatan Sungai	
Perilaku Masyarakat	
Diterima	31 Maret 2019
Review	14 April 2019
Revisi	28 April 2019
Penerimaan	7 Mei 2019
Copyedit	25-28 Juni 2019
Publikasi	30 Juni 2019

Ucapan Terima Kasih/Pengakuan

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kepala desa dan masyarakat di Desa Tegalpingen, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang penulis perlukan dalam proses penelitian ini.



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Pages 36-46



The Utilization of Langkap River as Household Waste Disposal in Kabupaten Purbalingga

Gita Saputri
Universitas Negeri Semarang

Antari Ayuning Arsi
Universitas Negeri Semarang

Keywords	Abstract
Community Behavior	This paper discussing community perceptions of river use and also the underlying factors people dispose of household waste into rivers. Location of this study was in community settlements on the banks of the Langkap River, Tegalpingen Village, Pengadegan District, Purbalingga Regency. This research uses descriptive qualitative method with observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Data analysis using interactionism symbolic theory from George Herbert Mead. The results showed that: 1) Aside from being a source of water, the community perceives the river as a waste disposal site. The community also considers making septic tanks as storing waste, 2) Factors underlying people dispose behaviour of household waste into the river are internal factors which habits of the previous community and low environmental awareness, and external factors, namely the unavailability of polling stations in the village and there are no strict sanction.
Domestic Waste	
River Utilization	
Submission	31 Maret 2019
Review	14 April 2019
Revision	28 April 2019
Acceptance	7 Mei 2019
Copyediting	25-28 Juni 2019
Publication	30 Juni 2019

Acknowledgement

The authors express their gratitude to the Village Chief and Community of Desa Tegalpingen, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Semarang who spare their time to provide them information and data needed in the research.

Pendahuluan

Perairan sungai merupakan tempat yang memiliki peran penting bagi makhluk hidup (Suparjo, 2009). Ketersediaan air yang terdapat pada sungai juga menjadi sumber kehidupan manusia. Sungai yang ekosistemnya terjaga sangat bermanfaat bagi manusia dalam menjalankan aktivitas. Kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat merupakan dua hal yang saling berkesinambungan. Perilaku masyarakat terbentuk dari kondisi lingkungan sekitar, sebaliknya kondisi lingkungan juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan (Murningsih, 2016). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, kurangnya daerah serapan air, dan semakin bertambahnya permukiman di pinggir sungai menyebabkan kondisi sungai mengalami banyak penurunan kualitas mutu air. Penurunan kualitas mutu air ini disebabkan oleh pola aktivitas masyarakat pinggir sungai (Ajiansyah dan Surdin, 2016), antara lain pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, baik limbah rumah tangga (Sudarmadji & Hamdi, 2013; Mokodongan dkk, 2014; Natsir, 2016; Hasibuan, 2016) maupun limbah industri (Badaii dkk., 2013; Halder dkk., 2015; Mahyudin, 2015; Ermawati & Lono, 2017; Sonta dkk., 2017). Penurunan kualitas mutu air dapat menyebabkan air tidak layak dimanfaatkan lagi, sehingga ketika ada sebagian masyarakat yang tetap memanfaatkan air tersebut, maka akan membahayakan kesehatan masyarakat (Halder dkk., 2015). Dan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ternyata 75% air sungai di Indonesia sudah tercemar berat, khususnya oleh limbah rumah tangga (Putranto, 2017).

Masyarakat sebagai sumber daya manusia perlu memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi dalam beradaptasi di lingkungan apa pun (Mulyadi dalam Luthfi & Wijaya, 2011), namun kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, menyebabkan mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pembuangan limbah langsung ke sungai menjadi bukti bahwa masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan.. Fenomena pembuangan limbah ke sungai juga terjadi di permukiman masyarakat pinggir Sungai Langkap Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Masyarakat yang bermukim di pinggir Sungai Langkap masih membuang limbah ke sungai. Limbah yang dibuang ke sungai berupa limbah rumah tangga. Kebiasaan membuang limbah ke sungai sudah umum dilakukan oleh masyarakat, terutama yang bermukim di pinggir sungai. Namun ada kondisi yang cukup berbeda antara pemukiman masyarakat pinggir sungai pada umumnya dengan pemukiman pinggir Sungai Langkap di Desa Tegalpingen ini. Jika penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa permukiman yang terdapat di pinggir sungai pada umumnya merupakan permukiman masyarakat miskin (Hendarto, 2005; Ashidiqi, 2009; Latantaru, 2012; Mokodongan dkk., 2014), maka permukiman di pinggir Sungai Langkap Desa Tegalpingen berbeda kondisinya, karena justru merupakan permukiman penduduk dengan ekonomi menengah ke atas. Hal ini dapat dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat menurut BPS tahun 2015, di mana menurut data demografi Desa Tegalpingen menunjukkan bahwa sudah terdapat 86% rumah permanen dan bersertifikat.. Indikator lainnya antara lain: rumah sudah ber dinding batu, atap genting, lantai tegel atau keramik, memiliki toilet, fasilitas lengkap, TV berwarna, dan listrik ada. Dengan kondisi rumah dan berbagai fasilitas yang cukup memadai tersebut, namun ternyata sebagian besar rumah tidak memiliki dengan tempat pembuangan limbah (*septic tank*) sendiri, sehingga limbah hasil aktivitas domestik mereka langsung dibuang atau dialirkan ke sungai.

Aktivitas pembuangan limbah ke sungai oleh masyarakat sekitar sangat memengaruhi kondisi Sungai Langkap. Pada musim hujan, kebiasaan masyarakat membuang limbah ke sungai ini tidak terlalu menimbulkan masalah bagi masyarakat pinggir Sungai Langkap karena limbah yang dibuang ke sungai bisa hanyut dibawa arus sungai. Kebiasaan membuang limbah ke sungai ini baru menjadi masalah bagi masyarakat pinggir Sungai Langkap ketika musim kemarau. Pada musim kemarau aliran air sungai sangat kecil, sehingga limbah yang masyarakat buang ke sungai tidak bisa hanyut dan menimbulkan bau busuk serta merusak pemandangan sungai. Perilaku masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke sungai ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun sudah disosialisasi untuk tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai oleh Dinas Kesehatan melalui bidan Desa Tegalpingen, namun masyarakat sekitar Sungai Langkap masih memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sungai serta faktor yang membuat

masyarakat membuang limbah ke sungai. Penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme Simbolik dari George Herbert Mead sebagai alat analisis. Sebagai makhluk sosial, manusia akan menampilkan perilaku tertentu, antara lain interaksi individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya (Nugroho, 2017).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di permukiman masyarakat pinggiran Sungai Langkap Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Fokus dalam penelitian ini adalah pemanfaatan sungai langkap sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga.

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Tegalpingen yang bermukim di pinggiran Sungai Langkap dan membuang limbahnya ke Sungai Langkap. Informan utama dalam penelitian ini sejumlah 9 orang.

Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Tegalpingen, bidan Puskesmas Pengadegan, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar sungai yang tidak membuang limbahnya ke sungai. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Temuan dan Pembahasan

Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan limbah banyak terjadi pada masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai. Dekatnya jarak rumah dengan aliran sungai dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem sungai, menjadi salah satu faktor masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Langkap, tepatnya di Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Sebagian besar masyarakat yang bermukim di pinggiran Sungai Langkap membuang limbah ke sungai. Limbah yang masyarakat buang ke sungai tidak hanya limbah dapur tetapi juga limbah cair bekas mandi, mencuci, dan buang air besar.

Kondisi Sungai Langkap

Permukiman yang terdapat di pinggiran sungai sangat mempengaruhi kondisi sungai. begitu juga dengan kondisi Sungai Langkap sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat sekitar sungai. Masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga. Limbah yang dibuang ke sungai meliputi limbah dapur, limbah cair seperti limbah cucian dan mandi, dan limbah kotoran manusia. Hal tersebut membuat Sungai Langkap menjadi kotor, tercemar karena banyaknya limbah dapur berupa sampah plastik makanan, sampah bekas memasak dan sampah dedaunan yang berserakan di sekitar aliran sungai. Kondisi Sungai Langkap diperparah dengan penyempitan aliran sungai yang selain disebabkan longsor yang sering terjadi pada musim hujan, juga karena pembuatan talud oleh masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai. Masyarakat yang rumahnya tepat di pinggir Sungai Langkap membangun talud menjorok 1 m hingga 2 m ke aliran sungai dengan tujuan untuk memperluas halaman rumah dan mencegah terjadinya longsor. Akibatnya, luas Sungai Langkap yang 20 tahun sebelumnya berkisar 30 meter, sekarang berkurang menjadi hanya 20 meter.

Sebenarnya kebiasaan membuang limbah rumah tangga di Sungai Langkap sudah dilakukan masyarakat pinggiran Sungai Langkap sejak lama. Sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, masyarakat pinggiran Sungai Langkap juga masih sering melakukan aktivitas di sungai, seperti mandi, mencuci dan buang air besar. Aktivitas tersebut dilakukan karena kondisi dan kualitas air Sungai Langkap pada saat itu juga masih bersih. Pada saat itu jumlah masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Langkap belum sepadat saat ini, dan luas sungai serta debit air Sungai Langkap masih bisa menampung aktivitas masyarakat. Namun saat ini, karena bertambahnya hunian dan jumlah masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Langkap serta ditambah dengan penyempitan lebar

sungai dan berkurangnya debit air sungai, maka Sungai Langkap tidak bisa lagi menampung aktivitas masyarakat sekitar. Kondisi ini menyebabkan kualitas air Sungai Langkap saat ini jauh berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Air Sungai Langkap sudah berubah keruh, berbau dan tercemar akibat dari limbah yang masyarakat buang ke sungai dan saat ini masyarakat tidak lagi dapat beraktivitas di sungai seperti sebelumnya.

Profil Masyarakat Pinggiran Sungai Langkap

Masyarakat yang bermukim di pinggiran Sungai Langkap Desa Tegalpingen masih berpendidikan rendah. Lulusan SD masih mendominasi pada tingkat pendidikan warga. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tinggi belum menjamin seseorang menjadi sukses. Masyarakat lebih memilih mewariskan harta daripada ilmu ke anak-anaknya.

Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pilihan mata pencaharian masyarakat. Bekerja di proyek pembangunan menjadi mata pencaharian yang banyak dipilih masyarakat, karena selain menghasilkan penghasilan yang cukup tinggi, menjadi pekerja proyek pembangunan juga tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Gaji yang didapat dari pekerjaan pemborong proyek pembangunan setiap bulan mencapai Rp6.000.000,00 sampai Rp8.000.000,00. Mayoritas masyarakat yang bekerja di proyek pembangunan adalah para kepala keluarga. Berbeda dengan remaja yang lebih banyak memilih menjadi karyawan pabrik.

Meskipun banyak masyarakat bekerja di proyek bangunan maupun karyawan pabrik, namun kondisi ekonomi sangat baik bahkan dikategorikan kaya. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya syarat dalam indikator masyarakat kaya berdasarkan BPS tahun 2015, seperti kondisi rumah, fasilitas rumah, investasi dan gaji setiap bulan. Mayoritas masyarakat yang bermukim di pinggiran Sungai Langkap memiliki rumah permanen dan bersertifikat bahkan ada beberapa rumah dengan konstruksi dua lantai. Rumah-rumah tersebut berdiri kokoh di sepanjang pinggiran aliran Sungai Langkap. Namun sayang sekali, bangunan rumah masyarakat yang bagus dan kokoh tersebut tidak disertai dengan pembangunan septic tank. Mayoritas masyarakat yang bermukim di pinggiran Sungai Langkap tidak memiliki fasilitas tempat pembuangan limbah, sehingga limbah yang dihasilkan setiap hari dibuang langsung ke sungai. Masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Langkap tidak menganggap pembuatan septic tank ini sebagai sesuatu hal yang penting dan mereka butuhkan. Hal ini sedikit banyak berkaitan dengan persepsi mereka terkait pemanfaatan sungai.

Persepsi Masyarakat Pinggiran Sungai Langkap terhadap Pemanfaatan Sungai

Dalam arti luas persepsi diartikan sebagai pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Palupi, 2014). Persepsi dibangun melalui proses interaksi manusia, baik dengan manusia lainnya maupun dengan lingkungannya. Dalam proses interaksi sosial, para actor terlibat dalam proses saling mempengaruhi. (Ritzer, 2012:632). Demikian juga yang terjadi pada masyarakat pinggiran Sungai Langkap di Desa Tegalpingen. Berikut persepsi masyarakat pinggiran Sungai Langkap terhadap pemanfaatan sungai yang terbangun melalui proses interaksi tersebut:

Sungai sebagai sumber air

Masyarakat di Desa Tegalpingen yang bermukim di pinggiran Sungai Langkap berpersepsi bahwa sungai merupakan sumber air. Sungai bagi masyarakat merupakan tempat air yang banyak. Masyarakat bergantung pada sungai untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Melalui sumur gali yang dibangun di tepian Sungai Langkap, masyarakat menggunakan airnya untuk memenuhi kebutuhan air minum, mandi, mencuci dan kakus. Informasi ini diperoleh dari Wiwin (41 tahun), salah satu warga Desa Tegalpingen:

“Semua masyarakat yang rumahnya di pinggiran sungai mempunyai sumur gali, sumur-sumurnya di tepian sungai mbak, airnya untuk kebutuhan masak, minum, mandi, nyuci, dan untuk kebutuhan WC lah. Ada PDAM cuman sering

mati kalau kemarau jadi masyarakat yang rumahnya di pinggir sungai ini tidak ada yang memakai PDAM. Kita lebih memilih membuat sumur sendiri di sungai tinggal dipasang pompa dan ketika kemarau tidak kering” (wawancara tanggal 17 Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan dari Wiwin, sebenarnya masyarakat sudah memiliki akses terhadap air bersih yang bersumber dari PDAM. Namun karena suplai air dari PDAM yang tidak lancar dan sering mati terutama pada saat musim kemarau, maka masyarakat Desa Tegalpingen membangun sumur gali di tepi Sungai Langkap sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Pembuatan sumur gali ini bukan tanpa risiko. Jarak sumur gali yang dibangun dengan aliran sungai hanya berkisar 1 hingga 3 meter saja, padahal kondisi air Sungai Langkap sudah tercemar oleh aktivitas pembuangan limbah rumah tangga masyarakat sekitarnya. Menurut Yeni (52 tahun), seorang bidan desa, jarak minimal sumber air dengan tempat pembuangan limbah seharusnya 10 meter, sehingga pemanfaatan sumur gali tersebut sangat membahayakan kondisi kesehatan masyarakat. Meskipun air yang didapatkan dari sumur gali tersebut tampak jernih dan tidak berbau, namun terdapat bakteri e-coli yang dapat menyerang sistem pencernaan manusia.

Pembuatan sumur galian di pinggir sungai oleh masyarakat pinggir Sungai Langkap ini bukan tanpa alasan. Desa Tegalpingen termasuk ke dalam daerah sulit air. Sumber air tanah juga tidak mudah ditemukan di sekitar rumah. Apalagi air dari PDAM juga tidak bisa diandalkan karena sering mati. Hal inilah yang membuat masyarakat terpaksa membuat sumur di tepian sungai dengan harapan kebutuhan air sehari-hari dapat tercukupi, sebagaimana yang diungkapkan Wiwin (41 tahun) dalam wawancara berikut:

“Saya buat sumur di pinggir sungai, buat di rumah nggak keluar mbak, sudah 25 meter tetap nggak keluar apalagi kalau musim kemarau benar-benar sumurnya seperti tanah kering. Kalau buat di pinggir sungai kan banyak mata airnya, 4 meter juga sudah cukup, terus kalau kemarau juga nggak bakal kering” (wawancara tanggal 17 April 2018).

Persepsi sungai sebagai sumber air ini muncul sebagai hasil dari proses interaksi masyarakat pinggir Sungai Langkap dengan lingkungan mereka. Selama ini, melalui sumur gali yang dibangun di tepian sungai, sungai menjadi sumber masyarakat pinggir Sungai Langkap dalam memenuhi kebutuhan air.

Sungai sebagai Tempat Pembuangan Limbah

Selain sebagai sumber air, bagi masyarakat pinggir Sungai Langkap sungai juga dianggap sebagai tempat pembuangan limbah. Semua masyarakat yang bermukim di pinggir Sungai Langkap membuang limbah ke sungai. Persepsi sungai sebagai tempat pembuangan limbah diungkapkan Yati (68 tahun) sebagai berikut:

“Sungai ya untuk membuang sampah” (wawancara tanggal 18 April 2018).

Masyarakat memandang sungai sebagai tempat membuang limbah, karena selama ini masyarakat pinggir Sungai Langkap terbiasa membuang limbah rumah tangga ke sungai. Limbah padat dari sampah dapur dikumpulkan di rumah, kemudian dibuang begitu saja di pinggir sungai tanpa melalui proses pemilahan ataupun pengolahan. Demikian juga limbah cair dari aktivitas sehari-hari, yaitu mandi, mencuci, dan kakus, langsung disalurkan melalui pipa-pipa peralon ke sungai. Perilaku masyarakat membuang limbah ke sungai ini sudah dilakukan sejak lama. Perbedaannya, jika sebelumnya pembuangan limbah dilakukan masyarakat langsung bersamaan dengan aktivitas masyarakat mandi, mencuci dan kakus di sungai, sekarang masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas tersebut di rumah dan limbahnya saja yang disalurkan dan dibuang ke sungai. Kondisi ini terjadi karena meskipun masyarakat sudah membangun kamar mandi dan WC di rumah, tetapi masyarakat tidak membuat tempat pembuangan limbah sehingga limbah yang dihasilkan setiap harinya dibuang ke sungai.

Limbah Harus Dibuang, Bukan Disimpan

Sebenarnya secara ekonomi masyarakat pinggiran Sungai Langkap mampu untuk membuat tempat pembuangan limbah (septic tank) di rumah mereka masing-masing, namun alih-alih membuat septic tank, masyarakat pinggiran Sungai Langkap lebih memilih memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga mereka. Hal ini berkaitan dengan persepsi mereka sebagaimana yang diungkapkan Marsi (51 tahun) sebagai berikut:

“Iya yang namanya limbah ya dibuang masa disimpan mbak, kebetulan rumahnya kan sampingnya sungai ya dibuang sekalian ke sungai” (wawancara tanggal 17 April 2018).

Alasan yang mirip juga diungkapkan oleh Wiwin (41 tahun) sebagai berikut:

“Rumah saya dekat dari sungai, jadi lebih mudah kalau membuang limbah ke sungai, tidak akan penuh juga terus kalau banjir limbahnya akan hanyut, jadi ngapain saya susah-susah bikin septic tank” (wawancara pada tanggal 17 April 2018)

Apa yang diungkapkan oleh Marsi dan Wiwin tersebut menggambarkan bahwa masyarakat pinggiran Sungai Langkap menganggap bahwa limbah harus dibuang, sedangkan membuat septic tank sama artinya dengan menyimpan limbah. Dan cara paling praktis dan mudah untuk membuang limbah adalah dengan membuangnya langsung ke sungai.

Faktor yang Melatarbelakangi Pemanfaatan Sungai Langkap sebagai Tempat Pembuangan Limbah

Latar belakang perilaku manusia dalam melakukan aktivitasnya secara umum dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budayanya (Caesarin dan Chorina, 2015). Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling dominan dan cepat memengaruhi masyarakat. Demikian juga dengan perilaku masyarakat pinggiran Sungai Langkap di Desa Tegalpingen yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi perilaku mereka:

Kebiasaan

Kebiasaan adalah perilaku yang sering kita ulang-ulang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dan perilaku atau kebiasaan tersebut sudah kita lakukan sejak kecil hingga dewasa. Kebiasaan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi masyarakat yang bermukim di pinggiran Sungai Langkap membuang limbah ke sungai. Meskipun masyarakat sadar bahwa tindakannya tersebut salah namun masyarakat masih sulit untuk mengubahnya. Masyarakat membuang limbah ke sungai dimulai sejak mereka kecil. Melalui proses sosialisasi dengan melihat dan meniru perilaku orang tua mereka, sebagaimana yang diungkapkan Wiwin (41 tahun) berikut ini:

“Saya membuang limbah ke sungai dari saya kecil sampe sekarang. Dulu orang tua saya juga membuang limbahnya ke sungai mbak, jadi saya ngikutin orang tua saya sampai sekarang, jadi sudah biasa sih mbak dari dulu membuang limbahnya ke sungai” (wawancara tanggal 8 Agustus 2018).

Masyarakat membuang limbah ke sungai karena meniru perilaku orang tua mereka. Secara tidak langsung masyarakat dididik untuk membuang limbah ke sungai sejak mereka kecil. Anak melihat aktivitas orang tua mereka ketika membuang limbah ke sungai, bahkan anak juga disuruh oleh orang tua mereka membuang limbah ke sungai. Didikan orang tua ini melalui proses interaksi antara orang tua dan anak. Menurut interaksionisme simbolik, interaksi antara orang tua dan anak merupakan proses pengaruh-memengaruhi, di mana orang tua memberikan contoh membuang limbah ke sungai kepada anak, dan anak menirukan perilaku orang tua mereka.

Kesadaran Rendah

Berbicara tentang lingkungan hidup, tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusianya. Baik tidaknya ataupun lestari tidaknya suatu lingkungan hidup ditentukan oleh manusia itu sendiri (Susmarkanto, 2002). Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai anggota masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Langkap. Membuang limbah rumah tangga ke sungai merupakan salah satu wujud kurangnya kesadaran lingkungan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Langkap Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Bahkan dampak yang harus mereka hadapi karena kebiasaan membuang limbah ke sungai juga tidak dianggap sebagai hal yang perlu dikhawatirkan, sebagaimana diungkapkan Yayan (40 tahun) berikut ini:

“Limbah ya sebenarnya bau, makanya saya buang ke sungai. Nanti kalau di sungai juga ngalir terbawa aliran sungai. Kalau mengganggu warga yang lewat di jalan dekat sungai ya tinggal pakai masker, orang warga yang dekat rumah saya juga nggak protes” (wawancara tanggal 19 April 2018).

Apa yang diungkapkan Yayan tersebut menunjukkan bahwa selain kesadaran akan kebersihan lingkungan yang masih kurang, masyarakat pinggir Sungai Langkap juga menganggap bahwa bau yang disebabkan limbah yang membusuk adalah konsekuensi yang wajar. Selama tidak ada masyarakat yang mengungkapkan keberatan dengan kondisi tersebut, maka bau limbah yang menyengat tidak menjadi masalah bagi mereka.

Jika masyarakat pinggir Sungai Langkap yang membuang limbah ke sungai merasa tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari limbah yang mereka buang ke sungai, masyarakat Desa Tegalpingen yang tidak membuang limbah ke sungai justru merasa terganggu dengan bau tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ari (28 tahun) sebagai berikut:

“Saya ngerasa keganggu sama bau limbah yang dibuang ke sungai itu mbak, ditambah limbah lele itu mbak. Apalagi kalau pas lewat dekat sungainya itu bau banget mbak” (wawancara tanggal 16 September 2018).

Perbedaan pandangan antara Yayan dengan Ari ini menunjukkan bagaimana persepsi terbentuk melalui interaksi manusia dengan lingkungannya. Yayan yang membuang limbah ke sungai menganggap bau yang timbul adalah hal yang wajar sebagai konsekuensi dari perilaku mereka, sementara Ari yang tidak membuang limbah ke sungai menganggap bau tersebut mengganggu sebagai akibat perilaku orang lain yang tidak dilakukannya.

Tidak Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Desa Tegalpingen

Peran TPS sementara sangat penting bagi masyarakat maupun bagi pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan karena sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka terlebih dahulu diangkut ke TPS sementara, sehingga memudahkan masyarakat untuk membuang sampah. TPS sementara merupakan sarana yang seharusnya dimiliki setiap daerah, namun di Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tidak terdapat TPS maupun TPA. Tidak tersedianya TPS dan TPA ataupun mobil pengangkut sampah di Desa Tegalpingen ini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perilaku masyarakat membuang limbah ke sungai, sebagaimana diungkapkan Yayan (40 tahun) sebagai berikut:

“Nggak ada bak pengangkut sampah soalnya mbak. Biasanya kalau pagi kan ada bak sampah yang ngambil sampah warga seperti dulu waktu saya tinggal di Purwokerto. Lah tinggal di desa ternyata nggak ada bak sampah, ya makanya dibuang ke sungai.” (wawancara tanggal 9 Agustus 2018).

Tidak tersedia TPS di Desa Tegalpingen ini diakui oleh Sobir, Kepala Desa Tegalpingen. Hal ini terjadi karena keterbatasan lahan yang dimiliki desa, sehingga tidak ada lahan lagi yang bisa

dijadikan sebagai TPS. Berikut penjelasan Sobir (45 tahun):

“Di Desa Tegalpingen tidak ada mobil pengangkut sampah jadi masyarakat harus punya tempat pembuangan sampah sendiri. Di desa kan nggak punya TPS atau TPA mbak. Tidak ada lahannya. Lah seharusnya masyarakat sadar karena tidak ada TPS di desa, masyarakat harusnya membuat tempat pembuangan limbah dan sampah sendiri.” (Wawancara tanggal 16 April 2018).

Tidak Ada Sanksi yang Tegas

Salah satu faktor yang melatarbelakangi terus berlangsungnya perilaku masyarakat pinggiran Sungai Langkap di Desa Tegalpingen membuang limbah ke sungai adalah tidak adanya penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang limbah ke sungai. Pihak desa bukannya tidak pernah melakukan pemeriksaan dan inspeksi terhadap kondisi Sungai Langkap. Tidak jarang pihak desa mendapati warganya yang membuang limbah ke sungai, namun sanksi yang diberikan sangat ringan. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat hanya berupa teguran, dan kemudian harus mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di balai Desa Tegalpingen. Sanksi tersebut ternyata tidak memberikan efek jera pada masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan Marsi (51 tahun) sebagai berikut:

“Saya pernah ikut sosialisasi tentang larangan membuang limbah ke sungai. Gara-gara pas ditinjau oleh pihak desa ketahuan masih membuang limbahnya ke sungai jadi disuruh ikut sosialisasi. Sosialisasinya itu masyarakat disuruh untuk membuat sepiteng, ya pas disosialisasi ya kami menghormati menjawab iya nanti mau bikin, tapi sebenarnya pada nggak bikin pas sudah selese sosialisasi. Tidak ada perubahan karena kami tetap membuang limbah ke sungai mbak” (wawancara tanggal 8 Agustus 2018).

Pihak desa telah berupaya mengatasi permasalahan pencemaran sungai yang terjadi di Sungai Langkap. Pihak desa dibantu pihak puskesmas Pengadegan masih mencari solusi yang dapat diterima masyarakat. Awalnya pihak desa pernah memberlakukan sanksi denda sebesar Rp. 500.000,00 kepada masyarakat yang kedapatan membuang limbah ke sungai melalui peninjauan yang diadakan 2 bulan sekali. Namun, sanksi tersebut tidak berjalan karena banyaknya masyarakat yang protes dan tidak ada yang mau membayar denda. Hingga saat ini karena belum adanya sanksi tegas, masyarakat masih membuang limbah ke sungai.

Simpulan

Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sungai bahwa sungai merupakan sumber air sekaligus tempat pembuangan limbah. Masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuatan sumur karena ketika membuat sumur di sekitar rumah sulit menemukan mata air sehingga membuat sumur di tepian sungai. Masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, karena masyarakat menganggap jika membuat sepiteng sama saja menyimpan limbah. Bagi masyarakat pinggiran Sungai Langkap, limbah itu harus dibuang, tidak untuk disimpan. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat membuang limbah ke sungai adalah kesadaran rendah, kebiasaan, tidak tersedia TPS di desa, dan tidak ada sanksi yang tegas dari masyarakat maupun pihak desa.

Daftar Pustaka

- Ajiansyah, Elis dan Surdin. 2016. Deskripsi Kerusakan Bantaran Sempadan Sungai Abaito Sub Das Roraya di Desa Ahuanggului Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi. Vol. 1. No. 1.
- Ashidiqy, Maritsa Rahman. 2009. Analisa Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Masyarakat dalam Membuang Sampah Rumah Tangga di Sungai Mranggan. Skripsi:

Semarang. Universitas Negeri Semarang.

- Badaii, Fawaz Al dkk. 2013. Water Quality Assessment of the Semenyih River, Selangor, Malaysia. *Jurnal Chemistry*. Vol. 2013. Article ID 871056.
- Caesarin, Binar T dan Chorina Ginting. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Permukiman Bantaran Sungai. *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI*.
- Ermawati, Ristie dan Lono Hartanto. 2017. Pemetaan Sumber Pencemar Sungai Lamat Kabupaten Magelang. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. Vol. 9. No. 2.
- Halder, Joshua Nizel dan M. Nazrul Islam. 2015. Water Pollution and Its Impact On The Human Health. *Journal Of Enviroment And Human*. Vol. 2. No. 1.
- Hasibuan, Rosmidah. 2016. Analisis Dampak Limbah/Smaph Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 4. No. 01.
- Hendarto, Kresno Agus. 2005. Persepsi Masyarakat Terhadap Konejra Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung: (Studi Kasus Kelurahan Cipinang Muara dan Kelurahan Bukit Duri). *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Vol. 9. No. 2.
- Latanratu, Sri Haryati Atjo Andi. 2012. Pengendalian Permukiman Kumur Di Sekitar Tanggul Sungai Je'neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa. Skripsi: Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lutfhi, Asma dan Atika Wijaya. 2011. Persepsi Masyarakat Sekaran Tentang Konservasi Lingkungan. *Jurnal Komunitas*. 3 (1), 29-39. ISSN 2086-5465.
- Mahyudin dkk, 2015. Analisis Kualitas Air Dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Metro di Kola Kepanjen Kabupaten Malang. *J-PAL*. Vol. 6. No. 2.
- Mokodongan, Budi Kurniawan dkk. 2014. Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Bantaran Sungai Dayanan Di Kotamobagu. *Sabua*. Vol. 6. No. 3.
- Murningsih, Dwi. 2016. Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Sungai (Studi Fenomenologi mengenai Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Sungai pada Masyarakat Bantaran Sungai Tegal Konas Surakarta). Skripsi: Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Natsir, Sofyan. 2016. Rencana Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Di Sekitar Aliran Sungai Mangolo Kabupaten Kolaka. Tesis: Kendari. Universitas Halu Oleo.
- Nugroho, Hafidz Bhaktiyar Jati, A.A. Arsi, & N.S. Akhiroh. 2017. Perilaku Sosial Remaja dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan (Studi Kaus Pemanfaatan Taman Kota Pleret Banjir Kanal Barat Semarang). *Jurnal Solidarity*. Vol. 6. No. 1.
- Palupi, Lutfi Kristiana. 2014. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. Skripsi: Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta
- Putranto, Edwin Dwi. 2017. 75 Persen Air Sungai Indonesia Tercemar Berat, (Online), ([https://www. republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk-75-persen-air-sungai-indonesia-tercemar-berat](https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk-75-persen-air-sungai-indonesia-tercemar-berat)). Diakses 20 Maret 2018.
- Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sonta, Maritsa Anwari, Gunawan, & A.A. Arsi. 2017. Strategi Adaptasi Ekologi Masyarakat dalam Menghadapi Pencemaran Limbah Produksi Batik (Studi Etnoekologi di Daerah Aliran Sungai Setu, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. *Jurnal Solidarity*. Vol. 6 No. 2.
- Sudarmadji dan Hamdi. 2013. Tangki Septik dan Peresapannya Sebagai Sistem Pembuangan

Gita Saputri, Antari Ayuning Arsi

Air Kotor Di Permukiman Rumah Tinggal Keluarga. PILAR. Vol. 9. No. 2.

Suparjo, Mustofa Niti. 2009. Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang. Jurnal Saintek Perikanan. Vol. 4. No. 2.

Susmarkanto. 2002. Pencemaran Lingkungan Perairan Sungai Salah Satu Faktor Penyebab Banjir Di Jakarta. Jurnal Teknologi Lingkungan. Vol. 3. No. 1



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Halaman 47-59



Pembentukan Perilaku Kewirausahaan Tunanetra melalui *Come_Unity* Sahabat Mata di Kota Semarang

Toyibah

Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang

Asma Luthfi

Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang

Kata Kunci	Abstrak
Kewirausahaan Komunitas Pembentukan Perilaku Tunanetra	Penyandang tunanetra merupakan kelompok sosial yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang lemah atau tidak berdaya dalam masyarakat. Kehadiran Komunitas <i>Come_Unity</i> Sahabat Mata sebagai lembaga yang konsen pada penyandang tunanetra dapat memberi tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha sehingga para penyandang tunanetra memiliki kemandirian. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan perilaku kewirausahaan tunanetra melalui <i>Come_Unity</i> Sahabat Mata di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis riwayat hidup (life history). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan: (1) alasan para tunanetra tertarik menjadi anggota, karena ingin menambah wawasan dan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan meningkatkan usaha. (2) proses pembentukan perilaku kewirausahaan, melalui tiga tahapan; menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri, cerita kisah sukses, dan pengembangan keterampilan melalui pelatihan pijat, komputer bicara, huruf braille, dan penyiaran radio. (3) perilaku kewirausahaan yang terbentuk, Di antaranya tekun, ulet, sabar, istiqamah, berani mengambil risiko, manajemen waktu, kreatif dan inovatif. Adapun kemandirian ekonomi yang dimiliki yaitu usaha pijat, obat herbal, pulsa, dan peralatan listrik offline dan online.
Diterima	5 Maret 2019
Review	28 Maret 2019
Revisi	10 April 2019
Penerimaan	18 April 2019
Copyedit	25-28 Juni 2019
Publikasi	30 Juni 2019



ISSN 2685-483X

Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019

Pages 47-59



Entrepreneurship of Blind People through the *Come_Unity* Sahabat Mata Community in Semarang

Toyibah

Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang

Asma Luthfi

Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang

Keywords	Abstract
Behavioral Formation Blind People Community Entrepreneurship	Blind people are social group who is stereotyped as weak and powerless group of people among society. The presence of <i>Come Unity Sahabat Mata Community</i> as an institution focusing on blind people can provide additional knowledge and skills in developing a business so that blind people can be independent. This article aims to find out the entrepreneurial behaviors formation for the blind people through <i>Come Unity Sahabat Mata Community</i> in the Semarang City. This study uses qualitative research method along with life history analysis as an analyzing method. The results of the research shows: (1) the reason for blind people interesting becomes a member is because they want to add insight and knowledge, improve skills and increase their business. (2) the process of forming entrepreneurial behavior divided into three stages; foster motivation and confidence, stories of success stories, and skills development through massage training, speech computers, braille and radio broadcasting. (3) entrepreneurial behavior that formed are perseverance, tenacity, patience, <i>istiqamah</i> (consistent and resilience), dare to take risks, time management, creative and innovative. In addition, the economic independence owned are massage, herbal medicine, credit, and offline-online electrical equipment business.
Submission	5 Maret 2019
Review	28 Maret 2019
Revision	10 April 2019
Acceptance	18 April 2019
Copyediting	25-28 Juni 2019
Publication	30 Juni 2019

Ucapan Terima Kasih/Pengakuan

Terimakasih kepada Bapak Basuki Pengelola Komunitas *Come_Unity Sahabat Mata* yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi data penelitian. Seluruh informan yang telah membantu dan memberikan data informasi terkait penelitian. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penyusunan tulisan ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Acknowledgement

The authors hereby convey their appreciation to Mr. Basuki, the manager of the *Come_Unity Sahabat Mata* community for granting research permission and being supportive in the gathering of research data, to all of our informants who cooperated in the data gathering, and all parties involved in this research as well as in the article writing process, of which the authors cannot mention them individually.

Pendahuluan

Salah satu keterbatasan fisik yang dialami oleh orang-orang penyandang disabilitas adalah tidak berfungsinya mata sebagai jendela dunia. Penyebutan bagi seseorang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan disebut tunanetra. Secara umum, kondisi fisik tunanetra yaitu hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit, sehingga seseorang yang memiliki keterbatasan penglihatan tersebut mengalami hambatan dalam bermobilitas gerak (Pravitasari, dkk. 2014). di Kota Semarang berdasarkan data BPS Kota Semarang Tahun 2013 tunanetra berjumlah 806 orang (Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id>).

Dari banyaknya tunanetra di Kota Semarang tentu masalah yang mereka hadapi juga sangat kompleks. Baik masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Masalah ekonomi salah satunya adalah sulitnya tunanetra mendapatkan pekerjaan dengan sebab keterbatasan yang mereka miliki. Hal ini juga disebabkan cara pandang masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan orang-orang disabilitas adalah sebagai urusan individu, meskipun sebagian lainnya juga menganggap sebagai urusan sosial. Sementara itu, ada sekitar 60% orang-orang penyandang disabilitas di Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan (PPLS, 2011 dalam <https://solider.or.id>, 2014).

Beberapa solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah atau sebagai penyetaraan hak dan kewajiban tunanetra di Indonesia, di antaranya adalah pertama, melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kedua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dimana peluang untuk mendapatkan kesamaan kesempatan, seperti pendidikan, ketenagakerjaan/pekerjaan, iklim usaha perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya secara resmi telah dijamin oleh undang-undang.

Secara ideal, Undang-undang di atas menunjukkan perhatian yang lebih bagi tunanetra, hanya saja secara kondisi riil di lapangan masih banyak tunanetra di Kota Semarang mengalami kesulitan. Beberapa tunanetra pada umumnya mengalami kesulitan untuk memperoleh akses seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan fasilitas-fasilitas umum. Dari total 3,75 juta para penyandang tunanetra di Indonesia, rata-rata mereka masih hidup prasejahtera lantaran minimnya akses pendidikan bagi mereka (<http://harianjogja.com>, 2017). Selain itu, penyandang tunanetra selama ini memiliki stereotip sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan menjadi benalu bagi keluarga maupun masyarakat. Sebagaimana yang dilansir PoskotaNews.com terkait Sekeluarga Tunanetra Mengemis, Diamankan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan” (Sumber: <http://poskotaNews.com>, 2015). Dari fenomena yang terjadi, terdapat penyandang tunanetra yang memilih memenuhi kebutuhan hidup dari berwirausaha, yaitu penyandang tunanetra yang bergabung menjadi anggota Komunitas *Come_Unity Sahabat*

Mata di Kota Semarang. Melalui pendidikan nonformal yang diadakan di komunitas tersebut, para penyandang tunanetra dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Keberadaan Komunitas Sahabat Mata menjadi salah satu solusi bagi tunanetra untuk mendapatkan akses pendidikan. Beberapa program pendidikan yang terdapat di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata adalah pembelajaran alquran Braille, komputer bicara, radio, dan pijat. Di antara program-program tersebut, program komputer bicara dan pijat diusahakan untuk meningkatkan keterampilan membangun usaha bagi penyandang tunanetra. Program pendidikan seperti komputer bicara dan pemijatan diharapkan mampu membentuk perilaku wirausaha bagi penyandang tunanetra. Kewirausahaan sangat memungkinkan bagi tuna netra untuk menyesuaikan pekerjaan mereka dan mengakomodasi keterbatasan mereka. Dengan berwirausaha, para penyandang disabilitas juga tidak terikat oleh aturan-aturan majikan yang memungkinkan mereka mengalami kesenjangan (Balcazar, dkk., 2014; dan Renko, dkk., 2016).

Para Tuna netra yang telah mendapatkan pelatihan-pelatihan di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata, memiliki usaha sendiri dalam meningkatkan taraf hidup baik secara ekonomi maupun sosial. Pembentukan jiwa atau perilaku kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang berasal dari dalam diri wirausahawan dapat berupa sifat-sifat personal, kemauan, pengalaman, motivasi, kepercayaan diri, hak kepemilikan, kemampuan atau kompetensi, dan insentif. (Amin, 2015; Sapar, dkk., 2006; Ranto, 2016; Atmaja dan Margunani, 2016; Listyaningrum dan Wahyudin, 2017; Soimah dan Rahayu, 2013). Faktor eksternal yang berasal dari luar diri wirausahawan meliputi, (1) lingkungan pendidikan baik formal, nonformal maupun informal, (2) kebijakan pemerintah, (3) model peran, (4) peluang, dan (5) sumber daya (Zhou Hong, dkk., 2012; Azwar, 2013; Kusumandari, 2013; Marganingsih, 2013; Bukirom, dkk., 2014; Susanti, 2014; Mulyono, 2015; Rosmiati, dkk., 2015; Nurfitriana, dkk., 2016; Widayat dan Ni'matuzahroh, 2017).

Pendidikan nonformal yang diusahakan oleh Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata, pada kenyataannya memberi kontribusi bagi para alumni untuk memanfaatkan keterampilan-keterampilan yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan di Komunitas Sahabat Mata untuk memulai atau mengembangkan wirausaha. Keberadaan *Come_Unity* Sahabat Mata sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok sosial yang menaungi orang-orang penyandang tunanetra dan memberikan dampak positif bagi penyandang tunanetra. Dengan berbagai macam pelatihan di *Come_Unity* Sahabat Mata, tunanetra memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikembangkan. Melalui keterampilan ini, beberapa alumni *Come_Unity* Sahabat Mata dapat membangun usaha mandiri yang tidak bergantung orang lain. Berdasarkan hal tersebut, dalam artikel ini, penulis menyoroti pembentukan perilaku kewirausahaan tunanetra melalui *Come_Unity* Sahabat Mata di Kota Semarang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di wilayah Kota Semarang yakni Kecamatan Mijen tepatnya di Kelurahan Jatisari dan Polaman, serta Kecamatan Ngaliyan tepatnya di Kelurahan Purwoyoso. Para informan dalam penelitian ini adalah tiga informan utama yang merupakan anggota alumni, dan informan pendukung yaitu pengelola, anggota aktif, serta istri dari anggota alumni Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata. Lokasi rumah yayasan Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata itu sendiri yakni di perumahan BSB Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata dan gambar saja. Jika ada angka-angka maka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain transkrip, wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, dan catatan lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengalaman hidup (*life history*) yaitu bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu-individu tertentu sebagai warga dari suatu masyarakat yang sedang menjadi objek penelitian (Sudikan dalam Bungin (ed.) 2008). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik

pengumpulan data lebih banyak pada observasi dan wawancara mendalam (Sugiyono, 2010). Jadi, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan observasi yaitu pengumpulan data dengan kunjungan dan pengamatan ke Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata dan rumah dari masing-masing anggota alumni. Selanjutnya pengumpulan data dengan interview yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan 8 orang narasumber yaitu Jito (32 tahun), Abdul Manan (41 tahun), Amin Masyhar (46 tahun), Basuki (46 tahun), Surdini (28 tahun), Arif Fathoni (27 tahun), Qanaah (55 tahun), Mahmudah/Ida (30 tahun). Sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari foto langsung saat wawancara, dan observasi dilaksanakan.

Temuan dan Pembahasan

Alasan Tunanetra Tertarik menjadi Anggota Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata di Kota Semarang

Menambah Wawasan dan Pengetahuan

Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata yang menaungi para tunanetra dalam proses belajar memiliki beberapa program yang dapat membantu menambah wawasan atau pengetahuan bagi para tunanetra. Beberapa program belajar yang terdapat di Komunitas Sahabat Mata Di antaranya, adalah program belajar komputer bicara, pijat, membaca dan menulis huruf braille, dan penyiaran radio. Para tunanetra yang bergabung menjadi anggota memilih sendiri program belajar yang mereka inginkan atau menyesuaikan kebutuhan sehingga melalui program pembelajaran yang mereka ikuti dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan perilaku yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Meningkatkan Keterampilan

Kegiatan pendidikan nonformal yang diusahakan melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata, selain bekal kognitif, juga mengusahakan bekal keterampilan bagi para anggota komunitas untuk mencapai kehidupan bermasyarakat secara mandiri. Berdasarkan hasil penelitian ini terkait meningkatkan keterampilan melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata yakni Abdul Manan (41 tahun) yang pada awalnya sudah memiliki pengetahuan tentang pijat, hasil dari proses pendidikan informal sewaktu di Medan tempat dahulu ia tinggal. Kemudian di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata juga mengikuti pelatihan pijat sehingga dapat membantu meningkatkan keterampilan pijat yang sebelumnya telah dimiliki. Hasil dari pelatihan yang telah diikuti di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata oleh Abdul Manan (41 tahun) juga dimanfaatkan dalam membuka sebuah usaha pijat yang telah dimulai sejak tahun 2011.

Hal yang sama juga dirasakan oleh anggota aktif di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Arif Fathoni (27 tahun) selaku anggota aktif di komunitas tersebut mengungkapkan bahwa keberadaan Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata sangat memberikan pengaruh pada dirinya. Arif Fathoni (27 tahun) yang mengalami tunanetra sejak tahun 2012, kehidupan yang ia jalani hanya mengenal lingkungan rumah, mengurung diri, bergantung pada orang lain dan tidak mengenal dunia luar. Namun, setelah bergabung menjadi anggota di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata, Arif Fathoni (27 tahun) bisa kemana-kemana, berani pulang ke Palembang seorang diri, memiliki banyak kawan, dan bisa menggunakan handphone dan komputer. Selain itu, Arif Fathoni (27 tahun) juga mendapatkan bekal pengetahuan seperti komputer bicara, radio, music, teater dan kebencanaan. Ia juga dapat meningkatkan bakat bermusiknya yang telah ia dapatkan selama berkuliah di jurusan seni musik sampai semester 6. Adapun keterampilan lain yang Arif Fathoni (27 tahun) dapatkan adalah audio editing, komputer, dan *public speaking*.

Meningkatkan Usaha

Pengetahuan dan keterampilan sangat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat terutama dalam dunia kerja. Setelah dibekali pengetahuan dan keterampilan anggota alumni dapat memanfaatkan ilmu yang telah didapat baik untuk membuka usaha atau meningkatkan usaha yang telah dijalankan. Salah satu informan utama yang menjadi anggota Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata telah memiliki usaha mandiri sebelum bergabung menjadi anggota Sahabat Mata adalah Amin Masyhar (46 tahun). Alasan ia bergabung menjadi anggota Sahabat Mata adalah untuk belajar komputer bicara sebagai kebutuhan primer dalam dunia usaha. Penglihatan yang semakin menurun menyebabkan Amin Masyhar (46 tahun) kesulitan membaca dan menulis secara manual, tanpa teknologi yang menunjang. Akhirnya pada tahun 2010, Amin Masyhar (46 tahun) menemukan solusi melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata untuk belajar komputer bicara. Setelah satu bulan pelatihan, setiap hari selama satu jam akhirnya Amin Masyhar (46 tahun) pun memiliki pengetahuan dan keterampilan komputer bicara. Melalui keterampilan komputer bicara dalam dunia usaha bagi Amin Masyhar (46 tahun) menjadi pendukung utama dalam berwirausaha sejak penglihatannya terus menurun.

Proses Pembentukan Perilaku Kewirausahaan Tunanetra melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata

Motivasi dan Kepercayaan Diri

Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata memberikan motivasi berupa sikap semangat bahwa ketunanetraan bukanlah suatu hal yang mustahil untuk tetap menggali potensi diri agar mampu hidup seperti masyarakat awas pada umumnya yang memiliki bakat dan keterampilan. Motivasi yang diberikan disadari atau pun tidak disadari mengubah pola pikir dan tertanam kuat dalam diri individu dalam hal ini tunanetra yang telah mendapatkan sosialisasi melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata. Penanaman nilai seperti pemberian motivasi yang terjadi secara terus menerus mempengaruhi kehidupan para tunanetra yang berimplikasi terhadap perilakunya. Hal tersebut memunculkan suatu cara berpikir yang berbeda dari sebelumnya. Sosialisasi yang berulang-ulang dilakukan kemudian menjadi suatu kebiasaan individu dalam bertindak maupun berinteraksi sosial. Pemberian motivasi dan kepercayaan diri merupakan salah satu penanaman nilai sosialisasi yang bertujuan membentuk sikap mental tunanetra agar memiliki pola pikir yang berbeda dari sebelumnya.

Berdasarkan ungkapan Abdul Manan (41 tahun), motivasi yang diberikan selama pelatihan terkait kewirausahaan salah satunya adalah gambaran tentang usaha yang paling mudah dilakukan oleh tunanetra yakni pemijatan. Perilaku kewirausahaan juga dibentuk dengan adanya motivasi untuk tetap berusaha, jangan takut mencoba hal baru, dan tetap optimis. Selain itu, juga terdapat penanaman moral “menjadi seseorang yang tidak membebani, dan berusaha untuk terus bermanfaat” secara terselubung juga diinterpretasikan sebagai motivasi yakni salah satu wujud bermanfaat bagi orang lain adalah berkarya membuka usaha mandiri, sehingga ada kemandirian baik untuk diri sendiri, terutama keluarga dan kehidupan di masyarakat. Harapan adanya Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata berdasarkan hasil wawancara dengan anggota aktif di komunitas tersebut juga berkaitan dengan kemandirian mereka baik untuk diri mereka sendiri, keluarga, maupun kehidupan di lingkungan masyarakat.

Cerita Kisah Sukses

Kewirausahaan akan melibatkan pembentukan sikap (*attitude*), pengembangan keterampilan (*skill*), dan pembekalan pengembangan (*knowledge*) (Ranto,2016). Dengan demikian, kewirausahaan merupakan potensi seseorang untuk dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pengalaman, tantangan, dan keberanian untuk mengambil risiko dalam bekerja atau menciptakan pekerjaan (Ranto, 2016). Dalam penelitian ini, pembentukan perilaku kewirausahaan tunanetra melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata salah satunya dengan pengenalan dari pengalaman para tunanetra yang telah menjadi wirausaha. Pengenalan tersebut memiliki tujuan untuk mendorong anggota Sahabat Mata agar memiliki sikap atau perilaku wirausaha, melalui pelatihan yang diusahakan Sahabat Mata juga diharapkan mampu

mengembangkan keterampilan dan dengan bekal pengetahuan yang telah didapatkan mampu memberikan arah untuk memanfaatkan peluang berwirausaha.

Pembentukan perilaku kewirausahaan tunanetra melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata salah satunya dengan pengenalan dari pengalaman para tunanetra yang telah menjadi wirausaha. Pengenalan tersebut memiliki tujuan untuk mendorong anggota Sahabat Mata agar memiliki sikap atau perilaku wirausaha, melalui pelatihan yang diusahakan Sahabat Mata juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan dan dengan bekal pengetahuan yang telah didapatkan mampu memberikan arah untuk memanfaatkan peluang berwirausaha. Pembentukan perilaku kewirausahaan tunanetra yang diusahakan oleh Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata salah satunya adalah melalui cerita kisah sukses tentang para tunanetra yang berhasil menjadi pengusaha. Secara langsung maupun tidak langsung pengenalan tersebut memberikan manfaat pada para tunanetra untuk tidak pesimis, yang penyebabnya bisa karena faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internalnya adalah dalam diri tunanetra sendiri yang masih memiliki mindset 'berhak dibantu'. Faktor eksternalnya adalah lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki cara pandang negatif tentang ketunanetraan. Pilihan tunanetra bergabung menjadi anggota Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata juga mempengaruhi pola pikir dan lingkungan eksternal yang dihadapi serta cara pandang dengan dunia luar pun berbeda. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi tunanetra yang ikut bergabung di Komunitas tersebut sehingga memunculkan perasaan senang sekaligus kesadaran makna Sahabat Mata bagi mereka.

Pengembangan Keterampilan

Pengembangan keterampilan yang diusahakan melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata, meliputi: Komputer bicara, pijat, menulis dan membaca huruf braille, dan penyiaran radio. Setiap anggota di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata memiliki alasan berbeda-beda saat kali pertama bergabung. Namun, memiliki tujuan yang sama yakni belajar untuk menuju kehidupan yang mandiri. Pelatihan komputer bicara, pijat, baca-tulis braille, dan penyiaran radio menjadi aktivitas yang berulang-ulang dilakukan oleh para tunanetra sehingga menjadi kebiasaan. Melalui pelatihan yang diadakan di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata, para tunanetra mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan bersosialisasi di masyarakat, termasuk dalam dunia kerja.

Dalam hal ini, secara langsung maupun tidak langsung melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata telah melakukan pemberdayaan yang dilakukan dengan cara jalur pendidikan nonformal di komunitas tersebut guna kemandirian tunanetra. Menurut Payne, 1997 (dalam Masrukin, dkk., 2013) bahwa pemberdayaan adalah *"to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients"*.

Perilaku Kewirausahaan yang Terbentuk melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata

Berkaitan dengan perilaku kewirausahaan yang telah dimiliki oleh ketiga informan utama yakni Jito (32 tahun), Abdul Manan (41 tahun), dan Amin Masyhar (46 tahun). Perilaku seperti ketekunan, ulet, sabar, istikamah atau konsisten, kreatif, inovatif, manajemen waktu, dan berani mengambil risiko merupakan suatu yang telah terbentuk selama mereka menjalani wirausaha. Perilaku-perilaku tersebut kemudian secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadikan usaha yang dijalankan tetap berjalan dari tahun ke tahun. Perubahan baik lingkungan fisik maupun sosial dalam menghadapi persaingan dari dalam maupun dari luar mampu teratasi satu demi satu dengan perilaku-perilaku kewirausahaan yang telah terbentuk.

Menurut Nedler (Dirlanudin 2010 dalam Nursiah, dkk. 2015), menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang individu dengan lingkungan akan membentuk perilaku secara langsung, baik perilaku dalam berwirausaha atau bisnis. Begitu dengan perilaku kewirausahaan yang dijalani oleh Jito (32 tahun), Abdul Manan (46 tahun), dan Amin Masyhar (46 tahun), yang juga

dipengaruhi dari keinginan individu sendiri dan didukung oleh lingkungan.

Ketekunan dan Keuletan

Ketekunan dan keuletan merupakan suatu perilaku yang menggambarkan seorang wirausaha memiliki karakter kegigihan serta kesabaran dalam menjalankan usaha terutama pada saat menghadapi kendala. Dalam penelitian ini, ketekunan dan keuletan yang dimiliki Jito (32 tahun), Abdul Manan (41 tahun), dan Amin Masyhar (46 tahun) juga tercermin dari kegigihan dan kesabaran mereka dalam menghadapi kendala atau hambatan usaha yang mereka jalani.

Berdasarkan hasil penelitian, cara yang dilakukan Jito (32 tahun) dalam menghadapi hambatan usaha pijat adalah dengan menambah wawasan di internet, bertanya ke teman yang juga membuka usaha pijat, dan berdiskusi dengan istri terkait panggilan dari pelanggan. Adapun, cara yang dilakukan Abdul Manan (41 tahun) dalam menghadapi hambatan usaha pijat adalah meningkatkan kemampuan skill pijat, meningkatkan promosi dan meningkatkan keyakinan kepada Allah SWT bahwa rezeki itu pasti ada. Sementara cara yang dilakukan Amin Masyhar (46 tahun) dalam menghadapi hambatan usaha peralatan listrik terkait pelayanan pada pelanggan adalah dengan cara mengelola atau penguasaan emosi supaya pelayanan tetap maksimal dan terselesaikan dengan baik. Selain itu, Amin Masyhar (46 tahun) juga memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat, memanfaatkan internet untuk mencari informasi, *update* penjualan *online*, atau untuk *refreshing*. Berkaitan dalam penelitian ini, perilaku ketekunan dan keuletan ini ditunjukkan dengan kegigihan menekuni usaha yang selama ini Jito (32 tahun), Abdul Manan (41 tahun), dan Amin Masyhar (46 tahun) dan perilaku tersebut terimplementasi dari cara mereka dalam menghadapi hambatan yang dijalani.

Sabar dan Istiqamah

Timmons dalam Maharani, 2013 (dalam Mochlasi dan Krisnawati, 2016: 82) menyatakan bahwa salah satu perilaku kewirausahaan yaitu komitmen, adalah salah satu perilaku kewirausahaan yang berpengaruh terhadap persoalan dalam mengatasi hambatan yang ditemui oleh wirausahawan dan dapat menutupi kelemahan dan kekurangannya dalam berwirausaha. Wirausahawan yang sukses memiliki keberanian, disiplin kerja yang tinggi, kerja keras dalam usahanya dan tahan terhadap kesulitan. Berkaitan dalam penelitian ini, Perilaku sabar dan istiqamah yang dimiliki Jito (32 tahun), Abdul Manan (41 tahun), dan Amin Masyhar (46 tahun) tercermin dari cara mereka mempertahankan usaha serta dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, perilaku sabar dan istiqamah terimplementasi dari cara mempertahankan usaha oleh Jito (32 tahun) dan istrinya yaitu Ida (30 tahun), serta dari Amin Masyhar (46 tahun) bahwa perilaku sabar dan istiqamah sangat penting bagi seorang wirausaha dalam mempertahankan usaha dari tahun ke tahun supaya tetap berjalan. Hal ini dibuktikan dengan usaha peralatan listrik yang dijalankan Amin Masyhar (46 tahun) yang telah menjalankan usaha peralatan *offline* selama 20 tahun, dan usaha peralatan online yang telah berjalan selama 5 tahun ini bisa berjalan dengan berupaya untuk istiqamah, kontinu dan konsisten terhadap usaha yang dijalankan dengan cara tetap membuka toko setiap hari dan meng-*update* di *website* miliknya untuk usaha online.

Berani Mengambil Risiko dan Manajemen Waktu

Keberanian seseorang dalam mengambil risiko didukung oleh pengetahuan, pengalaman, kekuatan modal, serta kemampuan dalam menanggapi perubahan atau mengambil peluang, serta kreatif dan inovatif (Nursiah, dkk. 2015: 150). Dalam penelitian ini, Abdul Manan (41 tahun) memiliki perilaku berani mengambil risiko salah satunya melalui tetap memiliki stok deposit untuk penjualan usaha pulsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Manan (41 tahun), perilaku berani mengambil risiko dengan cara tetap menyetok deposit, Abdul Manan (41 tahun) dalam menjalankan usaha pulsa tidak mudah khawatir tentang situasi yang serba tidak pasti apakah usahanya

akan bisa membuahkan hasil sebagai upaya perilaku dalam mempertahankan usaha. Selain itu, pengalaman usaha pulsa yang dijalankan sudah tiga kali sebelum Abdul Manan (41 tahun) tunanetra juga mempengaruhi tingkat keberanian untuk tetap menjalankan usaha tersebut. Perilaku berani mengambil risiko yang dimiliki Abdul Manan (41 tahun) juga bertujuan untuk mempertahankan pelanggan, yang salah satunya tidak membuat pelanggan kecewa terhadap usaha pulsa yang dijalankan Abdul Manan (41 tahun). Selain perilaku keberanian mengambil risiko, perilaku manajemen waktu juga sangat penting bagi seorang wirausaha.

Kreatif dan Inovatif

Holt dan Drucker (dalam Riyanti, 2003) menyatakan pentingnya sebuah inovasi dan menegaskan bahwa keberhasilan seorang wirausaha adalah harus memiliki karakter kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah menghasilkan ide atau gagasan baru tanpa harus merealisasikan gagasan tersebut atau merupakan prasyarat inovasi, sedangkan inovasi adalah aplikasi dari gagasan-gagasan kreatif. Berkaitan dalam hal ini, perilaku kewirausahaan seperti inovatif dan kreatif juga dimiliki oleh Amin Masyhar (46 tahun) bahwa ia merakit sendiri kabel untuk stop kontak, steker. Hal tersebut dilakukan karena curahan dari pelanggan yang menceritakan produk yang telah dibeli cepat rusak. Akhirnya dengan pertimbangan, Amin Masyhar (46 tahun) merakit kabel untuk stop kontak dan steker berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang ia miliki. Selain istikamah atau konsisten dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas juga sangat dibutuhkan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Amin Masyhar (46 tahun) dalam berwirausaha. Hobinya pada bidang elektronik membuat Amin Masyhar (46 tahun) berinisiatif merangkai kabel sendiri untuk stop kontak, steker, dan lain-lain.

Ada pepatah yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Untuk itu, sebagai wirausaha harus membuat pembeli merasa senang agar secara sukarela menjadi pelanggan. Adapun yang dilakukan Amin Masyhar (46 tahun) dalam menyiasati rasa senang terhadap pembeli adalah dengan menjual barang yang berkualitas tinggi sehingga pelanggan tidak merasa kecewa dengan barang dibeli. Sebab, Amin Masyhar (46 tahun) juga memegang pedoman bahwa dalam memberi saja manusia dianjurkan untuk memberikan yang terbaik, apalagi dalam berjualan yang notabene pembeli mengeluarkan materiil untuk mendapatkan barang diinginkan. Sementara untuk masalah laku atau tidak, dari Amin Masyhar (46 tahun) sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan karena justru menjual barang dengan kualitas bagus adalah dapat memuaskan batinnya pula. Salah satu bentuk inovatif yang dilakukan Amin Masyhar (46 tahun) adalah dengan merakit sendiri kabel untuk stop kontak atau steker, ia juga memanfaatkan waktu luang yang tersedia untuk membuat rakitan kabel tersebut.

Bentuk Kemandirian Ekonomi Anggota Komunitas Come_Unity Sahabat Mata, Kota Semarang

Usaha Pijat

Salah satu dampak pembentukan perilaku kewirausahaan tunanetra melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata terhadap kemandirian ekonomi adalah usaha pijat yang dijalankan oleh Jito (32 tahun) sebagai anggota alumni Komunitas Sahabat Mata. Berdasarkan hasil penelitian, Jito (32 tahun) telah memulai usaha mandiri pijat sejak tahun 2011. Sebelum membuka usaha mandiri pijat, Jito (32 tahun) pada tahun 2010 magang di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata. Sementara untuk usaha mandiri yang dijalankan oleh Jito (32 tahun) yang dengan modal dari tabungan pernikahan untuk mengontrak rumah dan sekaligus usaha pijat. Jito (32 tahun) memulai usaha pijat dengan modal uang tabungan pernikahan. Awal membuka usaha pijat, pasien yang datang berkisar 15 orang yang pada saat itu tarif pijat adalah Rp. 30.000,00. Penghasilan Jito (32 tahun), menurutnya masih mencukupi untuk kebutuhan makan, membayar kontrakan, dan sebagainya.

Sementara untuk sosialisasi awal memperkenalkan usaha pijat yang dilakukan oleh Jito (32 tahun) dan istri adalah dengan membagikan brosur. Pada awalnya Jito (32 tahun) dan istrinya mengalami kebingungan cara membagikan brosur tersebut, sampai akhirnya dibagikan sendiri ke tempat-tempat yang cukup ramai banyak orang. selain brosur, Jito (32 tahun) dibantu istrinya yang tidak tunanetra juga memasang plang, membeli papan nama, kartu

nama, beli kasur, dan minyak pijat sebagai kebutuhan usaha pijat. Selain modal uang tabungan pernikahan, Jito (32 tahun) juga mendapatkan tambahan modal material dari Komunitas *Come_Unity* Mata yakni berupa dipan, kipas angin, korden, minyak-minyak, dan kayu pijat. Modal tersebut memiliki fungsi tambahan juga bagi Jito (32 tahun) selain modal skill dan modal manusia (human capital) itu sendiri. Dalam berwirausaha, modal keterampilan dan finansial juga memiliki arti penting di samping sikap kepercayaan diri dan keberanian dalam memulai usaha.

Selain Jito (32 tahun), usaha pijat juga dijalankan oleh Abdul Manan (41 tahun). Pijat merupakan salah satu usaha mandiri yang dijalankan oleh Abdul Manan (41 tahun) setelah menikah pada tahun 2011. Setelah memutuskan untuk menikah dan menetap di kediaman sang istri di Jawa, Abdul Manan (41 tahun) membuka usaha pijat sebagai mata pencaharian dalam memenuhi tanggung jawab sebagai suami dan kebutuhan keluarga. Menurut Abdul Manan (41 tahun), selain bekal pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata hal paling menarik menjadi anggota di komunitas tersebut adalah jodohnya yang dipertemukan dengan anggota komunitas itu pula dan menikah pun di Rumah Sahabat Mata.

Faktor pendorong Abdul Manan (41 tahun) membuka usaha pijat adalah dorongan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan mengemban tanggung jawab berumah tangga. Melalui bekal keterampilan pijat yang telah diajarkan orang tuanya dahulu selama di Medan dan keterampilan pijat selama mengikuti pelatihan di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata. Kemudahan membuka usaha pijat Di antaranya tempat yang sudah ada dan skill yang sudah dimiliki. Bagi Abdul Manan (41 tahun) yang basis keilmuannya adalah agama sehingga pemahaman agama juga diterapkan dalam berwirausaha salah satunya adalah nilai kepasrahan kepada Tuhan yang mendorong keyakinan bahwa segala rezeki datangnya dari Tuhan. Selain itu, solusi dari hambatan berwirausaha yang dilakukan adalah meminjam modal dalam jangka pendek, dan memperkuat sosialisasi dengan pemasangan plang. Selain itu, cara yang dilakukan Abdul Manan (41 tahun) supaya usaha pijat tetap bertahan adalah dengan meningkatkan kemahiran skill pijat, peningkatan promosi dan keyakinan bahwa rezeki dari Allah SWT pasti ada.

Usaha Obat Herbal

Selain pijat, usaha yang dikembangkan oleh Abdul Manan (41 tahun) adalah obat herbal dan pulsa. Usaha obat herbal dimulai sejak tahun 2012. Awal mula usaha obat herbal yakni Abdul Manan (41 tahun) membutuhkan obat herbal untuk keperluan pijat. Ia pesan ke temannya dan temannya menyarankan untuk sekalian menyetok untuk dijual. Pada waktu itu, Abdul Manan (41 tahun) pun menyetujuinya. Selang beberapa waktu, setelah memiliki modal, Abdul Manan (41 tahun) pun membayar stok obat tersebut dan sampai saat ini sudah menjadi usaha mandiri.

Adapun hambatan yang dialami selama berwirausaha obat herbal oleh Abdul Manan (41 tahun) yaitu: (1) Masalah obat herbal yang pengobatannya bertahap. Artinya obat herbal bukan hanya menghilangkan rasa sakit tetapi juga mengobati penyakit itu sendiri, (2) Bersaing dengan obat dokter, (3) kepercayaan masyarakat terhadap obat herbal, dan (4) kepercayaan masyarakat terhadap penjual obat herbal. Terdapat tiga hal yang biasanya dilakukan oleh Abdul Manan (41 tahun) dalam mengatasi hambatan usaha obat herbal. Tiga hal tersebut adalah pemberian penjelasan terkait penyakit dan rasa sakit, memberikan penjelasan terkait fungsi obat herbal itu sendiri, dan memberikan penjelasan terkait tahapan pengobatan dari obat herbal yang dapat dijadikan nutrisi ataupun pengobatan. Adapun cara yang dilakukan Abdul Manan dan istri yaitu Qanaah (55 tahun) supaya usaha herbal tetap berjalan yakni dengan menggunakan strategi tetap menyetok barang agar jika ada pelanggan yang hendak membeli mereka masih menyediakan barang.

Usaha Pulsa

Usaha mandiri yang dimiliki oleh Abdul Manan (41 tahun) yang selanjutnya adalah usaha pulsa. Usaha ini sudah berlangsung delapan bulan, yakni sejak bulan November 2017. Usaha

pulsa yang dijalankan Abdul Manan (41 tahun) merupakan usaha pulsa ketiga kalinya. Di mana yang kedua adalah saat Abdul Manan (41 tahun) masih berada di Medan dan belum tunanetra. berdasarkan hasil wawancara, Abdul Manan (41 tahun) menceritakan bahwa semenjak di Semarang, saat masih bergabung dengan Sahabat Mata, ia juga memiliki keinginan untuk membuka usaha pulsa kembali, akan tetapi ia tidak tahu cara mengisi deposit dan lain-lain. Selang beberapa waktu, saat ada perkumpulan Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata, Abdul Manan (41 tahun) bertemu dengan temannya yang berjualan pulsa. Ia pun bertanya cara pengisian deposit agar bisa berjualan pulsa. Dari sini, Abdul Manan (41 tahun) diberitahu cara pengisian deposit dan mulai membuka usaha pulsa.

Terkait hambatan usaha pulsa Abdul Manan (41 tahun) berdasarkan hasil wawancara, ia menyampaikan bahwa banyaknya konter atau usaha pulsa yang sudah mandiri, dan kepercayaan masyarakat dalam pembayaran lebih ke minimarket. Solusi yang dilakukan Abdul Manan (41 tahun) dalam hal ini adalah dengan tetap stok deposit, terkait ada pelanggan yang akan membeli atau tidak, stok deposit menjadikan sangat penting agar tidak mogok usaha. Setidaknya bisa digunakan untuk keperluan sendiri. Biasanya stok deposit usaha pulsa Abdul Manan (41 tahun) diisi Rp. 2.000.000, 00.

Usaha Peralatan Listrik

Memiliki kemampuan teknologi di era digital saat ini saat penting. Hal ini dikarenakan teknologi menjadi faktor penting bagi manusia dalam berbagai aktivitas dan pemenuhan kebutuhan. Teknologi memiliki arti penting dalam perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh Amin Masyhar (41 tahun) dengan penglihatan yang semakin menurun. Teknologi juga menjadi solusi bagi hambatan dalam berwirausaha. Melalui keterampilan komputer bicara, Amin Masyhar (41 tahun) beralih memanfaatkan teknologi yang sebelumnya menggunakan cara manual. Adapun jenis usaha yang dijalankan oleh Amin Mahsyar (46 tahun) adalah elektronik yakni peralatan listrik.

Bisnis online yang dilakukan oleh Amin Mahsyar (46 tahun) merupakan peningkatan usaha offline yang telah dijalankan sejak tahun 2007. Bisnis online tersebut didukung dengan keterampilan komputer bicara yang merupakan hasil belajar melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata. Amin Mahsyar (46 tahun) dalam menjalankan usaha online memiliki pengalaman bahwa usaha online merupakan jenis usaha yang pelanggan rentan berpindah, loyalitas kurang, rawan pergolakan harga, dan banyaknya web bersama seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Dari pengamatan yang dilakukan, hal tersebut juga merupakan suatu hambatan bagi Amin Mahsyar (46 tahun) dalam menjalankan usaha online miliknya. Amin Masyhar (46 tahun) juga menceritakan bahwa bisnis online itu seperti tren, dahulu pada awal-awal muncul di online pelanggan menjadi ramai. Kemudian selang beberapa waktu, ternyata sepi. Amin Mahsyar (46 tahun) mengungkapkan bahwa hal tersebut disebabkan karena pemain bisnis online semakin banyak dan banyaknya model web bersama tersebut sehingga web-web pribadi jarang dikunjungi. Sementara, Amin masyhar (46 tahun) mempertimbangkan apabila ia akan membesarkan web membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga ia lebih memilih untuk menambah modal di offline. Menurutnya, bisnis online memang menguntungkan, namun apabila ia tidak bisa bergantung dengan yang online saja, sehingga bagi Amin Mahsyar (46 tahun) bisnis offline tetaplah yang utama.

Simpulan

Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata merupakan lembaga nonformal sebagai salah satu sarana bagi tunanetra untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui ragam kegiatan atau pelatihan yang diusahakan dari lembaga tersebut. Alasan tunanetra tertarik menjadi anggota Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata di Kota Semarang, ada tiga yaitu menambah wawasan dan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan usaha. Ketiga alasan tersebut menjadi dasar para tunanetra untuk menimba ilmu di Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup bermasyarakat. Proses pembentukan perilaku kewirausahaan melalui Komunitas *Come_Unity* Sahabat Mata, ada tiga tahapan, yaitu motivasi dan kepercayaan diri, cerita kisah sukses, dan

pengembangan keterampilan melalui pelatihan pijat, komputer bicara, membaca dan menulis huruf braille, dan penyiaran radio.

Daftar Pustaka

- Amin, S. (2015). Pengaruh Kepribadian, Sikap dan Persepsi terhadap Perilaku Kewirausahaan Pelaku Usaha Industri Kecil Kerajinan Tangan dan Handycraft di Kabupaten Lamongan. *Media Mahardhika*, 14(1), 44-65.
- Atmaja, A. T. dan Margunani. (2016). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Aktivitas Wirausaha terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 5(3), 774-787.
- Azwar, B. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Kewirausahaan (Entrepreneurial Intention) (Studi terhadap Mahasiswa Universitas Islam Negeri SUSKA Riau). *Menara*, 12(1), 12-22.
- Balcazar, F. E., Kuchak, J., Dimpfl, S., Sariepella, V., dan Alvarado, F. (2014). An empowerment model of entrepreneurship for people with disabilities in the United States. *Psychosocial Intervention*, 23, 155-150.
- Bukirom, Indradi, H., Permana, A., dan Martono. (2014). Pengaruh Pendidikan Berwirausaha dan Motivasi Berwirausaha terhadap Pembentukan Jiwa Berwirausaha Mahasiswa. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 29(2), 144-151.
- Bungin, B., (ed). (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hong, Z., Hong, T., Cui, Z., dan Luzhuang, W. (2012). Entrepreneurship Quality of College Students Related to Entrepreneurial Education. *Energy Procedia*, 17, 1907-1913.
- <http://poskotanews.com/2015/02/22/sekeluarga-tuna-netra-ngemis-sehari-dapat-setengah-juta>. Diakses pada 15 Agustus 2018 pukul 05:57:34 WIB.
- <https://semarangkota.bps.go.id/>. Diakses pada Sabtu, 18 Maret 2017 pukul 18:55:00 WIB.
- <https://solider.or.id/2014/09/21/pesan-difabel-buat-presiden-baru>). Diakses pada Sabtu, 18 Maret 2017 pukul 19:38:42 WIB.
- <http://harianjogja.com/baca/2016/01/26/penyandang-disabilitas-375-juta-tunanetra-tuntut-hak-bersekolah-684663>. Diakses pada Sabtu, 18 Maret 2017 pukul 18:55:07 WIB.
- Kusumandari, R. B. (2013). Model Pendidikan Kewirausahaan dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Siswa SMK Unggulan. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6(1), 64-79.
- Listyaningrum, S. A., dan Wahyudin, A. (2017). Kualitas Pembelajaran Kewirausahaan dan Jiwa Kewirausahaan dalam Memediasi Pengaruh Fasilitas Praktik Kerja terhadap Kesiapan Kerja. *Economic Education Analysis Journal*, 6(1), 240-254.
- Marganingsing, T. (2013). Peranan Mata Pelajaran Kewirausahaan dalam Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Siswa Kelas XI di SMK Negeri 8 Semarang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 2(2), 120-128.
- Masrukin, Sugito, T., Suswanto, B., Sabiq A. (2013). Model Pemberdayaan Masyarakat Pascaerupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. *Jurnal Komunitas*, 5(2), 172-184
- Mochlasin dan Krisnawati, W. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kewirausahaan Entrepreneur Muslim Salatiga. *Jurnal Muqtasid*, 7(2), 73-94.
- Mulyono, S. E. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Literasi Berbasis

Kewirausahaan Usaha Mandiri Melalui PKBM Di Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education*, 1(1), 51-60.

- Nurfitriana, N., Fatchiya, A., dan Susanto, D. (2016). Perilaku Kewirausahaan Pelaku Usaha Pempek Skala Industri Kecil dan Menengah di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 12(2), 114-125.
- Nursiah, T., Kusnadi, N., dan Burhanuddin. (2015). Perilaku Kewirausahaan pada Usaha Mikro Kecil (UMK) Tempe di Bogor Jawa Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 3(2), 145-158.
- Pravitasari, S. E., Soeaidy, M. S., dan Hadi, M. (2014). Pemberdayaan bagi Penyandang Tunanetra guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Studi Pada Upt Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 53-59.
- Ranto, D. W. P. (2016). Membangun Perilaku Entrepreneur pada Mahasiswa Melalui Entrepreneurship Education. *JBMA*, 3(1), 79-86.
- Renko, M., Harris, S. P., dan Caldwell, K. (2016). Entrepreneurial Entry by People with Disabilities. *International Small Business Journal*, 34(5), 555-578.
- Riyanti BP .2003. Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rosmiati., Junias, D. T. S., dan Munawar. (2015). Sikap, Motivasi, dan Minat Berwirausaha Mahasiswa. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 17 (1), 21-30.
- Sapar., Lumintang, R. W. E. dan Susanto, D. (2006). Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Perilaku Kewirausahaan Pedagang Kakilima (Kasus Pedagang Kakilima Pemakai Gerobak Usaha Makanan di Kota Bogor). *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 61-68.
- Soimah dan Rahayu M. (2013). Karakteristik Kewirausahaan Masyarakat Pemulung Pendekatan Fenomenologi terhadap Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang Kota Bekasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(2), 267-279.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, M. H. (2014). Model Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Entrepreneur Muda Kreatif dan Inovatif di Kota Semarang. *Forum Ilmu Sosial*, 41(1), 41-53.
- Widayat dan Ni'matuzahroh. (2017). Entrepreneurial Attitude and Student's Business Start-Up Intention: A Partial Least Square Modeling. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 19(1), 46-53.



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Halaman 60-70



Peran Paguyuban Duta Wisata “Sekargading” dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Batang

Deby Prasetio Agung

Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang

Atika Wijaya

Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang

Kata Kunci	Abstrak
Duta Wisata Paguyuban “Sekargading” Pembangunan Pariwisata Peran	Tulisan ini membahas peran Paguyuban Sekargading dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Batang. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki dampak positif pada berbagai sektor kehidupan manusia lainnya, untuk mengoptimalkan hal itu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang kembali mengaktifkan Paguyuban Duta Wisata “Sekargading”. Tulisan ini menggunakan teori peranan oleh David Berry dan metode penulisan kualitatif. Tulisan ini memberikan hasil bahwa terdapat pandangan dari masyarakat yang mengamati Paguyuban Sekargading hanya digunakan sebagai among tamu dan masih mengikuti aktivitas dari Disparpora, masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan Paguyuban Sekargading menganggap beberapa kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban memiliki pengaruh terhadap pariwisata di Kabupaten Batang. Peranan yang dilakukan oleh Paguyuban Sekargading untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Batang diwujudkan melalui beberapa program kerja, seperti Mas Mbak Batang Berbagi, Mas Mbak Batang Goes To School, dan Mbolang Mbatang. Secara keseluruhan peran ganda anggota paguyuban merupakan kendala terbesar yang dirasakan oleh Paguyuban Sekargading.
Diterima	4 Maret 2019
Review	17 Maret 2019
Revisi	29 Maret 2019
Penerimaan	7 April 2019
Copyedit	25-28 Juni 2019
Publikasi	30 Juni 2019



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Pages 60-70



The Role of “Sekargading” Tourism Ambassador Association in Tourism Development of Kabupaten Batang

Deby Prasetio Agung

Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang

Atika Wijaya

Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang

Keywords	Abstract
Tourism Ambassador Sekargading association Tourism development Role	This study discussing the role of the Sekargading Association in developing tourism in Batang Regency, Central Java, Indonesia. Tourism is a sector that has a positive impact on various other sectors of human life, and to optimize it The Tourism Government of Batang Regency (Disparpora) has reactivated the Tourism Ambassador Association “Sekargading”. This study uses role theory by David Berry and qualitative research methods. The results showed that there is a view from the community observing the Sekargading Association that they are only used as a guest and still following the activities of the Disparpora, while, the people who have participated in the Sekargading program considered some activities carried out by the association had an influence on tourism in Batang Regency. The role of Sekargading association to developing tourism in Batang Regency was realized through several programs, such as Mas Mbak Batang Berbagi, Mas Mbak Batang Goes To School, and Mbolang Mbatang. Overall, dual role of association members is the biggest obstacle for Sekargading Association.
Submission	4 Maret 2019
Review	17 Maret 2019
Revision	29 Maret 2019
Acceptance	7 April 2019
Copyediting	25-28 Juni 2019
Publication	30 Juni 2019

Ucapan Terima Kasih/Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih pada Bapak Kuncoro Bayu Prasetyo S.Ant., M.A, Ibu Asma Luthfi S.Th.I., M.Hum, dan Bapak Fulia Aji S.Pd., M.A yang telah memberikan banyak masukan bagi perbaikan naskah awal artikel ini.

Acknowledgement

The author delivers their gratitude to Mr. Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., M.A., Mrs. Asma Luthfi, S.Th.I., M.Hum., and Mr. Fulia Aji, S.Pd., M.A., who have given many constructive feedbacks to the earlier iteration of this manuscript.

Pendahuluan

Dewasa ini pariwisata telah menjelma menjadi salah satu kebutuhan hidup serta industri yang menguntungkan. Pariwisata tidak lagi hanya berupa aktivitas perjalanan untuk tujuan rekreasi dan liburan, namun juga merupakan suatu kegiatan sosial dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. (Pendit, 2006) menyatakan bahwa pariwisata adalah sebuah industri yang mencakup lapangan usaha bisnis sangat luas dan mempunyai sifat rumit berganda. Pariwisata menjadi suatu kegiatan di dalam masyarakat yang mampu mendatangkan banyak keuntungan baik untuk negara, masyarakat, dan lingkungan sekitar, seperti adanya lapangan pekerjaan baru, pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum, dan lainnya (Tatarusanu, 2016). Keuntungan-keuntungan dari sektor pariwisata dapat diraih dengan melakukan pengoptimalan pada segala potensi wisata yang ada.

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut. Potensi wisata dapat berupa wisata belanja, wisata peninggalan budaya (*cultural artifact*), wisata pertunjukan seni budaya (*cultural behavior*), maupun wisata religi (Brata, 2009). Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata yang cukup melimpah. Namun dengan segala potensi wisata dan budaya yang ada belum mampu membuat Kabupaten Batang dikenal oleh masyarakat luas baik di dalam Pulau Jawa, Indonesia, maupun Internasional. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Kabupaten Batang yang enggan untuk mengenal dan memperkenalkan daerahnya sendiri kepada masyarakat daerah lain. Padahal salah satu komponen penting dalam pembangunan pariwisata ialah partisipasi dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan (Dewi dkk, 2013). Dalam konteks pembangunan pariwisata tampaknya partisipasi masyarakat penting untuk terus didorong guna mendistribusi keuntungan-keuntungan dari kegiatan kepariwisataan yang berlangsung kepada masyarakat secara langsung. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten dalam hal ini, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang telah menempuh beberapa upaya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Batang dengan melibatkan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan mengaktifkan kembali Paguyuban Duta Wisata Kabupaten Batang, atau yang sering disebut dengan Paguyuban Sekargading.

Paguyuban Sekargading merupakan suatu wadah duta wisata Kabupaten Batang. Pada dasarnya sebuah paguyuban terbentuk atas dasar rasa kebersamaan dan saling memiliki serta ikatan batin yang kuat antar anggotanya, paguyuban juga memiliki fungsi dan peran layaknya kelompok sosial lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat (Fitriyani, 2012; Fadhila, 2013; Pertiwi, 2014; Rimawati, 2015). Begitu pula dengan paguyuban duta wisata Kabupaten Batang, pemilihan duta wisata yang menyasar pemuda-pemuda ini bukanlah sekedar ajang yang berhenti pada satu titik saja, melainkan suatu langkah berkelanjutan untuk kepentingan pembangunan pariwisata. Duta wisata adalah ikon atau figur pariwisata dan kebudayaan yang terpilih untuk menjadi promotor aktif bagi daerahnya maupun sebagai kepanjangan tangan

pemerintah (Andriyani, 2014; Randa, 2015; Oktarina, 2015; Yulaichah, 2017). Dengan adanya ajang pemilihan duta wisata di setiap daerah di Indonesia diharapkan lahir suatu generasi muda yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menjadi promotor untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di daerah tersebut (Paul dkk, 2017). Oleh sebab itu, ajang pemilihan duta wisata daerah sampai saat ini masih menjadi strategi utama pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk melibatkan pemuda dan mengader mereka guna memajukan industri pariwisata daerah.

Adapun maksud dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang untuk mengaktifkan kembali Paguyuban Sekargading bertujuan untuk menjadi kepanjangan tangan Disparpora Kabupaten Batang dalam menjangkau masyarakat lokal, sekaligus memperkenalkan potensi wisata di Kabupaten Batang yang masih banyak belum dikenal oleh masyarakat luas. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala Paguyuban Sekargading dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Batang. Selain itu, untuk mengetahui juga pandangan masyarakat Kabupaten Batang terhadap Paguyuban Sekargading.

Teori Peranan oleh David Berry digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, di mana dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap "masyarakat" atau terhadap orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya (Berry, 2003).

Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode penulisan ini dipilih karena sifat dan karakteristik objek penulisan yang diteliti berdasarkan kondisi nyata dan dari realitas di masyarakat. Penulisan ini dilakukan di Kabupaten Batang sejak bulan Maret hingga Mei 2018. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sepuluh informan yang terdiri dari pengurus Paguyuban Sekargading, Staf Disparpora, serta Masyarakat Kabupaten Batang guna memperoleh informasi mengenai peran Paguyuban Sekargading dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Batang. Observasi partisipatif dilakukan pada tanggal 21 Maret sampai 07 Mei 2018. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data visi misi, struktur pengurus, program kerja, arsip proposal kegiatan, laporan, serta foto-foto kegiatan Paguyuban Sekargading. Keabsahan data dalam penulisan ini diperoleh melalui teknik triangulasi sumber, dengan mengkonfirmasi data dari sumber yang satu ke sumber yang lain.

Temuan dan Pembahasan

Gambaran Umum Paguyuban Sekargading

Paguyuban Sekargading mulanya adalah perkumpulan anak-anak muda di Kabupaten Batang yang mengikuti ajang atau kompetisi pemilihan "Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Batang" dan berhasil menjadi finalis atau mendapatkan gelar sebagai Duta Wisata Kabupaten Batang. Paguyuban Sekargading pertama kali dibentuk pada tahun 2006 dan diketuai oleh Bramantyo yang juga merupakan pemenang Duta Wisata Kabupaten Batang 2006. Paguyuban ini terbentuk karena ada sinergi antara keinginan anak-anak duta wisata untuk membentuk sebuah wadah berkumpul dengan program pemerintah untuk membentuk komunitas anak-anak muda daerah. Sejak saat itu Paguyuban Sekargading resmi menjadi wadah untuk para Duta Wisata Kabupaten Batang, dan siap bergerak membantu pemerintah dalam pembangunan sektor pariwisata.

Paguyuban Sekargading memiliki berbagai kegiatan yang terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan yang berasal dari Disparpora dan kegiatan dari program kerja Paguyuban Sendiri. Kegiatan yang berasal dari Disparpora antara lain seperti menjadi delegasi dalam setiap kegiatan pemerintahan, membantu disparpora dalam menjaga *stand* promosi pariwisata di berbagai

kegiatan pameran, mengikuti *roadshow* pariwisata di beberapa daerah, menjadi *talent* dalam kegiatan festival, menjadi pendamping Bupati dalam suatu acara, menerima tamu pemerintahan yang merupakan pejabat daerah maupun pejabat skala nasional, mengedarkan pamflet wisata terhadap masyarakat dari luar Kabupaten batang, dan kegiatan lainnya. Sementara itu, kegiatan dari data program kerja Paguyuban Sekargading antara lain Mas Mbak Batang Berbagi, *Mbolang Mbatang*, Mas Mbak *Goes To School* dan acara pemilihan Duta Wisata Kabupaten Batang.

Pandangan Masyarakat Kabupaten Batang terhadap Paguyuban Sekargading

Terdapat dua jenis pandangan yang berasal dari masyarakat Kabupaten Batang terhadap Paguyuban Sekargading, yaitu pandangan oleh masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan Paguyuban Sekargading dan masyarakat yang mengamati namun belum pernah mengikuti kegiatan Paguyuban Sekargading.

Pandangan positif pada Paguyuban Sekargading yang dimunculkan setelah masyarakat mengenal dan pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Sekargading. Pemegang peran dapat mengendalikan pandangan orang lain terhadap dirinya. Melalui pengendalian yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan ini, Paguyuban Sekargading berhasil mendapatkan beberapa pandangan yang baik dari masyarakat Kabupaten Batang yang pernah mengikuti kegiatan dan aktivitas dari Paguyuban Sekargading. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ahmad sebagai salah satu bagian dari masyarakat Kabupaten Batang dan pernah berpartisipasi dalam kegiatan Paguyuban Sekargading, beliau menyatakan bahwa:

Saya rasa paguyuban ini sudah berusaha maksimal dengan program-programnya, setelah lama tidak aktif, sekarang mereka hadir kembali dan langsung eksekusi beberapa kegiatan, itu menurut saya niat sekali anak-anaknya. Jadi menurut saya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ini sudah baik, namun karena masih awal-awal ya jadi masih perlu kita lihat lagi sampai beberapa waktu mendatang (AK, Masyarakat, wawancara pada 24 April 2018).

Pandangan yang muncul dalam diri Bapak Ahmad ini dipengaruhi oleh serangkaian peranan yang berupa kegiatan kepariwisataan yang telah dilakukan Paguyuban Sekargading. Sementara itu, masyarakat yang mengamati dan belum pernah mengikuti kegiatan Paguyuban Sekargading, menganggap bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban Sekargading masih sebatas menjadi *among tamu*, dan mengikuti aktivitas dari Disparpora Kabupaten Batang, sehingga Paguyuban Sekargading dianggap belum memiliki gebrakan dan kontribusi nyata dalam sektor pariwisata di Kabupaten Batang.

Dengan demikian tidak semua masyarakat di Kabupaten Batang mengenal secara baik Paguyuban Sekargading, masih perlu dilakukan upaya-upaya dengan aktif melakukan kegiatan kepariwisataan untuk mengendalikan pandangan masyarakat di Kabupaten Batang secara menyeluruh oleh Paguyuban Sekargading. Namun, sebagai paguyuban yang baru diaktifkan kembali setidaknya Paguyuban Sekargading sudah mendapatkan beberapa respons yang baik dari masyarakat di Kabupaten Batang.

Peran Paguyuban Sekargading dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Batang

Berry (2003:105) mengungkapkan bila individu-individu menempati kedudukan-kedudukan tertentu, maka mereka merasa bahwa setiap kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan (*expectation*) tertentu dari orang-orang di sekitarnya. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Lebih lanjut lagi David Berry mengungkapkan bahwa terdapat dua harapan dalam sebuah peranan, pertama harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban- kewajiban dari pemegang peran (Berry, 2003:107). Munculnya peranan yang dilakukan oleh Paguyuban Sekargading

merupakan bagian tugas serta kewajiban yang telah tersusun berdasarkan harapan-harapan dari masyarakat terhadap Paguyuban Sekargading.

Penulis menemukan tiga upaya yang dilakukan oleh Paguyuban Sekargading untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Batang, yaitu pengenalan potensi atau daya tarik wisata di Kabupaten Batang, penanaman sikap sadar wisata, dan pengimplementasian sapta pesona.

Pengenalan Daya Tarik Wisata Kabupaten Batang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional) 2010-2025, yang dimaksud dengan daya tarik wisata ialah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kabupaten Batang merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memiliki beragam daya tarik wisata, mulai daya tarik wisata alam, budaya, kuliner, hingga wisata buatan (lihat Tabel 1).

Daya tarik wisata juga tidak hanya berupa tempat, melainkan tetapi juga budaya, tradisi, dan kuliner. Dalam hal budaya dan tradisi, Kabupaten Batang memiliki Kampung Batik Rifaiyah, *Tradisi Kliwonan*, *Lomban*, *Nyadran*, dan tradisi lainnya. Sedangkan dalam hal kuliner Kabupaten Batang memiliki Sentra Emping Limpung, Kampung Serabi Kalibeluk, Megono, dan Lontong Lemprak. Dengan banyaknya daya tarik wisata tersebut, masyarakat Kabupaten Batang harus sepenuhnya paham atas potensi yang mereka miliki. Oleh sebab itu berikut upaya sosialisasi daya tarik wisata yang dilakukan Paguyuban Sekargading untuk mengenalkan daya tarik wisata Kabupaten Batang pada masyarakat lokal maupun masyarakat luas.

Pertama, melalui kegiatan Mas Mbak Batang Berbagi yang merupakan salah satu program kerja Paguyuban Sekargading dengan tujuan untuk mengenalkan potensi daya tarik wisata Kabupaten Batang kepada masyarakat lokal yang dikemas dengan kegiatan bakti sosial. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Panti Asuhan maupun daerah tertinggal di Kabupaten Batang. Dalam tahun 2016-2018 kegiatan ini sudah berlangsung selama empat kali, yaitu di Panti Asuhan Putra Bakti, Dataran Tinggi Bintoro Mulyo Kabupaten Batang, Panti Asuhan Darul Hadlonah, dan Panti Asuhan Darul Alam Wa Darul Aitam. Susunan acara dalam kegiatan ini diawali dengan sosialisasi pengenalan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Batang. Terkait cara sosialisasi daya tarik wisata Kabupaten Batang yang dilakukan dalam kegiatan Mas Mbak Berbagi ini. Kegiatan lain dari Mas Mbak Batang Berbagi ialah membagikan pamflet daya tarik wisata Kabupaten Batang kepada masyarakat lokal dan masyarakat luar Kabupaten Batang yang dikemas dengan membagikan Takjil kepada mereka sebagai para musafir. Lokasi dan waktu yang dipilih oleh Paguyuban Sekargading untuk melakukan kegiatan *flyering* ini ialah di sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang serta *Rest Area* ketika memasuki momen mudik Idul Fitri.

Kedua, melalui kegiatan pameran pariwisata dengan membuka stand pada kegiatan tersebut. Pameran bukanlah salah satu program kerja internal Paguyuban Sekargading, melainkan kegiatan yang berasal dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang. Sebagai pemegang kendali pada pengelolaan pariwisata, Disparpora memiliki banyak agenda dan program kerja untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Batang. Salah satu dari program kerja tersebut ialah melakukan promosi wisata melalui media *expo* atau pameran. Kegiatan pameran ini biasa dilakukan di dalam Kabupaten maupun ke luar kota pada tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Beberapa kegiatan pameran lokal di dalam Kabupaten Batang ialah Batang Expo, Pekan Raya Batang, Pantura Expo, dan Festival Kuliner. Melalui kegiatan ini Paguyuban Sekargading menjalankan perannya untuk memperkenalkan daya tarik wisata kepada masyarakat Kabupaten Batang. Karena tidak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat Kabupaten Batang yang kurang mengenal daya tarik wisata di daerahnya sendiri.

Penanaman Sikap Sadar Wisata

Sikap sadar wisata merupakan sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat pada suatu daerah destinasi wisata. Kondisi sadar wisata dapat ditunjukkan dengan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu tempat/wilayah. Demikian pula dengan masyarakat Kabupaten Batang, untuk keperluan pembangunan pariwisata di Kabupaten Batang masyarakatnya perlu memiliki sikap sadar wisata. Konsep sadar wisata masyarakat dibagi menjadi dua yaitu sebagai *host* (tuan rumah) dan *guest* (tamu/wisatawan), di mana partisipasi dan dukungan kedua elemen ini sama-sama diperlukan untuk mewujudkan sebuah destinasi yang berdaya saing, serta tumbuh kembangnya iklim kegiatan kepariwisataan pada suatu destinasi wisata.

Mas Mbak Batang *Goes To School* (lihat Gambar 1) menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh Paguyuban Sekargading untuk menanamkan sikap sadar wisata pada masyarakat Kabupaten Batang. Kegiatan ini berupa *Road Show* ke sekolah-sekolah di Kabupaten Batang. Sasaran dari kegiatan ini ialah seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Batang. Kegiatan Mas Mbak Batang *Goes To School* diawali dengan mengenalkan potensi yang ada di Kabupaten Batang secara umum, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai sikap sadar wisata, konsep masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) dan wisatawan/pengunjung (*guest*), bagaimana sikap sadar wisata ini berpengaruh pada sebuah pembangunan wisata, hingga keuntungan yang bisa diperoleh apabila sikap sadar wisata ini bisa tertanam pada diri masyarakat. Setelah peserta atau masyarakat mengetahui konsep sadar wisata kegiatan dilanjutkan dengan melakukan diskusi. Masyarakat diajak berdiskusi tentang kondisi destinasi wisata dengan masyarakat yang memiliki sikap sadar wisata tinggi dan kondisi destinasi wisata dengan masyarakat yang sikap sadar wisatanya rendah. Cara ini dianggap lebih mudah untuk membuat masyarakat mengerti tentang pentingnya sadar wisata, masyarakat akan membandingkan kondisi tersebut dan memperoleh kesimpulannya sendiri. Mereka juga mendiskusikan secara langsung terkait sikap- sikap yang harus dimiliki masyarakat sebagai tuan rumah maupun sebagai wisatawan.

Mengimplementasikan Sapta Pesona

Sapta pesona merupakan kondisi ideal yang harus diwujudkan atau diciptakan dalam rangka menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah atau wilayah negara kita. (Syaukani, 2003) menyatakan bahwa sapta pesona adalah upaya penataan dan pembinaan dilakukan kampanye sadar wisata secara nasional, menggalang segala potensial nasional agar semua ikut berperan serta mendukung dalam rangka merehabilitasi potensi dan kemampuan industri pariwisata serta swadaya masyarakat.

Sapta pesona memiliki tujuh unsur yang harus terimplementasi dengan baik, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Apabila salah satu dari ketujuh unsur tersebut belum terimplementasikan, maka suatu destinasi wisata dapat dikatakan belum layak menjadi destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Setiap unsur di dalam sapta pesona ini memiliki tujuan serta mengikat masyarakat untuk berperilaku di dalam dunia pariwisata (lihat Gambar 2).

Mbolang Mbatang merupakan kegiatan *explore* wisata yang diadakan oleh Paguyuban Sekargading dengan tujuan mengajak masyarakat lokal maupun luar Kabupaten Batang untuk melakukan aksi sapta pesona. Kegiatan ini dikemas seperti paket wisata, di mana peserta akan diajak ke beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Batang dan melakukan penerapan sapta pesona. Kegiatan ini bersifat berbayar, namun Paguyuban Sekargading mengaku tidak mengambil keuntungan dari kegiatan ini, dengan kata lain semua biaya yang dibayarkan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk fasilitas selama mengikuti kegiatan. Kegiatan *Mbolang Mbatang* dianggap sangat cocok untuk melakukan aksi nyata sapta pesona dikarenakan dilaksanakan secara *outdoor* dan bersinggungan langsung dengan destinasi wisata di Kabupaten Batang. Selibuhnya pengimplementasian sapta pesona pada masyarakat Kabupaten Batang didukung dengan proses sosialisasi sebagai sarana untuk menstimulus masyarakat Kabupaten Batang agar mengenal dan menerapkan sapta pesona dalam kehidupan sehari-hari.

Kendala Paguyuban Sekargading dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Batang

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Batang, Paguyuban Sekargading menghadapi berbagai permasalahan maupun kendala yang dihadapi baik dalam kaitannya dengan keanggotaan, pendanaan, maupun hal lainnya baik secara internal maupun eksternal, berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh Paguyuban Sekargading.

Kendala Internal

Pertama, adanya peran ganda pada anggota Paguyuban Sekargading. Dengan anggota yang banyak Paguyuban Sekargading justru rentan terhadap suatu permasalahan keanggotaan, hal ini dikarenakan beberapa anggota menjadi saling menggantungkan dan mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing. (Berry, 2003) menyatakan bahwa individu di dalam masyarakat yang memainkan bermacam-macam peranan sosial, dikenai oleh seperangkat harapan pada masing-masing peranan tersebut: bila mengambil semua peranan sekaligus, kemungkinan besar harapan-harapan tersebut tidak serasi satu sama lain. Bahkan beberapa harapan saling bertentangan satu sama lain. Sebagai anggota dari Paguyuban Sekargading, mereka memiliki peranan dengan harapan untuk aktif mengembangkan pariwisata, di sisi lain mereka juga memiliki peranan sebagai pelajar maupun pekerja dengan harapan aktif dalam hal akademis dan pelayanan prima di tempat kerja.

Kedua, minimnya anggaran pada Paguyuban Sekargading. Sebagai kelompok sosial yang juga merupakan organisasi, Paguyuban Sekargading memiliki kendala terkait anggaran. Menurut Mbak Raras selaku pengurus Paguyuban Sekargading, kendala pada anggaran muncul karena Paguyuban Sekargading belum menjadi organisasi yang berbadan hukum, sehingga belum memiliki dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang. Di sisi lain Paguyuban Sekargading juga merupakan organisasi non profit atau tidak mencari keuntungan secara keuangan. Selain sebagai organisasi non profit, Mas Nur Kholis selaku ketua paguyuban menyatakan bahwa minimnya anggaran pada Paguyuban Sekargading juga disebabkan tidak adanya *plotingan* dana tahunan dari Disparpora. Karena memang tidak ada anggaran tahunan untuk Paguyuban Sekargading dari Disparpora, meskipun Paguyuban Sekargading merupakan organisasi di bawah naungan Disparpora Kabupaten Batang. Sehingga mereka tetap perlu mengajukan proposal kegiatan ketika ingin mendapatkan bantuan dana dari Disparpora Kabupaten Batang.

Kendala Eksternal

Pertama, adanya anggapan negatif terhadap Paguyuban Sekargading yang merupakan akibat dari tidak aktifnya Paguyuban Sekargading pada tahun 2012-2015. Hal ini membawa permasalahan tersendiri pada paguyuban, banyak anggapan negatif yang muncul terhadap paguyuban, seperti anggapan bahwa duta wisata itu selalu hilang setelah acara malam puncak pemilihan dan tidak ada kontribusinya di dalam sektor pariwisata. Terkait hal tersebut, Raras Putri menyampaikan :

Selama ini banyak yang memandang duta wisata itu hanya seremonial belaka, tidak ada tugas yang berarti, hanya menjadi among tamu, dandan cantik dan ganteng, lenggak-lenggok di atas panggung. (RP, Pengurus Paguyuban Sekargading, wawancara pada 15 April 2018)

Dapat diketahui bahwa Paguyuban Sekargading menyadari kekurangan yang mereka miliki selama tidak aktif, serta perspektif yang muncul dalam diri masyarakat tentang duta wisata Kabupaten Batang. Mendapati perspektif seperti demikian, Paguyuban Sekargading mencoba membenahi diri dengan evaluasi serta mencoba menangkap harapan-harapan yang muncul dari masyarakat Kabupaten Batang terhadap Paguyuban Sekargading.

Kedua, Komunikasi maupun pengawasan yang terjalin dengan Disparpora Kabupaten Batang justru menimbulkan beberapa kendala pada Paguyuban Sekargading, kendala-kendala tersebut berawal dari hal-hal seperti tidak sepaham dalam penyampaian gagasan atau pendapat, kesalahpahaman dalam berkoordinasi, dan lain sebagainya. Adanya kendala

ini dilatarbelakangi oleh karakteristik masing-masing individu yang menjadi staf Disparpora. Masing-masing dari mereka memiliki anggapan dan harapan tersendiri terhadap Paguyuban Sekargading. Sehingga paguyuban merasa kesusahan untuk memetakan harapan-harapan tersebut, dan lebih mengikuti harapan secara umum oleh Disparpora untuk menjalankan peranannya.

Ketiga, sebagai organisasi yang baru terlahir kembali, Paguyuban Sekargading memiliki kendala dalam hal sarana prasarana. Belum lengkapnya sarana prasarana yang dimiliki oleh Paguyuban Sekargading membuat mereka kesusahan untuk melakukan beberapa aktivitas. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti beberapa sarana prasarana yang belum mereka miliki ialah, ruangan sekretariat di kantor Disparpora sehingga sekretariat Paguyuban Sekargading berada pada salah satu rumah pengurus paguyuban yaitu Mbak Asayuta. Kemudian, peralatan presentasi dan dokumentasi seperti proyektor, laptop, kamera dan lainnya, sehingga untuk sementara masih meminjam Disparpora maupun anggota paguyuban setiap akan melakukan kegiatan. Dalam hal transportasi Paguyuban Sekargading masih mengandalkan transportasi pribadi milik masing-masing anggotanya. Karena fasilitas transportasi Disparpora hanya disediakan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan. Selibhnya dalam menjalankan kegiatan program kerja Paguyuban Sekargading selalu menggunakan transportasi milik sendiri.

Simpulan

Keberadaan Paguyuban Sekargading di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Batang memunculkan pandangan dari masyarakat yang mengamati Paguyuban Sekargading bahwa keberadaan mereka selama ini hanya sebagai *among tamu* dan masih mengikuti aktivitas dari Disparpora, sedangkan masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan Paguyuban Sekargading menganggap beberapa kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban memiliki pengaruh terhadap pariwisata di Kabupaten Batang. Sementara itu, peran Paguyuban Sekargading untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Batang, terwujud dalam berbagai upaya paguyuban dalam pengenalan daya tarik wisata, penanaman sikap sadar wisata, dan pengimplementasian sapta pesona. Upaya-upaya tersebut ditempuh melalui beberapa program kerja yang telah dilakukan oleh Paguyuban Sekargading, seperti Mas Mbak Batang Berbagi, Mas Mbak Batang *Goes to School*, dan *Mbolang Mbatang*. Di sisi lain terdapat kendala yang sangat dirasakan oleh Paguyuban Sekargading yaitu, kendala yang berasal dari dalam internal paguyuban, terutama pada peran ganda anggotanya. Anggota Paguyuban Sekargading tidak hanya memiliki satu peran dalam kehidupannya sebagai bagian dari paguyuban, melainkan mereka memiliki peranan lain yaitu sebagai pelajar dan pekerja, sehingga dalam beberapa kegiatan sering kali Paguyuban Sekargading tidak *full team* atau hanya sebagian saja yang bisa berpartisipasi.

Daftar Pustaka

- Andriyani, L. (2014). Peran Duta Wisata Dalam Mempromosikan Kebudayaan dan Pariwisata di Kalimantan Timur. *Journal Ilmu Komunikasi*, 2 (4).
- Berry, D. (2003). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Brata, N. T. (2009). Religi Jawa dan Remaking Tradisi Grebeg Kraton, Sebuah Kajian Antropologi. *Sejarah Dan Budaya*, 2 (2), 59-68.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C. dan Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3 (2), 117-226.
- Fadhila, N. (2013). Peran Dan Fungsi Paguyuban Jaranan Wahyu Kridha Budhaya Di Kota Kediri, Jawa Timur. *APRON Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan*, 2 (2).
- Fitriyani, R. (2012). Peranan Paguyuban Tionghoa Purbalingga Dalam Pelestarian Tradisi Cap Go Meh. *Jurnal Komunitas*, 4 (1).

- Oktarina, C. A. (2015). Peran Cak dan Ning Surabaya Dalam Strategi Promosi Kota Surabaya. *Journal Commonline Departemen Komunikasi*, 4 (2).
- Paul, K., Yuriewaty, P. dan Waleleng, G. J. (2017). Peranan Duta Pariwisata Randa Kalibasa dalam Mempromosikan Potensi Wisata Kota Palu. *Jurnal Acta Diurna*, VI (1).
- Pendit, N. S. (2006). Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.
- Pertiwi, M. N. (2014). Fungsi Paguyuban Kampung Batik Dalam Pelestarian Batik Semarang Di Kota Semarang. *Jurnal Solidarity*, 3 (1).
- Randa. (2015). Peran Duta Wisata Dalam Mempromosikan Pariwisata Kabupaten Solok. *Jom FISIP*, 2 (2). Rimawati. (2015). Penerapan Sadar Wisata Dan Penguatan Citra Wisata Melalui Penanaman Tanaman
- Upakara Di Kerambitan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27 (1), 30-41.
- Solichah, F. M. (2014). *Pandangan Masyarakat Terhadap Kepala Desa Kedungpapar Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Syaukani. (2003). *Pesona Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Nuansa Madani
- Tatarusanu, M. (2016). Local Community Involvement In Tourism Development. *Management Intercultural*, XVIII (37), 435-440.
- Buzan, T. dan Buzan, B. (2004). *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*. Jakarta: Interaksara Yulaichah, S. (2017). Bujang dan Dara dalam Mempromosikan Pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jom FISIP*, 4 (1).

Daftar Tabel

Tabel 1. Daya Tarik Wisata Kabupaten Batang
NO. DAYA TARIK WISATA

1	Taman Hiburan Rakyat Kramat
2	Kolam renang bandar (Bandar Ecopark)
3	Pantai Ujungnegoro
4	Pantai Sigandu
5	Agrowisata Pagilaran
6	Ds. Wisata Pantai Jodo
7	Ds. Wisata Sangubanyu
8	Ds. Wisata Pantai Celong
9	Ds. Wisata Mentosari
10	Ds. Wisata Tubing Pandansari

Sumber: Dokumentasi, Mei 2018

Daftar Gambar



Gambar 1. Kegiatan Mas Mbak Batang Goes To School
Sumber: Data Pribadi



Gambar 2. Praktik Aksi Saptas Pesona dalam kegiatan Mbolang Mbatang 2018
Sumber: Data Pribadi



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Halaman 71-81



Nilai Budaya dan Perubahan Karakteristik Sosial dalam Serikat Mahmejaan Masyarakat Taratara

Elpianus Paat

Program Studi S2 IPS Universitas Negeri Manado

Grace J. Sopotan

Program Studi Manajemen Universitas Negeri Manado

Theodorus Pangalila

Jurusan PPKn Universitas Negeri Manado

Ferdinand Kerebungu

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Manado

Kata Kunci	Abstrak
Nilai	Terdapat berbagai kelompok sosial yang dapat kita jumpai dalam masyarakat dewasa ini. Di dalam masyarakat Taratara, terdapat salah satu kelompok sosial yang bernama Serikat Mahmejaan. Tujuan penelitian ini yakni menemukan nilai budaya dan perubahan karakteristik sosial yang terkandung dalam Serikat Mahmejaan masyarakat Taratara. Proses penelitian dilaksanakan di kelurahan Taratara, Tomohon-Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian purposive sampling, dan teknik pengumpulan datanya dengan observasi tak berstruktur dan wawancara semi terstruktur, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis Grounded Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai budaya dapat ditemukan dalam aspek-aspek seperti: sistem keanggotaan, sistem kepemimpinan, langkah awal, aturan untapan lutu dan hukuman, (2) perubahan karakteristik sosial ditemukan dalam aspek-aspek seperti: sistem keanggotaan, menu makanan, dan perlengkapan sabuah. Ada lima nilai budaya yang terdapat dalam Serikat Mahmejaan masyarakat Taratara: (1) nilai kekeluargaan, (2) nilai kerjasama, (3) nilai persatuan dan kesatuan (4) nilai musyawarah/mufakat, dan (5) nilai religius. Sedangkan perubahan karakteristik sosial yang terjadi dalam Serikat Mahmejaan masyarakat Taratara yakni: (1) dilihat dari bentuknya, perubahan yang terjadi adalah perubahan kecil dan perubahan yang dikehendaki dan direncanakan, (2) dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, perubahan yang terjadi disebabkan oleh situasi dan kebutuhan masyarakat yang berubah karena adanya pemikiran yang baru serta sentuhan dengan budaya lain.
Budaya	
Perubahan	
Mapalus	
Serikat Mahmejaan	
Diterima	1 Juni 2019 (Abstrak), 20 Juni 2019 (Artikel)
Review	23 Juni 2019
Revisi	25 Juni 2019
Penerimaan	25 Juni 2019
Copyedit	25-28 Juni 2019
Publikasi	30 Juni 2019



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Pages 71-81



Cultural Values and The Change of Social Characteristics in the Serikat Mahmejaan of the Taratara Community

Elpianus Paat

Program Studi S2 IPS Universitas Negeri Manado

Grace J. Soputan

Program Studi Manajemen Universitas Negeri Manado

Theodorus Pangalila

Jurusan PPKn Universitas Negeri Manado

Ferdinand Kerebungu

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Manado

Keywords	Abstract
Value	<p>There are various social groups that we can meet in today's society. Within Taratara society, there is one social group called Serikat Mahmejaan. The aims of this study is to find cultural values and characteristics social changes in Serikat Mahmejaan of Tatatara Society. The research process was carried out in the village of Taratara, Tomohon-North Sulawesi. The method used in this study is descriptive qualitative, with purposive sampling research subjects, and data collection techniques with unstructured observation and semi-structured interviews, while the data analysis technique uses Grounded Teory analysis techniques. The results of the study show that: (1) cultural values can be found in aspects such as: membership systems, leadership systems, preparation, Untepan Lutu's rules and punishment, (2) changes in social characteristics found in aspects such as: membership systems, food menu, and Sabuah equipment. There are five cultural values found in the Serikat Mahmejaan of Taratara society: (1) family values, (2) cooperation values, (3) unity values (4) deliberation/consensus values, and (5) religious values. While characteristics social changes within Serikat Mahmejaan are: (1) seen from the shape, changes are small and desired and planned, (2) seen from the causes, changes that occur due to the situation and changing community needs because of new thinking and touch with other cultures.</p>
Culture	
Change	
Mapalus	
Serikat Mahmejaan	
Submission	1 Juni 2019 (Abstract), 20 Juni 2019 (Artikel)
Review	23 Juni 2019
Revision	25 Juni 2019
Acceptance	25 Juni 2019
Copyediting	25-28 Juni 2019
Publication	30 Juni 2019

Pendahuluan

Terdapat berbagai kelompok sosial yang dapat kita jumpai dalam masyarakat dewasa ini. Kelompok-kelompok sosial ini terbentuk dengan rupa-rupa latar belakang serta kepentingan. Ada yang hanya terbatas untuk anggota-anggotanya, tetapi juga ada yang terbuka untuk masyarakat umum. Tentang kelompok sosial, Soekanto (2012) mengungkapkan bahwa manusia pada prinsipnya merupakan makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Kecenderungan inilah yang mengondisikan terbentuknya kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Taratara, terdapat salah satu kelompok sosial yang dinamakan *Serikat Mahmejaan*. Kelompok sosial ini memiliki kemiripan dengan kelompok-kelompok arisan zaman sekarang yang di dalam aktivitasnya menekankan prinsip memberi untuk kemudian menerima kembali sebagaimana yang telah diberikan. Prinsip ini dikenal dengan resiprositas sebanding. Menurut Damsar & Indrayani (2016), resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*) merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita secara setara, sering kali, langsung, dan terjadwal.

Keunikan *Serikat Mahmejaan* dibandingkan dengan kelompok-kelompok arisan lainnya terletak pada mekanisme dan tujuannya. *Serikat Mahmejaan* terbentuk dengan tujuan untuk bekerja sama, saling membantu dan mencukupi namun secara khusus dalam pelaksanaan atau pemerianan pelbagai bentuk acara syukuran oleh setiap anggota secara bergiliran. Adapun cikal-bakal bentuk solidaritas gotong-royong ini terinspirasi dari salah satu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat desa Koha. Kebiasaan itu pun dihantar dan diperkenalkan oleh bapak Bonifasius Lasut kepada masyarakat Taratara sekitar tahun 1960-an (Informan B.L., 83 thn.). Sebagai sebuah model yang baru pada saat itu, sistem ini awalnya tidak banyak mendapat respons positif dari masyarakat setempat. Bahkan, pemerintah setempat pada waktu itu tidak menyetujui keberadaan solidaritas gotong-royong ini.

Namun, *Serikat Mahmejaan* tidak berhenti sampai di situ. *Serikat Mahmejaan* ternyata bukanlah sesuatu yang asing dari gaya hidup atau budaya masyarakat Taratara, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terus berlanjut. Pada hakikatnya, *Serikat Mahmejaan* adalah bagian dari budaya *Mapalus*. *Mapalus* ialah suatu aktivitas kehidupan masyarakat dengan sifat gotong-royong yang sudah melekat pada setiap insan putra-putri masyarakat suku Minahasa. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Pangalila (2018), masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara pada umumnya hidup dalam suasana harmonis dan penuh toleransi karena diilhami oleh nilai budaya selain "Si Tou Timou Tumou Tou", "Torang Samua Basudara", tetapi juga "Mapalus".

Kata dasar *Mapalus* ialah palus artinya menuangkan dan mengerahkan, sehingga *Mapalus* mengandung makna suatu sikap dan tindakan keharusan untuk beraktivitas dengan mempersatukan kekuatan dan kepandaian setiap masyarakat untuk memperoleh hasil yang optimal (Pontoh, 2015). Bila dianalisis lebih lanjut, *Mapalus* merupakan suatu sistem, prosedur, metode atau teknik kerja sama untuk kepentingan bersama dan masing-masing anggota secara bergiliran (Turang, 1983). Demikian juga dengan *Serikat Mahmejaan*, di dalam aktivitasnya terdapat sistem atau tata laksana kerja sama dalam persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama dan dinikmati oleh masing-masing anggota secara bergiliran. Melalui pengertian ini, *Serikat Mahmejaan*-pun menjadi salah satu bentuk manifestasi dari budaya *Mapalus*.

Berdasarkan observasi di tahun 2019, terdapat sejumlah *Serikat Mahmejaan* telah terbentuk dalam masyarakat Taratara, baik yang masih aktif maupun yang eksistensinya mulai tak tampak lagi. Beberapa di antaranya yakni, *Serikat Mahmejaan* Perintis, Perintis II, Perintis III, Turambi, Pangalila, Nimaesaan Peleng, Mahsawangan, dan Serikat Flamboyan. Serikat yang masih aktif dalam kegiatannya, berarti masih ada sebagian dari anggota kelompok yang belum mendapatkan bagiannya atau belum mendapatkan momen yang tepat untuk melaksanakan syukuran atau pesta. Sebaliknya, jika ada kelompok yang sudah tidak aktif lagi, berarti seluruh anggota kelompok telah mendapatkan haknya dan juga telah melaksanakan kewajibannya bagi semua anggota kelompok. Bahkan, ada juga *Serikat Mahmejaan* yang sudah melaksanakan

putaran lebih dari sekali. Hal ini membuktikan bahwa *Serikat Mahmejaan* masih terus dihayati dalam kehidupan konkret masyarakat Taratara hingga sekarang.

Berhadapan dengan modernisasi dan globalisasi dewasa ini, berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya mengalami perubahan (Soekanto, 2012). Perubahan-perubahan tersebut merupakan suatu gejala dalam masyarakat yang tak terhindarkan. Sebab, tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan (Tilaar, 2002). Singkatnya, dampak dari perubahan telah mengondisikan masyarakat termasuk kelompok-kelompok sosial di dalamnya pada satu bentuk dengan segala aspek sosialnya dewasa ini. Perubahan zaman memicu pula perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga menentukan pula nilai-nilai yang dianut dalam waktu tertentu.

Kajian Literatur

Mapalus

Menurut Pontoh (2015), kata dasar *Mapalus* ialah palus artinya menuangkan dan mengerahkan, sehingga *Mapalus* berarti sebuah aktivitas yang di dalamnya terdapat tindakan keharusan untuk menyelaraskan kekuatan dan kepandaian dalam pekerjaan untuk memperoleh hasil yang optimal. Sementara itu, pengertian *Mapalus* menurut Turang (1983), yakni suatu sistem, prosedur, metode atau teknik kerja sama untuk kepentingan bersama dan masing-masing anggota secara bergiliran. Aktivitas *Mapalus* pada awalnya hanya mencakup bidang pertanian atau gotong-royong untuk merambah hutan atau mengolah tanah untuk perkebunan para anggotanya, namun dalam perkembangannya anggotanya semakin bertambah serta kegiatan-kegiatannya mulai meluas (La Mansi, 2007) dan Uda, dkk., (2017). Sementara itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Turang, dkk., (2012) di kota Tomohon, kegiatan *Mapalus* terus berlangsung sekarang dan tersebar di 44 kelurahan (termasuk kelurahan Taratara) di 5 kecamatan di Kota Tomohon. Bentuk-bentuk *Mapalus* yang ada, seperti: *Mapalus* uang, *Mapalus* tani, *Mapalus* suka/duka, *Mapalus* kelompok masyarakat serta *Mapalus* usaha pembangunan keluarga yang mana setiap anggotanya berperan aktif dan terdiri dari kaum muda, tua, pria, dan wanita.

Berdasarkan uraian tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa *Mapalus* merupakan aktivitas bersama pada waktu tertentu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam budaya Minahasa yang anggota- anggotanya dilandasi oleh semangat gotong-royong berupa pertukaran tenaga atau makanan dan minuman dalam aneka jenis pekerjaan atau acara/pesta secara bergiliran. Dalam budaya *Mapalus* tampaklah anggota- anggotanya dipersatukan oleh suatu tujuan untuk kesejahteraan bersama yang berlandaskan semangat persaudaraan.

Serikat Mahmejaan

Serikat Mahmejaan terdiri dari dua kata gabungan dari bahasa Indonesia dan bahasa Tombulu, yakni Serikat dan Mahmejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), Serikat diartikan sebagai perkumpulan (perhimpunan, gabungan, dan sebagainya). Sedangkan, Mahmejaan menurut Mentang (1999), terdiri dari kata dasar meja dan ditambah dengan prefiks ma- (mah-) dan sufiks -an. Meja adalah sebuah bidang datar sebagai daun mejanya dan berkaki empat sebagai penyangganya. Dalam bahasa Tombulu, prefiks ma- (mah-

) merujuk pada suatu pekerjaan yang sementara dilakukan, dan jika ditambah dengan sufiks -an, berarti pekerjaan, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang atau berbalas-balasan (saling interaksi). Sehingga istilah Mahmejaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk menyediakan meja yang dilakukan secara berulang-ulang atau berbalas-balasan. Dengan demikian, *Serikat Mahmejaan* diartikan sebagai sebuah kelompok sosial yang aktivitasnya untuk menyediakan meja (dengan segala peralatan dan perlengkapannya) untuk kepentingan setiap anggota kelompok yang melaksanakan pesta secara bergiliran. Sama seperti budaya *Mapalus* yang telah menghasilkan kelompok-kelompok sosial dan berkecimpung dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, *Serikat Mahmejaan* terbentuk sebagai kelompok-kelompok

sosial namun lebih terspesifik pada pemerianan acara pesta baik itu pesta pernikahan, maupun juga perayaan ulang tahun setiap anggota yang termasuk di dalamnya.

Berdasarkan observasi, terdapat sejumlah *Serikat Mahmejaan* yang masih aktif dalam kegiatannya, seperti *Serikat Mahmejaan* Flamboyan dan Mahsawangan. Sedangkan beberapa *Serikat Mahmejaan* yang tidak aktif lagi (tutup buku) di antaranya: *Serikat Mahmejaan* Perintis I, Perintis II, Turambi, Pangalila, Pandey, dan Nimaesaan Peleng. *Serikat Mahmejaan* yang masih aktif dalam kegiatannya, berarti masih ada sebagian dari anggota kelompok belum mendapatkan giliran atau momen yang tepat untuk melaksanakan syukuran atau pesta. Sebaliknya, jika ada kelompok yang tidak aktif lagi, berarti seluruh anggota kelompok telah mendapatkan haknya dan juga telah melaksanakan kewajibannya bagi semua anggota kelompok. Sekarang ini, ada juga *Serikat Mahmejaan* yang sudah melaksanakan putaran lebih dari sekali, seperti *Serikat Mahmejaan* Flamboyan dan Mahsawangan. Hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini, *Serikat Mahmejaan* masih terus dihayati dalam kehidupan konkret masyarakat Taratara.

Menariknya, *Serikat Mahmejaan* tetap bertahan dengan karakteristik sosialnya yang telah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial. Berhadapan dengan budaya *easygoing* dan instan, dengan tawaran-tawaran konsep acara dan menjamurnya penyediaan catering, tidak lantas menggantikan *Serikat Mahmejaan* dalam masyarakat Taratara. Dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya sejak semula dibentuk dan dijalankan dalam masyarakat Taratara, *Serikat Mahmejaan* masih tetap dipelihara baik di dalam kehidupan bermasyarakat yang dideskripsikan dalam setiap pesta nikah atau perayaan syukuran lainnya. Nilai-nilai budaya di dalam *Serikat Mahmejaan* telah mengikat anggota-anggotanya dan mereka terpenggil untuk terus menjalankan dan mewariskannya dari generasi ke generasi hingga saat ini. Singkatnya, sebuah pesta atau acara syukuran dalam kapasitas yang besar, tanpa campur tangan dari *Serikat Mahmejaan* seakan-akan tidak lengkap, dan tidak tampak ciri khas dari pelaksanaan acara pesta dalam masyarakat Taratara.

Dalam konteks tersebut, permasalahan menarik yang dihadapi oleh peneliti yakni, nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam *Serikat Mahmejaan* dalam masyarakat Taratara sehingga terus bereksistensi hingga sekarang ini. Kemudian, berhadapan dengan realitas perubahan, apakah perubahan karakteristik sosial yang terjadi dalam *Serikat Mahmejaan*. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yakni: (1) menemukan nilai budaya yang terdapat dalam *Serikat Mahmejaan* masyarakat Taratara dan (2) menemukan perubahan karakteristik sosial yang terdapat dalam *Serikat Mahmejaan* masyarakat Taratara.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini, untuk penentuan informan, sumber data, atau subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2013), teknik ini dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dengan demikian, pengambilan sampel sumber data berdasar pada pertimbangan bahwa sumber data memiliki otoritas, dan mengetahui secara kompeten menyangkut *Serikat Mahmejaan* masyarakat Taratara. Sementara itu, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni, observasi tak berstruktur dan wawancara semi terstruktur. Teknik-teknik tersebut kemudian dielaborasi dengan studi literatur. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis *Grounded Theory* menurut Strauss dan Corbin (2003) sebagaimana yang dikutip oleh Pangalila (2018), yakni dengan menganalisis data (coding) berdasarkan tiga tahap: *Open Coding*, *Axial Coding*, dan *Selective Coding*.

Temuan dan Pembahasan

Untuk mengungkap tentang nilai-nilai budaya yang terdapat dalam *Serikat Mahmejaan*, maka penelitian dapat ditelusuri melalui beberapa fokus penelitian, yakni: Sistem Keanggotaan, Sistem Kepemimpinan, dan Mekanisme Pelaksanaannya. Di dalam Mekanisme Pelaksanaan

terdiri dari beberapa bagian, yakni persiapan, aturan Untepan *Lutu*, dan hukuman. Kemudian, untuk mengungkap perubahan-perubahan karakteristik sosial yang terjadi di dalam *Serikat Mahmejaan*, maka penelitian dapat ditelusuri melalui aspek- aspek seperti: Sistem Keanggotaan dan Mekanisme Pelaksanaan. Dalam Mekanisme Pelaksanaan terdapat dua bagian yakni Menu Makanan dan Perlengkapan *Sabuah*.

Aspek-Aspek Yang Memiliki Nilai Budaya dalam *Serikat Mahmejaan*

Menurut Bakker, nilai merupakan sifat formal intrinsik pada kebudayaan. Dengan kata lain kebudayaan dapat didefinisikan sebagai penciptaan, penertiban dan pengolahan nilai-nilai insani (Bakker, 1984). Dengan demikian, pemaknaan terhadap nilai-nilai budaya merupakan salah satu cara untuk menanamkan karakter bagi kelompok sosial yang termasuk dalam budaya tersebut. Sementara itu, Geertz (1992) dalam Yunus (2013) mengungkapkan bahwa budaya merupakan pola dari pemahaman-pemahaman yang terhubung secara integral dalam simbol-simbol yang diwariskan secara historis, suatu sistem mengenai konsepsi- konsepsi yang diturunkan secara simbolik yang dengan cara tersebut kehidupan dapat dikomunikasikan, dilestarikan dan bahkan dikembangkan. Dalam konteks itu, *Serikat Mahmejaan* merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat Taratara yang telah membudaya sehingga telah menciptakan karakter masyarakat yang dapat dilihat melalui nilai-nilai yang tersirat dalam *Serikat Mahmejaan* yang pada dasarnya telah diwariskan secara turun-temurun.

Sistem Keanggotaan

Sebagaimana yang terungkap dalam hasil wawancara menyangkut aspek motivasi masuk dalam keanggotaan *Serikat Mahmejaan*, terungkaplah bahwa ada perencanaan para anggotanya untuk melaksanakan pesta. Dalam sebuah kelompok sosial sebagaimana yang diterangkan oleh Soekanto (2012), bahwa salah satu ciri khas yang ada di dalamnya yakni ada kepentingan dan tujuan yang sama. Hal ini pula yang terjadi dalam *Serikat Mahmejaan*, para anggotanya memiliki tujuan yang sama yakni ada perencanaan untuk melaksanakan pesta. Motivasi lain juga yang terungkap bahwa menjadi anggota di dalam kelompok sosial sebagai sebuah semangat untuk berkumpul dan bersama-sama sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks proses terbentuknya kelompok sosial, alasan yang sama diungkapkan oleh Soekanto (2012), bahwa manusia sebagai makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain atau diistilahkan dengan *gregariousness*. Walaupun demikian, menurut Koentjaraningrat (1996), antara kehidupan kolektif hewan dan manusia terdapat perbedaan yang signifikan, yakni sistem pembagian kerja, kerja sama, dan komunikasi. Dalam kehidupan kolektif hewan digerakkan oleh naluri, sedangkan pada manusia tidak demikian.

Dari hasil wawancara menyangkut sistem keanggotaan dalam *Serikat Mahmejaan*, terungkaplah bahwa ada sifat keterbukaan, kebebasan, tetapi juga harus ada tanggung jawab serta komitmen untuk masuk dalam keanggotaan *Serikat Mahmejaan*. Sebab, pada prinsipnya, *Serikat Mahmejaan* bukanlah sebuah kelompok eksklusif yang di dalamnya hanya menerima anggota-anggota masyarakat dalam stratifikasi atau status sosial tertentu tetapi secara umum siap menerima siapa saja yang hendak masuk di dalamnya asalkan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam konteks itu juga, tampaklah bahwa di dalam *Serikat Mahmejaan* anggota-anggotanya sangatlah solid dalam relasi satu terhadap yang lain, hal ini disebabkan oleh anggota-anggota *Serikat Mahmejaan* berasal dari masyarakat setempat. Apa yang diungkapkan oleh Soekanto (2012), bahwa solidaritas dalam sebuah masyarakat setempat sangatlah tinggi, sebab mereka telah tinggal menetap sekian lama dan itulah yang menimbulkan rasa keakraban dan kekeluargaan di dalamnya. Dari fenomena-fenomena yang telah berlangsung lama dalam sistem keanggotaan *Serikat Mahmejaan* ini tampaklah nilai budaya yang tercermin di dalamnya yakni Kekeluargaan.

Sistem Kepemimpinan

Dari hasil wawancara menyangkut sistem kepemimpinan, *Serikat Mahmejaan* menggunakan gaya paternalistik dari seorang yang sudah dewasa (tua) dalam aspek umur. Selain itu, faktor penting lainnya juga dalam sistem kepemimpinannya yakni berdasarkan musyawarah atau mufakat. Dengan berbagai kualitas baik yang melekat di dalam dirinya, seorang pemimpin

dipilih secara langsung dengan suara terbanyak dari anggota-anggota *Serikat Mahmejaan*. Sistem kepemimpinan ini, masih dipengaruhi oleh sistem kepemimpinan dalam budaya *Mapalus*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Turang (1983), kepemimpinan dalam *Mapalus* yang bergaya paternalistis dipilih langsung oleh seluruh anggota *Mapalus* dengan melihat sosok yang paling mampu untuk memimpin *Mapalus*. Demikianlah, sebagaimana juga yang diungkap oleh Soekanto (2012) menyangkut ciri-ciri masyarakat yang masih dipengaruhi oleh gaya hidup pedesaan, golongan orang tua mendapatkan peranan penting, terutama juga untuk menjadi teladan sekaligus pemberi petunjuk dalam masyarakat.

Seorang pemimpin dalam *Serikat Mahmejaan* memang diharapkan memiliki kualitas-kualitas khusus yang membedakannya dengan anggota-anggota yang lain. Tentu aspek ini tidak bermaksud memisahkannya secara individu dari yang lain sebagai satu kolektivitas, melainkan menjadi kualifikasi bagaimana ia berkompetensi menjadi seorang pemimpin. Dalam konteks itu menurut Muller (1994) yang dikutip oleh Ritzer (2012), individualitas, bukannya menghancurkan keeratan ikatan sosial, ia malahan dibutuhkan untuk memperkuat ikatan tersebut. Sisi individual seorang pemimpin juga dapat menentukan kolektivitas dari sebuah kelompok yang dipimpinnya.

Dengan demikian, aspek sistem kepemimpinan yang telah berlangsung sekian lama dalam *Serikat Mahmejaan*, tercerminlah nilai budaya Musyawarah atau Mufakat di dalamnya. Relasi para anggota yang solid, dengan ciri khas loyalitas pada pemimpin, serta karakter yang baik dari seorang pemimpin menjadi atribut-atribut pendukung dalam jalannya sistem berorganisasi dalam *Serikat Mahmejaan*. Nilai musyawarah dan mufakat- pun melandasi setiap penentuan perencanaan serta kebijakan untuk kepentingan semua anggota *Serikat Mahmejaan*.

Mekanisme Pelaksanaan Persiapan

Berdasarkan hasil wawancara, adapun persiapan yang dimaksud dalam *Serikat Mahmejaan* yakni pelaksanaan rapat sebelum pelaksanaan pesta. Dalam kegiatan tersebut terungkap beberapa kebiasaan yang telah berjalan sejak dahulu. Setiap pelaksanaan rapat atau pertemuan senantiasa diawali dan diakhiri dengan doa. Rapat dijalankan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dipimpin oleh ketua. Ketika ada beberapa orang yang hendak meminta giliran, maka dilakukan dengan sistem undian, dan siapa yang terpilih, kelak akan disetujui oleh semua anggota kelompok. Inilah sebuah sistem sosial yang terjadi dalam *Serikat Mahmejaan*, sebuah sistem yang teratur dan di dalamnya terjadi interaksi sosial. Tentang ini, Talcott Parsons menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Garna (1996) bahwa adanya interaksi sosial, nilai maupun norma dan tujuan bersama oleh para pelaku sosial merupakan bagian dari sistem sosial.

Sistem tersebut telah berjalan sekian lama dalam *Serikat Mahmejaan*. Meskipun anggota-anggotanya merupakan campuran dari berbagai lapisan masyarakat, golongan agama, dan peran sosial lainnya, namun disatukan dalam satu sistem yang dengannya semua orang dapat menyatukan kepentingan maupun tujuan mereka. Bagaikan kelompok-kelompok sosial dengan skala yang lebih besar akan tetapi perbedaan yang paling mendasar di dalamnya yakni ciri khas *Serikat Mahmejaan* yang dilandasi dengan religiositas serta musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang tercermin dalam aspek persiapan pelaksanaan pesta ini yakni Religius dan Musyawarah/Mufakat.

Aturan Untepan Lutu

Berdasarkan hasil wawancara menyangkut aturan Untepan *Lutu* atau aturan untuk memasukkan makanan yang telah dimasak, ada rupa-rupa kriteria yang harus dipenuhi oleh semua anggota *Serikat Mahmejaan*. Kriteria-kriteria itu seperti penyediaan meja makan, empat jenis menu makanan, dan peralatan serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk pada saat acara ramah-tamah. Semua itu pun serentak (secara bersama-sama) dipersiapkan oleh semua anggota *Serikat Mahmejaan* sesaat sebelum pelaksanaan acara ramah-tamah sambil memperhatikan aspek-aspek kerapian, keapikan, atau keindahannya.

Melalui proses persiapan tersebut, maka tampaklah aktivitas kerja sama serta persatuan dan

kesatuan di dalamnya. Dalam kaitannya dengan itu, menurut MacIver dan Charles H. (1961) sebagaimana yang dikutip oleh Soekanto (2012), sebuah kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Ia kemudian menambahkan bahwa menurut beberapa sosiolog, kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok dalam sebuah kelompok sosial. Hal yang sama kiranya terjadi dalam proses persiapan dalam *Serikat Mahmejaan*. Meskipun proses tersebut merupakan bentuk dari kewajibannya sebagai sesama anggota, namun di dalam mempersiapkan meja, menu makanan, serta peralatan lainnya secara serentak, tercerminlah semangat kerja sama serta persatuan dan kesatuan di dalamnya. Dengan demikian, nilai budaya yang tercermin dalam aspek ini yakni Kerja sama dan Persatuan dan Kesatuan.

Hukuman

Berdasarkan hasil wawancara menyangkut hukuman atau sanksi bilamana seorang anggota *Serikat Mahmejaan* tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, terungkap bahwa hukuman yang diberikan oleh pimpinan tidaklah berat atau membawa efek jerah sebagaimana pelanggaran hukum pidana atau perdata. Menyangkut hukum seperti ini, tepatlah apa yang diungkapkan oleh Peters dan Siswosoebroto (1988) yang dikutip oleh Rianto (2012) bahwa dalam masyarakat primitif, perilaku anggota masyarakat memmanifestasikan keteraturan lahiriah tertentu. Terutama dalam hubungannya dengan sesamanya. Keteraturan tersebut tampaknya dikondisikan secara organis dan merupakan ciri manusia yang paling primer. Dari merekalah berasal ide tentang suatu “norma” yang “seharusnya” secara teratur menunjukkan kepada mereka pentingnya arti “seharusnya”. Dalam *Serikat Mahmejaan* sistem norma berupa kesepakatan bersama yang telah dibuat, sehingga pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut merupakan pelanggaran moral terhadap kesepakatan bersama.

Bila manakah seseorang diberikan hukuman atau sanksi? Biasanya, hukuman ini diputuskan pada saat komisi (pemeriksaan standar menu makanan) oleh pimpinan. Pada saat persiapan pesta, ketika didapati ada anggota yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah dijalankan dan sepakati bersama maka, patut mendapatkan hukuman. Kendatipun demikian, hukuman tersebut hanyalah berupa ganti rugi dengan cara memberikan sejumlah uang (Rp.30.000), namun uang tersebut tidak diberikan kepada pelaksana/ tuan pesta melainkan menjadi uang kas *Serikat Mahmejaan*. Tentu saja, hukuman ini tidak sesederhana sesuai memberikan uang ganti rugi segala perkara selesai sepenuhnya, melainkan yang terpenting yakni penyelesaian moral dan tanggung jawab yang tidak terlaksana sepenuhnya, sambil menjaga kerukunan dan kebersamaan sebagai sebuah kelompok sosial dalam masyarakat. Hal ini senada dengan teori Durkheim dalam (Ritzer, 2012) yang mengkaji menyangkut pemberian hukum dalam Solidaritas Organik. Bukan soal berat atau ringannya hukuman yang harus dijalankan oleh pelanggarnya, melainkan aspek yang diangkat yakni makna positif yang dapat dirasakan oleh semua anggota di dalam kelompok sosial atau masyarakat. Dengan demikian, nilai budaya yang tercermin dalam aspek hukuman ini yakni Kekeluargaan.

Aspek-Aspek Yang Mengalami Perubahan Karakteristik Sosial dalam Serikat Mahmejaan

Salah satu tesis dasar yang tak terbantahkan yakni perubahan merupakan sesuatu yang pasti. Tentang hal ini Tilaar (2002) mengungkapkan, bahwa perubahan-perubahan merupakan suatu gejala dalam masyarakat yang tak terhindarkan. Sebab, tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Sementara itu, Berhadapan dengan modernisasi dan globalisasi sekarang ini, berbagai aspek kehidupan masyarakat-pun, seperti nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya mengalami perubahan (Soekanto, 2012). Demikian juga dalam *Serikat Mahmejaan* ada perubahan-perubahan karakteristik sosial yang terjadi di dalamnya. Perubahan-perubahan itu pun dapat kita golongkan ke dalam dua aspek yakni, Sistem Keanggotaan dan Mekanisme Pelaksanaan. Dalam Mekanisme Pelaksanaan terdapat dua bagian yakni Menu Makanan dan Perlengkapan Sabuah.

Sistem Keanggotaan

Berdasarkan hasil wawancara, terungkaplah bahwa ada perubahan kuantitas dalam keanggotaan *Serikat Mahmejaan* sekarang dibandingkan pada zaman dulu. Dari aspek sistem keanggotaan ini, tampaklah bahwa kebutuhan akan pesta menjadi unsur penyebab pertama bertambah banyaknya anggota-anggota *Serikat Mahmejaan*. Masyarakat cenderung dan terpengaruh dengan mewarnai ucapan syukur mereka dengan mengundang keluarga, sahabat, dan handai taulan, sehingga perlu diadakan pesta. Perkembangan dan kebutuhan sezaman telah memengaruhi karakter masyarakat sehingga memengaruhi juga pola pikir dan tujuan-tujuan hidup mereka. Menurut Soekanto (2012), bentuk perubahan pada aspek ini yakni Perubahan Yang Dikehendaki dan Direncanakan. Yang dimaksud dengan bentuk perubahan ini yakni perubahan yang diperkirakan, diinginkan, atau telah direncanakan sebelumnya, sebelum terjadinya perubahan. Sebaliknya, perubahan yang tidak dikehendaki/tidak direncanakan berarti perubahan yang terjadi begitu saja atau berlangsung di luar jangkauan masyarakat.

Dengan demikian, bentuk perubahan yang terjadi dalam *Serikat Mahmejaan* khususnya pada bagian Sistem Keanggotaannya yakni Perubahan Yang Dikehendaki dan Direncanakan. Sebab, perubahan dari sisi kuantitasnya adalah adanya keinginan atau perencanaan anggota-anggotanya untuk melangsungkan pesta. Seandainya tidak ada rencana untuk melaksanakan pesta tentu, masuk menjadi anggota *Serikat Mahmejaan* bukanlah menjadi sebuah prioritas.

Menu Makanan

Berdasarkan hasil wawancara, telah terjadi perubahan dalam aspek Menu Makanan dalam *Serikat Mahmejaan* meskipun sifatnya berangsur-angsur atau lambat. Kalau zaman dulu, menu ikannya hanya satu jenis namun sekarang, harus disediakan empat jenis menu ikan. Terungkap pula bahwa, penyebab dari adanya perubahan tersebut yakni kebutuhan yang kontekstual seiring perubahan zaman yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, modernisasi yang erat dengan globalisasi telah mengakibatkan banyak perubahan di berbagai belahan dunia ini termasuk masyarakat Taratara dan terlebih khusus *Serikat Mahmejaan*.

Mengapa demikian? Salah satu fenomena yang dapat kita saksikan yakni model pakaian dan jenis makanan yang berasal dari Eropa dapat dinikmati di seluruh kota di Indonesia, bahkan gaya hidup Eropa lebih banyak dinikmati terutama oleh kaum muda dalam masyarakat. Situasi tersebut pun ditopang dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah telah menyebabkan tingkat mobilitas masyarakat menjadi tinggi. Situasi dan kebutuhan masyarakat pun berubah berhadapan dengan fenomena tersebut. Kebutuhan akan makanan dan minuman yang bervariasi semakin tinggi, sambil melihat cara untuk mendapatkannya pun agak mudah dibandingkan dengan situasi zaman dulu. Menyangkut hal ini, tepatlah salah satu faktor penyebab perubahan yang diungkapkan oleh Soekanto (2012) yakni Situasi dan Kebutuhan Masyarakat Yang Berubah. Sementara itu, dari bentuknya, perubahan yang terjadi adalah perubahan kecil. Diidentifikasi demikian sebab perubahan tersebut hanya terjadi di dalam aktivitas atau interaksi anggota-anggotanya saja dan tidak langsung memengaruhi masyarakat pada umumnya.

Perlengkapan Sabuah

Berdasarkan hasil wawancara menyangkut sebab-sebab terjadinya perubahan pada aspek Perlengkapan Sabuah, terungkaplah bahwa ada dua penyebab mengapa terjadi perubahan sosial. Yakni Pemikiran Yang Baru dan Sentuhan dengan Budaya Lain. Yang pertama, Pemikiran Yang Baru. Terungkaplah bahwa kelompok sosial ini telah hidup dalam masyarakat Taratara kurang lebih 50-an tahun (1960-an – 2019) dengan berbagai dinamika perkembangan yang terjadi di dalamnya. Perubahan-perubahan yang terjadi, didahului dengan sebuah cetusan hasil dari pemikiran yang baru. Untuk memunculkan perubahan tentu didahului dengan pengalaman dan dari pengalaman tersebut lahirlah sebuah pemikiran untuk menerapkannya terhadap sesuatu yang lain. Pengalaman akan hal-hal yang baru di tengah-tengah masyarakat, dapat menjadi bahan pemikiran yang bisa dipresentasikan kepada semua anggota kelompok dan jika diterima dengan baik, maka lahirlah sebuah perubahan. Pengalaman penggunaan tenda atau bangsal/aula untuk pelaksanaan pesta dalam masyarakat lain, dapat saja menjadi

motivasi untuk menerapkannya dalam pesta yang dilaksanakan oleh *Serikat Mahmejaan*. Dengan adanya anggota-anggota kelompok yang memiliki pemikiran yang baru maka, perubahan dapat terjadi atau diusahakan. Yang kedua yakni Sentuhan dengan Budaya Lain. *Serikat Mahmejaan* pada awalnya merupakan adaptasi dari budaya yang berkembang di luar masyarakat Taratara, tepatnya di dalam masyarakat Koha. Budaya tersebut kemudian dihantar ke dalam masyarakat Taratara, diperkenalkan, dijalankan bahkan dilestarikan oleh sebagian masyarakat Taratara. Contoh lain pula tempat-tempat makanan seperti *panstove* yang dulunya tidak dikenal dalam *Serikat Mahmejaan* dan hanya terbatas pada pesta melalui jasa katering atau makan resepsi, kini mulai diminati bahkan secara umum anggota *Serikat Mahmejaan* telah menggunakannya dalam setiap pelaksanaan pesta. Demikianlah, salah satu pendorong terjadinya perubahan, yakni sentuhan dengan budaya lain. Budaya lain jika dipandang sebagai sesuatu yang bernilai luhur, seirama dengan budaya *Mapalus* dan tidak bertentangan dengan budaya dalam masyarakat maka dapat saja diadaptasi untuk dikembangkan dalam masyarakat.

Simpulan

Terdapat lima nilai budaya dalam *Serikat Mahmejaan* yakni, nilai kekeluargaan, nilai kerja sama, nilai persatuan dan kesatuan, nilai musyawarah/mufakat, dan nilai religius. Sementara itu perubahan karakteristik sosial yang terjadi dalam *Serikat Mahmejaan* yakni: dari bentuknya, perubahan karakteristik sosial yang terjadi dalam *Serikat Mahmejaan* adalah Perubahan Kecil dan Perubahan Yang Dikehendaki dan Direncanakan. Dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, perubahan yang terjadi disebabkan oleh Situasi dan Kebutuhan Masyarakat Yang Berubah yang didorong oleh dua faktor lainnya yakni Pemikiran Yang Baru, serta Sentuhan dengan Budaya Lain.

Daftar Pustaka

- Bakker, J. W. M. (1984). *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Garna, H. Judistira K. (1996). *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar – Konsep – Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2008. *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. Pranala (link): <https://kbbi.web.id.serikat>.
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar Antropologi*. Cetakan ke – 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- La Mansi, *Fungsi dan Peran Tradisi Mapalus dalam Masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara*. Jurnal “Al-Qalam” No. XX Tahun XIII Edisi Juli-Desember 2007.
- Mentang, Paulus Joseph. (1999). *Serikat Mahmejaan dalam Pesta Perkawinan Tombulu di Taratara*. (Skripsi). Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.
- Pangalila, Theodorus. (2018). *Toleransi dalam Keberagaman Masyarakat Lokal (Studi Fenomenologi Hubungan antar Agama dan Etnis pada Masyarakat Kota Tomohon)*. (Disertasi). Universitas Merdeka Malang.
- Rianto Adi. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Terj. Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres. Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif*

untuk Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo.

- Turang, J. (1983). *Mapalus di Minahasa*. Posko Operasi Mandiri Daerah tingkat II Kabupaten Minahasa. Turang, Treesye I., Agus Suman, Jeany Mandag, Soemaro. *Kajian Peran Mapalus dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tomohon*. Wacana-Vol. 15, No. 4 (2012).
- Uada, Hendra, N. Kandowangko, Shirley Y.V. I. Goni. *Budaya Mapalus dalam Meningkatkan Aktivitas Kelompok Tani (Suatu Studi Kasus Desa Talawaan Atas Kec. Wori Kab. Minahasa Utara)*. Holistik, Tahun X No. 20/ Juli- Desember 2017
- Yunus, Rasid. *Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa*. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Vol 13. No 1 (2013).

Artikel Terbitan

Perlawanan Gerakan Guru Pasca Orde Baru di Indonesia: Studi Pada Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Afdhal, Rakhmat Hidayat

Analisa penyebab hilangnya tradisi Rarangén (Studi Fenomenologi pada Masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya)

Ira Siti Rohimah, Achmad Hufad, Wilodati

Sesajen sebagai Nilai hidup bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung

Ujang Kusnadi Adam, Andreian Yusup, Salma Fauziyyah Fadhlullah, Siti Nurbayani

Pemanfaatan Sungai Langkap sebagai Tempat Pembuangan Limbah Rumah Tangga di Kabupaten Purbalingga

Gita Saputri, Antari Ayuning Arsi

Pembentukan Perilaku Kewirausahaan Tunanetra melalui *Come_Unity* Sahabat Mata di Kota Semarang

Asma Luthfi, Toyibah

Peran Paguyuban Duta Wisata "Sekargading" dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Batang

Deby Prasetio Agung, Atika Wijaya

Nilai Budaya dan Perubahan Karakteristik Sosial dalam Serikat Mahmejaan Masyarakat Taratara

Elpianus Paat, Grace J. Soputan, Theodorus Pangalila, Ferdinand Kerebungu

